



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya telah melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 22 Juni 2015

Sisca Ameliawati Rudy

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sisca Ameliawati Rudy

NPM : 1106056844

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juni 2015

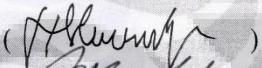
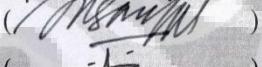
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh,

Nama : Sisca Ameliawati Rudy
NPM : 1106056844
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : *Meriam Traditional Land Claim: Native Title Act*
di Australia (1982-1993)

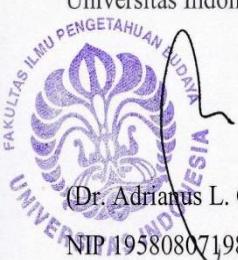
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Toebagus Lutfi, S.S, M.Hum. ()
Ketua Penguji : Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. ()
Penguji : Dr. Agus Setiawan, S.S., M.Si. ()
Panitera : Yudi Bachrioktora, S.S., M.A. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 22 Juni 2015

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



(Dr. Adrianus L. G. Waworuntu, M. A.)

NIP 195808071987031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan hingga pada tahap akhir penyusunan skripsi ini, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan karya akhir ini.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Toebagus Lutfi, S.S, M.Hum. yang telah membimbing, memberikan kritik serta saran, dan tanpa lelah selalu mengingatkan saya untuk segera merampungkan skripsi ini. Sebagai mahasiswa beliau, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi atas ilmu yang telah diberikannya selama masa studi saya di Jurusan Ilmu Sejarah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dewan Pengaji, Bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum., Bapak Dr. Agus Setiawan, S.S. M.Si., dan Bapak Yudi Bachrioktora, S.S., M.A. yang telah memberikan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wardiningsih Soerjohardjo, S.S., M.A., Ph.D., (Ibu Dien), yang selalu membimbing saya sejak saya masuk sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia hingga pada tahap penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk Ibu Dien yang memperkenalkan saya kepada dunia Aboriginal Australia yang sangat menarik untuk dipelajari juga atas segala bantuan Ibu Dien mulai dari masukan untuk judul, pinjaman buku, hingga kritik dan saran untuk penelitian skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kresno Brahmantyo, S.S., M.Hum., yang selalu membantu saya sepanjang proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan juga kesediaan Bapak Kresno yang seringkali membantu saya mengakses situs-situs Australia yang tidak bisa dibuka dari Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Harry Darmawan, S. Hum., M.Si., atas kritik serta saran membangun guna perbaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Linda Sunarti, M.Hum.; Ibu Tri Wahyuning Mudaryanti, S.S., M.Si.; Ibu Tini Ismiyani,

S.Hum., M.Hum.; Ibu Dr. Ita Syamtasiyah Ahyat, M.Hum.; (Alm.) Ibu Dr. Magdalia Alfian; Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.; Bapak Kasijanto, S.S., M.Hum.; Bapak Didik Pradjoko, S.S., M.Hum.; Bapak Dr. Abdurakhman, M.Hum.; Bapak Dr. Yuda B. Tangkilisan, S.S., M.Hum.; serta seluruh jajaran staf pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu-persatu. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Siti Rohmah Soekarba, S.S., S.Pd., M.Hum., yang selalu men-*support* saya tanpa henti.

Saya juga ingin berterima kasih kepada berbagai pihak dan badan yang telah membantu proses pengumpulan sumber primer untuk penulisan skripsi ini yaitu *National Archives of Australia*, *National Library of Australia*, *Museum of Australian Democracy*, *Jurnal Australasian Legal Information Institute* (AustLII), *Jurnal JSTOR*, surat kabar Australia (*The Australian*, *Sydney Morning Herald*, *Herald Sun*, *The Age*), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, serta lembaga lain yang sangat berjasa dalam membantu proses heuristik penulisan skripsi ini.

Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rudiawan dan Ibu Suminar Nurjanah yang telah menjadi sahabat, pendukung utama, dan tempat bersandar sejak hari pertama saya di bumi. Terima kasih Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendukung apapun yang sedang saya kerjakan serta apapun itu mimpi dan cita-cita yang saya miliki. Saya tahu, sampai kapanpun saya tidak pernah bisa membala jasa Ibu dan Bapak. Saya juga ingin berterima kasih kepada adik saya, Irvan Fahmi Rudy yang selalu mewarnai hari-hari kami dengan segala leluconnya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya tersayang, Nadia Nur Indriany dan Farah Tasya Novana. Bersama, kami telah melintasi benua dan samudera ke tempat-tempat yang tadinya hanya sebatas peta kertas di dinding kamar saya. Juga untuk kawan seperjuangan, Novia Osian Ayu Pramitha, Katri Adiningtyas, Dian Vinnie Fabyola, Noor Fatia Lastika Sari, Dewi Saraswati, Farihah, Tiur Zahrota Mawaddah, dan semua teman-teman Sejarah 2011, terima kasih atas semua dukungan kalian selama ini.

Terima kasih untuk Muhammad Waffa Kharisma yang selalu ada sebagai *sparring partner* dan teman berbagi yang sangat menyenangkan. Juga untuk

kawan-kawan saya; Sutan Ridwan Nasution, Hanifnya, Genta Tenri Mawangi, Asrul Sani Masri, Dhanisa Kamila, Herza Godlyva Viktoria Alamsyah, Irsyad Leihitu, Ira Destiara, Cintya Dwi Rianti, dan seluruh kru Starbucks UI yang selalu setia menemani saya hingga akhir penulisan skripsi ini. Untuk teman-teman dari Radio Telekomunikasi Cipta (RTC UI), Radite Bernard, Elizabeth Priscilla, Catrina Sinaga, Sekar Harumningtyas, Daron Dewata, Beta Sindiana Dewi, Andrew Immanuel, Loise Viranti, Marfanisha, Delly Verdisyara, Wahyu Ramadhan, Irvanudin Rahman, Nadya Amanda Pritami, Putri Kinasih, Nizar Bajri, dan semua kolega RTC UI lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk canda, tawa, suka, dan duka yang telah kalian bagi bersama saya. Terima kasih juga kepada kru pengajar di Payung Bahasa, Marissa Saraswati serta Mr. Donald Shaw atas segala dukungan yang telah diberikan kepada saya.

To my dear friends and colleagues at the United Nations Alliance of Civilizations, Naim Leo Beširi (Serbia), Milan Balaban (Bosnia), Claudia Patricia Lopez (Spain), Guillermo Bril (Argentina), Maximillian Seunik (Canada), François Xavier Diatta (Senegal), Atanas Genkov (Bulgaria), Arturo Castellanos Canales (Mexico), Ayanda Nxusani (South Africa) and every beautiful soul that I met on this organization; thank you so much for embracing me as a part of the family, for sharing your dreams and for keeping it real. Now I know, language and distance can be conquered by hard work and strong will.

To Constanteyn Roelofs, you altered my view of the world completely and I can never thank you enough for that.

Akhir kata, saya berharap Tuhan membala budi dan kasih yang telah kalian berikan kepada saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk mempelajari negara Australia, tapi juga untuk pembaca lainnya.

Depok, 22 Juni 2015

Penulis,

Sisca Ameliawati Rudy

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisca Ameliawati Rudy
NPM : 1106056844
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Meriam Traditional Land Claim: Native Title Act di Australia (1982-1993)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 22 Juni 2015
Yang menyatakan



(Sisca Ameliawati Rudy)

ABSTRAK

Nama : Sisca Ameliawati Rudy
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : *Meriam Traditional Land Claim: Native Title Act di Australia (1982-1993)*

Skripsi ini membahas mengenai sejarah dinamika hukum Australia terkait *Aboriginal Land Rights*. Skripsi ini mendiskusikan klaim seorang pemimpin Penduduk Kepulauan Sekat Torres yang terkemuka, Eddie Mabo, terhadap *land rights*. Di tahun 1982, Eddie Mabo dan empat kerabatnya menuntut Pemerintah Queensland atas legalitas hak mereka di tanah yang mereka huni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, *High Court* memberikan *land rights* kepada orang-orang Aborigen. Kemenangan ini menjadi titik balik kebijakan Australia terkait penduduk asli dengan dikeluarkannya *Native Title Act* di tahun 1993. Penelitian ini didasarkan dari sumber arsip yang dimiliki oleh *National Archives of Australia* dan dokumen legal *High Court of Australia* juga surat kabar serta video dokumenter terkait Mabo. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

Kata kunci:

Meriam, *Aboriginal Land Rights*, *Torres Strait Islander*, Eddie Mabo, Pemerintah Queensland, *High Court*, kebijakan Australia, penduduk asli, *Native Title Act*, *National Archives of Australia*

ABSTRACT

Name : Sisca Ameliawati Rudy
Study Program : History
Title : Meriam Traditional Land Claim: Native Title Act in Australia (1982-1993)

This study is focusing on the dynamics of Australian Law regarding Aboriginal Land Rights. It discusses the claim of Torres Strait Islander prominent leader, Eddie Mabo on his land rights. In 1982, Eddie Mabo and friends sued Queensland Government concerning their legal rights on their own land. For the first time in Australian history, High Court passed the Aboriginal Land Rights. This winning became a turning point on Australian policy towards the indigenous people by producing the Native Title Act in 1993. This research based on archival sources held in the National Archives of Australia and High Court legal documents as well as newspapers and documentary video on Mabo. This study based on historical methods.

Key words:

Meriam, Aboriginal Land Rights, Torres Strait Islander, Eddie Mabo, Queensland Government, High Court, Australian policy, indigenous people, Native Title Act, National Archives of Australia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
GLOSARIUM	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup	7
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sumber Penelitian	12
1.8. Sistematika Penulisan	14
2. PENDUDUK ASLI DAN KEBIJAKAN TANAH DI AUSTRALIA	16
2.1. Penduduk Asli Australia	16
2.1.1. Orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres	18
2.1.2. Edward (Eddie) Koiki Mabo	22
2.2. Kebijakan dan Perdebatan Atas Tanah	27
2.2.1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penduduk Asli	29
2.2.2. Hukum Adat Penduduk Asli Mengenai Tanah	38
3. EDDIE MABO DAN KLAIM TANAH DI PULAU MURRAY	43
3.1. Persiapan Kasus Hukum	43
3.2. Proses Peradilan	47
3.2.1. Kasus Mabo di <i>High Court of Australia</i>	49
3.2.2. Perdebatan Antara Mabo dan Pemerintah Queensland	58
3.3. Keputusan <i>High Court of Australia</i>	65
4. ARTI PENTING KEMENANGAN MABO DI AUSTRALIA	72
4.1. Respon Pemerintah Atas Kemenangan Mabo	72
4.1.1. Perdebatan Pemerintah dengan Negara Bagian	76
4.2. Lahirnya <i>Native Title Act</i> (1993)	80
4.2.1. Penerapan <i>Native Title Act</i> (1993)	84

5. KESIMPULAN	90
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	103



DAFTAR SINGKATAN

ALP	: <i>Australian Labor Party</i>
ATSIC	: <i>Aboriginal and Torres Strait Islanders Council</i>
AustLII	: <i>Australasian Legal Information Institute</i>
COAG	: <i>Council of Australian Governments</i>
DNA	: <i>Director of Native Affairs</i>
FCAATSI	: <i>Federal Council for the Advancement for Aborigines and Torres Strait Islanders</i>
HMS	: <i>Her Majesty Ship</i>
HoR	: <i>House of Representatives</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
LMS	: <i>London Missionary Society</i>
NAA	: <i>National Archives of Australia</i>
NLA	: <i>National Library of Australia</i>
NTA	: <i>Native Title Act</i>
Rev.	: <i>Reverend</i>
TI	: <i>Thursday Island</i>
VOC	: <i>Verenigde Oost-Indische Compagnie</i>

GLOSSARIUM

- Aboriginals' Land Trust* : Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah South Australia pada tahun 1965, memberikan dana kepada orang-orang Aborigin
- Affidavit* : Sumpah berupa pernyataan tertulis yang digunakan sebagai bukti dalam pengadilan
- The Coming of the Light* : Istilah penduduk Pulau Murray untuk menyebut periode kedatangan misionaris Eropa ke Kepulauan Selat Torres, Queensland
- Communal* : Dibagi atau digunakan oleh anggota kelompok dari sebuah kelompok atau komunitas
- Company Boats* : Kapal penangkap ikan berskala kecil milik Penduduk Kepulauan Selat Torres, Queensland
- Crown Land* : Tanah milik Kerajaan Inggris
- Defendant* : Sebutan untuk pihak terdakwa dalam suatu kasus hukum
- Demurrer* : Keberatan yang diajukan salah satu pihak (baik penuntut ataupun terdakwa) di dalam proses peradilan
- Dreamtime* : Suatu budaya sejarah lisan dalam masyarakat Aborigin yang menurunkan mitos, ritual, puisi, dan pengetahuan melalui hubungan ayah-anak secara turun-temurun
- The First Fleet* : Sebutan bagi armada kapal (berisi narapidana Inggris) pertama yang sampai di benua Australia
- Gavelkind* : Sebuah hukum tanah yang ada di Kent, Inggris, sejak masa Anglo-Saxon hingga tahun 1925 yang menyediakan kerangka aturan untuk membagi rata warisan tanah kepada anak-anak lelaki dari si pewaris
- The Great Silence* : Sebutan W. E. H. Stanner, sejarawan Australia, atas periode di antara tahun 1850-1950 di mana tidak ada satupun tulisan

	sejarah di Australia yang menyinggung eksistensi bangsa Aborigin
<i>Hearing</i>	: Proses dengar pendapat di pengadilan
<i>Hearsay</i>	: Omongan belaka, ungkapan para hakim di <i>Queensland Supreme Court</i> terkait kesaksian lisan yang disampaikan para saksi Meriam dalam kasus Mabo.
<i>High Court of Australia</i>	: Sistem pengadilan yang memiliki jenjang tertinggi di negara Australia
<i>Land Lease</i>	: Kontrak atau sewa tanah yang diberikan oleh Pemerintah Australia kepada penduduk non-Aborigin
<i>Land Rights</i>	: Gerakan politik terkait tuntutan penduduk asli atas tanah yang mulai berkembang di Australia selepas Perang Dunia II
<i>Land Tenure</i>	: Tanah dengan masa jabatan yang diberikan Raja Inggris kepada ksatria dan bangsawan untuk mengolah tanah tersebut sesuai dengan kehendak mereka sendiri
<i>In Animum</i>	: Istilah dalam bahasa Latin yang berarti kepemilikan tanah melalui hubungan spiritual
<i>Indigenous People of Australia</i>	: Penduduk asli Australia yang terdiri dari bangsa Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres
<i>In Rem</i>	: Istilah dalam bahasa Latin yang berarti kepemilikan tanah melalui hubungan material
<i>Mainland Australia</i>	: Daratan utama atau benua Australia
<i>Mabo Bill</i>	: Rancangan undang-undang terkait hak penduduk asli Australia yang berdasarkan pada <i>Mabo Decision</i>
<i>Mabo Decision</i>	: Putusan hukum <i>High Court of Australia</i> terkait tuntutan Eddie Mabo dalam <i>Mabo (No.2)</i>
<i>Mabo (No. 1)</i>	: Kasus hukum yang berdasarkan atas penolakan Eddie Mabo dan para penuntut Meriam atas dikeluarkannya <i>Queensland Coast Islands Declaratory Act</i> (1985) oleh Pemerintah Negara Bagian Queensland

<i>Mabo (No. 2)</i>	: Kasus hukum yang berdasarkan pada tuntutan Eddie Mabo dan para penuntut Meriam lainnya atas tanah mereka di Pulau Murray, Kepulauan Selat Torres, Queensland
<i>Malo's Law</i>	: Hukum Malo, seperangkat aturan religius yang harus dipatuhi orang-orang Meriam berdasarkan ajaran Malo, dewa tradisional mereka
<i>Master Boats</i>	: Kapal penangkap ikan berskala besar milik pengusaha kulit putih di Kepulauan Selat Torres, Queensland
<i>Meriam</i>	: Nama klan yang menempati Pulau Murray (Pulau Mer), Kepulauan Selat Torres, Queensland, Australia
<i>Native Title</i>	: Hak tradisional
<i>Native Title Act (1993)</i>	: Kebijakan yang dititikberatkan pada pengakuan Australia atas hak penduduk asli dan kewajiban negara untuk melindunginya
<i>Native Title Tribunal</i>	: Sistem pengadilan yang khusus didirikan untuk mengurusi masalah hak tradisional penduduk asli di Australia
<i>Noble Savage</i>	: Kata yang digunakan pada masa lalu dan secara positif untuk merujuk kepada seseorang atau sekelompok orang yang tidak hidup di dalam komunitas yang lanjut (seperti komunitas masyarakat Eropa)
<i>Norman Conquest</i>	: Sebuah penaklukan militer raja-raja Anglo-Saxon di Inggris yang dipimpin oleh William, <i>duke of Normandy</i> , dari Perancis, pada 14 Oktober 1066
<i>Oral Testimony</i>	: Kesaksian oral atau lisan yang diberikan di pengadilan
<i>Pastoral Leases</i>	: Kontrak atas tanah pemerintah yang disewakan untuk bisnis peternakan
<i>Penal Colony</i>	: Sebuah tempat, pada masa lalu, di mana para kriminal dikirim ke dalamnya sebagai sebuah hukuman
<i>Plaintiff</i>	: Sebutan untuk pihak penuntut dalam suatu kasus hukum
<i>Premier</i>	: Sebutan untuk pemimpin tertinggi di negara-negara bagian Australia

<i>Prime Minister</i>	: Perdana Menteri
<i>Redfern Speech</i>	: Pidato bersejarah yang disampaikan Paul Keating di Redfern Park, Sydney, New South Wales, pada 10 Desember 1992 terkait tanggapannya terhadap <i>Mabo Decision</i>
<i>Remitter Court</i>	: Sistem pengadilan yang digunakan untuk mereferensikan sebuah kasus ke pengadilan lain dalam rangka untuk melakukan proses pemeriksaan dan dengar pendapat secara lebih mendalam
<i>Senates</i>	: Senat, sebuah kamar dalam parlemen Australia yang bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang
<i>Settler</i>	: Seseorang yang pergi untuk hidup di suatu negara atau wilayah baru.
<i>Squatter</i>	: Seseorang yang tinggal di sebuah bangunan atau tanah tanpa izin dan tanpa membayar sewa
<i>Supreme Court of Queensland</i>	: Sistem pengadilan tertinggi yang ada di Negara Bagian Queensland
<i>Tent Embassy</i>	: Bentuk kritik para aktivis pro-Aborigin atas perlakuan Pemerintah Australia yang memperlakukan penduduk asli Australia sebagai orang asing di tanahnya sendiri. Di tahun 1972, para aktivis tersebut mendirikan sebuah tenda yang mereka sebut 'kantor kedutaan' di depan Gedung Parlemen di Canberra
<i>Terra Nullius</i>	: Sebuah konsep dari bahasa Latin yang berarti ' <i>land belongs to no one</i> ' (tanah tidak bertuan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	103
“Contemporary Australia”	
Lampiran 2	104
“New Holland and New South Wales, 17 th -19 th Centuries”	
Lampiran 3	105
“Marine industry - Pearling - Different phases of cultured pearl industry in northern Australia, where Torres Strait Islanders are extensively employed 1970-1972”	
Lampiran 4	106
“Marine industry - Pearling - Different phases of cultured pearl industry in northern Australia, where Torres Strait Islanders are extensively employed 1970-1972”	
Lampiran 5	107
Letters Pattent yang dikeluarkan oleh Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris pada 6 Juni 1859 untuk mendirikan Queensland sebagai sebuah koloni baru yang terpisah dari Koloni New South Wales.	
Lampiran 6	108
“Queensland Coast Islands Act” yang dikeluarkan pada tahun 1879 untuk menganeksasi wilayah Kepulauan Selat Torres ke dalam territorial Koloni Queensland.	
Lampiran 7	109
“Queensland Coast Islands Act” yang dikeluarkan pada tahun 1879 untuk menganeksasi wilayah Kepulauan Selat Torres ke dalam territorial Koloni Queensland.	
Lampiran 8	110
Pemberitaan mengenai aneksasi Kepulauan Selat Torres ke dalam Koloni Queensland.	
Lampiran 9	111
“Torres Strait Light Infantry Battalion”	
Lampiran 10	112
“Torres Strait Light Infantry Battalion”	
Lampiran 11	113

Dokumen militer yang menginformasikan pengevakuasian seluruh warga Australia yang berada di Kepulauan Selat Torres, kecuali para penduduk pulau itu sendiri.

Lampiran 12	114
“ <i>Two Torres Strait Islander men on beach, one with fishing spear Eddie Mabo and Jack Wailu on the Island of Mer in the Torres Strait Island</i> ”	
Lampiran 13	115
“Edward Koiki Mabo (Eddie Mabo)”	
Lampiran 14	116
“ <i>Bay Scene</i> ” Gambar Pemandangan di Pulau Murray yang dilukis oleh Eddie Mabo.	
Lampiran 15	117
Peta Selat Torres, Queensland, Australia	
Lampiran 16	118
“ <i>Eddie Mabo’s Portions</i> ”, denah Pulau Murray, digambarkan oleh Eddie Mabo yang menunjukkan kepemilikan tiap jengkal tanah tradisional di pulau tersebut.	
Lampiran 17	119
Bonita (Netta) Mabo, istri dari Eddie Mabo.	
Lampiran 18.1	120
Keputusan kasus Mabo (No. 1) oleh <i>High Court of Australia</i> .	
Lampiran 18.2	121
Keputusan kasus Mabo (No. 1) oleh <i>High Court of Australia</i> .	
Lampiran 19	122
“ <i>Le-Ri: Dave Passi, Eddie Mabo, Bryan Keon-Cohen and James Rice outside the Queensland Supreme Court in 1989</i> ”	
Lampiran 20	123
“ <i>L-R: Eddie Mabo, Barbara Hocking, Ron Castan, Greg McIntyre, Bryan Keon-Cohen. Taken during the Qld. Supreme Court hearings 1985-86.</i> ”	
Lampiran 21	124
“ <i>Mabo Legal Team</i> ”	
Lampiran 22	125
“ <i>Mabo Treaty</i> ”	

Lampiran 23	126
“ <i>Mabo Decision</i> ”, putusan yang dikeluarkan <i>High Court of Australia</i> terkait tuntutan Eddie Mabo dan para penuntut Meriam lainnya atas tanah tradisional mereka di Pulau Murray.	
Lampiran 24	127
“ <i>Justice Brennan Faces An Angry Mob</i> ”, karikatur di surat kabar Australia yang menggambarkan ketidaksetujuan sebagian rakyat Australia (khususnya petani dan perusahaan tambang) terkait dengan <i>Mabo Decision</i> yang dikeluarkan oleh <i>High Court of Australia</i> .	
Lampiran 25	128
“ <i>Aborigines rejoice as High Court ends terra nullius</i> ”	
Lampiran 26	129
Celuia Mabo, anak perempuan dari Eddie dan Bonita Mabo beserta cucu mereka di depan makam Eddie Mabo di Desa Las, Pulau Murray.	
Lampiran 27	130
“ <i>Aboriginal people and Torres Strait Islander peoples - Prime Minister Paul Keating with Mabo group at Parliament House</i> ”	
Lampiran 28	131
“ <i>You Wanna Policy? I'll Give You A !!*@%!/ Policy!</i> ”, sebuah karikatur di surat kabar Australia yang menggambarkan suasana debat <i>Mabo Bill</i> di <i>Senates Australia</i> .	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benua Australia telah menjadi panggung bagi para pelaut Eropa ternama sejak abad ke-16. Seorang pelaut Belanda yang bernama Willem Janszoon, merupakan orang Eropa pertama yang menemukan benua Australia pada tahun 1606.¹ Ekspedisi tersebut disponsori oleh VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*), dengan tujuan untuk menemukan rempah-rempah. Tetapi pada tahun 1623, VOC menganggap bahwa Australia bukan negara yang subur, sehingga perusahaan dagang Belanda itu memutuskan untuk meninggalkan Australia serta kepemilikannya terhadap benua tersebut.² Setelah kegagalan pertama Inggris untuk mengirim armadanya ke Australia pada tahun 1622, James Cook kemudian ditugaskan untuk pergi ke Australia dan segera mengklaim tanah yang telah ditinggalkan Belanda tersebut sebagai milik Kerajaan Inggris (lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2).³

Kapten James Cook menemukan pesisir Timur Australia pada tahun 1770, tetapi orang-orang Aborigin Australia telah ‘menemukan’ benua tersebut sekitar 38.000 tahun lalu.⁴ Data tersebut didapat berdasarkan temuan arkeologis di Danau Mungo, New South Wales pada tahun 1974.⁵ Keberadaan benua Australia baru diketahui publik pada abad ke-17, namun para penduduk di dalamnya telah hidup di sana dalam waktu yang sangat lama. Mereka hanya tidak mengerti konsep negara seperti yang dipahami oleh bangsa Barat, mereka pun bisa dikatakan terus hidup ‘di luar sejarah’ hingga penemuan benua tersebut oleh para penjelajah Eropa.

Kedatangan Cook ke Botany Bay dengan kapalnya, HMS (*Her Majesty Ship*) Endeavour, pada tahun 1770 didasari oleh berbagai motif. Pertama adalah

¹ Barbara A. West, *A History of Australia*, (New York: Hermitage, 2010), hlm. 32.

² Belanda menamai wilayah Australia sebelah barat itu dengan nama New Holland. Abel Tasman, seorang pelaut Belanda lainnya berhasil menemukan Tasmania (1642) yang kemudian dinamakan Van Diemen’s Land, nama dari Gubernur Jenderal VOC saat itu.

³ West, *op.cit.*, hlm. 33.

⁴ Margaret Ann Franklin, *Black and White Australians: An Inter-Racial History 1788-1975*, (South Yarra: Heinemann Educational Australia, 1976), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

adanya permusuhan di antara Inggris dengan Perancis dan Spanyol sejak kemenangan Inggris pada *Seven Years' War* tahun 1763. Saat itu juga, Inggris yang baru saja kehilangan Amerika sebagai koloninya dalam Perang Kemerdekaan (1776) merasa perlu mencari wilayah baru sebagai *penal colony*⁶-nya. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Inggris terjadi sebagai dampak adanya Revolusi Industri ini membuat Inggris harus mengirimkan lebih dari 50.000 orang tahanan ke Amerika selang tahun 1650 hingga tahun 1775. Inggris terbiasa membuang tahanannya (baik kriminal maupun politik) ke benua Amerika. Setelah merdeka, Amerika Serikat menolak kebijakan tersebut sehingga Australia menjadi koloni baru Inggris di Pasifik. Ide untuk mengalihkan lokasi pembuangan tahanan tersebut ke Australia, diusulkan oleh Sir Joseph Banks pada tahun 1779.⁷ Kekalahan Inggris di Perang Kemerdekaan Amerika, membuat Amerika Serikat bersama Perancis dan Spanyol terus melemahkan posisi Inggris di Eropa sehingga Inggris, di bawah pemerintahan Gubernur William Pitt, berpikir selangkah lebih maju untuk mengamankan pengaruhnya di Asia dan Pasifik. Klaim terhadap Australia yang saat itu dinamakan dengan New South Wales (sebelah timur dari benua Australia), harus dilakukan sebelum Inggris didahului oleh Perancis.⁸

Ide Sir Joseph Banks untuk menjadikan Australia sebagai tempat pembuangan tahanan Inggris baru disetujui oleh Pemerintah pada tahun 1786. Setelah penemuan benua Australia oleh James Cook pada tahun 1770, Arthur Phillip diutus pergi ke New South Wales pada tahun 1788, untuk mendirikan *penal colony*, tempat untuk membuang para kriminal, di Sydney, dan menjadi Gubernur New South Wales yang pertama. Philip datang bersama *the first fleet*⁹ atau armada pertama yang berisikan tahanan dari Inggris. Kolonisasi Inggris terhadap Australia menimbulkan banyak konflik kekerasan yang terjadi antara para *settlers* dengan orang Aborigin. Gubernur Philip memiliki sikap yang unik

⁶ “A place where criminals were sent as a punishment in the past.” Sebuah tempat, pada masa lalu, di mana para kriminal dikirim ke dalamnya sebagai sebuah hukuman. “Penal Colony”, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition*, 8th ed, CD-ROM, (Oxford: Oxford University Press, 2010).

⁷ Franklin, *op.cit.*, hlm. 21.

⁸ West, *op.cit.*, hlm. 41.

⁹ *The first fleet*, armada pertama, terdiri dari sebelas kapal dengan kapal terbesarnya HMS Sirius. Di dalamnya terdapat 443 pelaut, 800 kriminal yang sebagiannya adalah wanita, dan dikomandoi oleh Kapten Arthur Philip yang nantinya menjadi Gubernur New South Wales yang pertama dalam Alan Moorehead, *The Fatal Impact: The Invasion of the South Pacific 1767-1840*, (London dan Melbourne: Mead Becket, 1987), hlm. 161.

terhadap orang-orang Aborigin. Ia memiliki intensi untuk menjadikan orang-orang Aborigin agar bisa hidup layaknya bangsa Eropa. Tetapi kemudian konsep *noble savage*, makhluk mulia,¹⁰ menjadi konsep umum yang dilihat orang-orang kulit putih atas orang-orang Aborigin. Namun konsep tersebut perlahan semakin berubah hingga kemudian ada anggapan bahwa orang-orang Aborigin hanya sebatas *creatures* atau makhluk tidak beradab, ‘melegalkan’ perbuatan bangsa kulit putih untuk membunuh mereka.

Perilaku rasisme mulai terbentuk di dalam pola pikir bangsa kulit putih. Rasisme ini timbul semata-mata karena adanya anggapan bahwa bangsa Inggris jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Aborigin di Australia. Kata ‘ras’ sendiri mulai digunakan di Inggris kurang lebih sejak 450 tahun yang lalu. Pada abad 16, mereka menggunakan kata tersebut sebagai acuan untuk membedakan suatu kelompok atau kelas berdasarkan penampilan fisik dan karakteristik biologisnya. Pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik ini diperkuat dengan adanya penjelajahan bumi oleh orang-orang Eropa hingga kemudian munculah anggapan bahwa ras kulit putih lebih unggul dibandingkan dengan ras kulit hitam. Pandangan inilah yang kemudian menjadi legitimasi bangsa Eropa untuk mendiskriminasi bangsa-bangsa berkulit hitam. Perilaku rasisme ini kerap terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Amerika, Afrika, dan juga Australia.¹¹

Pendudukan Australia oleh Inggris diperkuat dengan adanya konsep *terra nullius*.¹² Konsep yang berarti tanah tidak bertuan ini sangat mendiskriminasi kehadiran orang-orang Aborigin yang merupakan penduduk asli Australia yang telah menempati benua tersebut selama 50.000 tahun atau sebanyak 2.000

¹⁰ “A word used in the past to refer in a positive way to a person who did not live in an advanced human society”. Kata yang digunakan pada masa lalu secara positif untuk merujuk kepada seseorang yang tidak hidup di dalam komunitas yang lanjut. “*Noble Savage*”, Oxford, *op. cit.*

¹¹ Keith McConnochie, David Hollinsworth, dan Jan Pettman, *Race and Racism in Australia*, (New South Wales: Social Science Press, 1989), hlm. 7.

¹² *Terra nullius* merupakan sebuah konsep, berasal dari Bahasa Latin, yang berarti *land belongs to no one*. Menurut John Basten, *terra nullius* memiliki tiga arti, yang pertama adalah sebuah negara yang tidak berada di bawah keadaulatan negara lain, dan tidak diakui oleh hukum internasional. Kedua, *terra nullius* berarti sebuah negara yang tidak berpenghuni. Ketiga, konsep tersebut berarti sebuah teritori yang dihuni, tetapi penghuninya tidak memiliki sistem hukum yang diakui di bawah hukum Kerajaan Inggris, dan individunya tidak memiliki kepemilikan sah atas tanah tersebut. John Basten, *A Curious History of the Mabo Litigation*, makalah yang dipresentasikan dalam *Native Title Conference: Traditional and Change*, (Darwin, 2006), hlm. 3.

generasi. Penduduk asli Australia merupakan bangsa yang hidup sebagai *hunter-gatherer* (peramu-pengumpul) yang tidak bercocok tanam, namun hanya berburu hewan liar dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Aboriginal juga dikatakan hanya sebagai *mere wanderers* atau pengembara biasa saja di benua Australia. Australia, atau saat itu New South Wales adalah *terra nullius*. Tidak bertuan, bebas, dan bisa menjadi milik siapapun yang menemukannya.¹³ Bangsa Eropa secara hukum merasa memiliki tanah sehingga seringkali terjadi bentrokan antara mereka dengan penduduk asli. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Inggris memberlakukan kebijakan *separation and segregation* (1860-1940) kepada para penduduk asli. Mereka dipindahkan dari tanah tradisional mereka ke wilayah-wilayah reservasi yang sudah ditentukan pemerintah. Kebijakan ini membuat bangsa kulit putih di Australia semakin tidak menyadari tentang keberadaan mereka. Namun, karena keadaan reservasi yang sangat terbengkalai, banyak penduduk asli yang kabur dan pergi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan.¹⁴

Setelah terbentuk menjadi Federasi di tahun 1901, Australia setuju bahwa warna kulit merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan mereka.¹⁵ Walaupun para penjelajah, *the first settlers* (pemukim pertama), dan sejarawan awal di Australia seringkali menuliskan pengalaman mereka bertemu dengan orang-orang Aboriginal, setelah tahun 1850, hal tersebut semakin berkurang. Pada tahun 1950, tercatat tidak satupun penulis di Australia yang menyebutkan eksistensi Aboriginal. Di tahun 1968, W. E. H Stanner, sejarawan Australia, menyebut periode tersebut sebagai periode “*The Great Silence*”¹⁶.

Kasus Eddie Mabo yang akan menjadi fokus dari penelitian skripsi ini, dimulai pada tahun 1982 ketika lima orang penduduk Kepulauan Selat Torres, termasuk Edward Koiki Mabo, menuntut Negara Bagian Queensland ke *High Court of Australia* atas hak tanah mereka di Pulau Murray (Mer) di Kepulauan

¹³ Alan Atkinson, *The Europeans in Australia Vol. 1*, (Melbourne: Oxford University Press, 1998), hlm. 90.

¹⁴ McConnochie; Hollinsworth; Pettman, *op.cit.*, hlm. 53

¹⁵ Franklin, *op.cit.*, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

Selat Torres, pada tanggal 20 Mei 1981.¹⁷ Kasus tersebut kemudian dinamakan *Eddie Mabo and Others v. the State of Queensland and the Commonwealth of Australia* dan lebih dikenal dengan nama *Mabo v. Queensland (No. 1)*. Meskipun kasus Mabo bukanlah yang pertama kali mengingat sudah banyak tuntutan yang diajukan orang-orang Aborigin ke pengadilan terkait isu *land rights* sebelumnya, Contohnya adalah tuntutan yang diajukan orang-orang Yirrkala di Arnhem Land pada tahun 1963.¹⁸ Pada Mei 1967, orang-orang Gurindji mengirimkan petisi kepada Gubernur Jenderal untuk meminta hak kontrak atau sewa (*leasing*) atas tanah mereka di Northern Territory. Tetapi usul tersebut ditolak oleh Gubernur Jenderal. Kontrak atas tanah oleh orang Aborigin itu akan diizinkan apabila mereka ingin mengontrak *Crown Land*, tanah milik Kerajaan Inggris, yang kosong.¹⁹ Tuntutan tersebut kemudian mereka bawa ke *Northern Territory Supreme Court* pada tahun 1968 untuk melawan pemerintahan Persemakmuran. Namun, mereka kalah di pengadilan setelah hakim mengatakan mereka hanya terikat secara religius dengan tanah tersebut, bukan secara ekonomi sehingga tuntutan mereka tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kasus Mabo sendiri hampir kalah di pengadilan ketika Pemerintah Queensland menjawab tuntutan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985). Namun kasus tersebut berlanjut di *High Court of Australia* dengan nama baru yaitu, *Mabo v. State of Queensland*, pada 8 Desember 1988, atau yang lebih dikenal dengan nama *Mabo (No. 2)*.²⁰ Pada tahun 1992, *High Court of Australia* mengambil keputusan bahwa *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985) bertentangan dengan *Racial Discrimination Act* (1975), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal. Dengan

¹⁷ Nonie Sharp, *No Ordinary Judgement: Mabo, the Murray Islanders' Land Case*, (Canberra: Aboriginal Studies Press, 1996), hlm. xi.

¹⁸ Gerakan menuntut tanah (*land rights*) oleh penduduk asli, khususnya orang Aborigin ini mulai gencar dilakukan selepas terjadinya Perang Dunia II. Selain karena adanya kontinuitas kontak yang terjalin antara bangsa kulit putih dengan penduduk asli selama perang, gerakan tersebut didukung pula oleh terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga inspirasi dari Amerika Serikat (contohnya gerakan yang dipimpin Martin Luther King Jr.) serta dukungan dari negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka. Hal-hal tersebut merupakan landasan politis yang ikut melatarbelakangi gerakan *land rights* di Australia dalam Les Malezer, "Mabo and the Framework of Dominance",

<http://nationalcongress.com.au/wp-content/uploads/2012/06/20120603Mabo20speech.pdf>, diakses pada 20 April 2014, pukul 20.26 WIB.

¹⁹ Franklin, *op.cit.*, hlm. 191.

²⁰ Sharp, *op.cit.*, hlm. xii.

demikian, *Mabo* (No. 2) dimenangkan oleh Eddie Mabo. Dimenangkannya tuntutan tersebut langsung meruntuhkan konsep *terra nullius* yang telah eksis selama 200 tahun dan membuktikan bahwa orang-orang Aboriginal dan Penduduk Kepulauan Selat Torres memang merupakan penghuni sah dari benua Australia, dan juga merupakan titik awal dari kisah lain bagi perjuangan orang-orang Aboriginal, yaitu dengan dikeluarkannya *Native Title Act* (1993) yang kurang lebih mengorganisir hak-hak tradisional dari para penduduk asli.

Penulis memilih topik ini karena belum ada sejarawan Indonesia yang membahas tentang kasus Mabo dan kaitannya dengan kebijakan Australia terhadap penduduk asli. Adapun demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan sebutan penduduk asli atau *indigenous people* karena sebutan tersebut mengacu kepada orang-orang Aboriginal dan juga penduduk Kepulauan Selat Torres. Eddie Mabo sendiri merupakan penduduk Kepulauan Selat Torres yang kemudian pergi ke *mainland* (dataran utama) Australia untuk mencari pekerjaan, seperti banyak penduduk Kepulauan Selat Torres lainnya. Perjuangan *land rights* di Kepulauan Selat Torres kurang lebih serupa dengan perjuangan orang-orang Aboriginal di *mainland* karena mereka mencari keadilan dari perusahaan-perusahaan besar yang mematikan usaha mereka sebagai nelayan-nelayan kecil.

1.2 Perumusan Masalah

Pada penulisan skripsi ini, masalah yang hendak dikaji adalah bagaimana kasus Eddie Mabo dapat mengubah pandangan Australia secara umum terhadap hak tanah milik orang Aboriginal. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas tentang konsep *terra nullius* dan bagaimana konsep tersebut akhirnya bisa diruntuhkan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep *terra nullius* yang memicu konflik antara bangsa Eropa dan penduduk asli Australia bisa tumbuh dan berkembang di benua Australia?
2. Bagaimana upaya Eddie Mabo dan penuntut Meriam lainnya dalam memperjuangkan hak tanah mereka di Pulau Murray?

3. Apa arti penting dari adanya kasus Mabo bagi Australia khususnya bagi masyarakat Aboriginal?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini membahas mengenai kasus Eddie Mabo yang melakukan *land claim* (klaim tanah) di Pulau Murray, Kepulauan Selat Torres, Queensland. Adapun ruang lingkup penelitian ini dimulai pada tahun 1982, karena pada tahun tersebut Eddie Mabo membawa gugatannya mengenai kepemilikan tanah ke *Supreme Court of Queensland* (pengadilan tertinggi di negara bagian Queensland). Sedangkan batas akhir dari penelitian adalah tahun 1993. Walaupun kasus Eddie Mabo berakhir dengan putusan di pengadilan pada tahun 1992 yang kemudian memenangkan gugatannya, tahun 1993 juga merupakan tahun yang sangat penting bagi kasus ini. Pada tahun 1993, menjawab putusan pengadilan terhadap kasus Mabo, Pemerintah mengeluarkan *Native Title Act* (1993) yang ditujukan untuk melindungi hak-hak orang asli (orang-orang Aboriginal dan penduduk Kepulauan Selat Torres).

Untuk ruang lingkup spasial, kasus ini terjadi di Australia khususnya Pulau Murray (Mer) di Kepulauan Selat Torres, negara bagian Queensland. Sehingga pembahasan skripsi ini akan terfokus pada wilayah Australia saja. Pulau Murray tersebut merupakan tempat tinggal Eddie Mabo semasa kecil. Pulau itulah yang nantinya diperjuangkannya di *Supreme Court of Queensland* dan *High Court of Australia*.

Sedangkan untuk membahas ruang lingkup permasalahan mengenai *land rights*, kasus Eddie Mabo menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Masalah *Aboriginal Land Rights* dalam penelitian ini, dicerutukan fokus penelitiannya menjadi *Meriam Traditional Land Claim*. Kata Meriam sendiri merupakan sebutan untuk penduduk asli yang tinggal di Pulau Murray. Kemudian dimenangkannya kasus Eddie Mabo di *High Court of Australia* membawa dampak yang sangat besar bagi kepercayaan diri orang Aboriginal saat itu dan juga pada kebijakan pemerintah mengenai orang-orang asli. Dari sekian banyak upaya dan gugatan yang dibawa orang-orang Aboriginal ke pengadilan, kasus Eddie Mabo merupakan kasus yang pertama kali dimenangkan. Sehingga itulah yang menjadi

alasan kasus tersebut menjadi topik pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini.

1.4 Tinjauan Pustaka

Buku-buku yang dijadikan acuan antara lain buku *Edward Koiki Mabo: His Life and Struggle for Land Rights* (1996) karya Noel Loos. Buku ini merupakan biografi dari Edward Koiki Mabo, pejuang *land rights* yang bisa memenangkan kasus tuntutan tanahnya di pengadilan untuk pertama kalinya. Biografi ini ditulis oleh Noel Loos, seorang profesor sejarah di James Cook University, Townsville. Ia juga merupakan kolega dari Eddie Mabo selama ia bekerja di James Cook University. Eddie Mabo tidak sempat menyelesaikan tulisan pribadinya karena ia divonis dengan penyakit kanker dan meninggal pada tahun 1992, lima bulan sebelum *High Court of Australia* memberikan putusan atas kasusnya. Buku ini menjelaskan latar belakang Eddie Mabo sebagai anak Meriam yang tinggal di Pulau Murray, Kepulauan Selat Torres, Queensland. Buku ini ditulis berdasarkan ingatan Eddie Mabo mengenai masa hidupnya yang ia rekam dan kemudian rekaman itu diberikan kepada Noel Loos untuk dijadikan suatu tulisan utuh.

Selain itu, penulis menggunakan karya Nonie Sharp yang berjudul *No Ordinary Judgement: Mabo, the Murray Islanders' Land Case* (1996) membahas kasus Mabo dengan menggunakan pendekatan antropologi dan juga pengaruh kasus tersebut terhadap kasus-kasus *land rights* lainnya di Australia. Secara legal penduduk Pulau Murray, orang-orang Meriam, memiliki hak terhadap tanah dan berada di bawah proteksi hukum yang kuat. Putusan Mabo itu meruntuhkan mitos '*terra nullius*' yang mengatakan bahwa sebelum kedatangan bangsa kulit putih, Australia merupakan benua tidak berpenghuni. Putusan itu juga membawa pemerintah mengeluarkan kebijakan lain yang tujuannya menjamin kesejahteraan penduduk asli Australia, yaitu dengan dikeluarkannya *Native Title Act* (1993). Buku ini menghimpun perjuangan Eddie Mabo dan penuntut Meriam lainnya selama kasus hukum mereka sedang diproses. Jika Sharp meneliti kasus Mabo menggunakan pendekatan antropologi, penulis mencoba meneliti kasus hukum ini dengan menggunakan pendekatan dan metode sejarah.

Penulis juga menggunakan karya H. C. Coombs *Aboriginal Autonomy: Issues and Strategies* (1994). Buku ini membahas mengenai gaya hidup orang Aborigin, hukum kepemilikan tanah mereka secara tradisional, dan juga arti penting dari kemenangan kasus Mabo bagi fondasi untuk otonomi orang-orang Aborigin di Australia. Untuk meneliti mengenai *Aboriginal Land Rights* lebih dalam, penulis menggunakan buku *Race and Racism in Australia* (1989) karya McConnochie, Hollinsworth, dan Pettman. Sedangkan untuk memahami penduduk Kepulauan Selat Torres yang merupakan tempat asal Eddie Mabo, penulis menggunakan buku karya Jeremy Beckett *Torres Strait Islanders: Custom and Colonialism* (1987). Buku lain yang sangat mendukung penulisan skripsi ini juga adalah karya dari Barbara A. West yang berjudul *A Brief History of Australia* (2010). Karya West ini menjelaskan sejarah Australia sejak sebelum hingga setelah menjadi Federasi. Buku ini merangkum sejarah Australia sejak masa sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Australia hingga Australia dalam masa kini. Dijelaskan bagaimana orang Aborigin hidup dengan sistem adat dan sistem budayanya sendiri sebelum masuknya penetrasi dari orang-orang kulit putih. Pembahasan paling penting terkait tema penelitian penulis adalah mengenai motivasi Inggris untuk menemukan koloni baru yang akhirnya mengirim James Cook ke Australia pada tahun 1770.

Berbeda dengan karya-karya tersebut, skripsi ini akan lebih menekankan fokus kepada *Aboriginal Land Rights* dan juga perguliran dari kasus Eddie Mabo di pengadilan. Judul yang dipilih penulis untuk penelitian ini pun lebih spesifik yaitu mengenai *Meriam Traditional Land Claim*. Nama Meriam diambil dari sebutan bagi penduduk Pulau Murray di Selat Torres yang merupakan tempat tinggal Eddie Mabo. Selain itu, penulis juga ingin menyoroti bagaimana perjuangan Mabo tersebut dapat mengguncang Pemerintahan Queensland yang selama ini dikenal sangat resistan terhadap hak-hak Aborigin, dan juga mengenai pandangan dunia luar terhadap kasus ini. Berbeda dengan buku karya Lisa Strelein yang membahas kasus Mabo ini dengan pendekatan dari bidang hukum, selain menggunakan pendekatan ilmu sejarah penulis ingin meneliti pandangan publik atas kasus tersebut yang saya himpun dari berbagai surat kabar Australia seperti *The Australian*, *Sydney Morning Herald*, *The Age* dan *Newcastle Herald*.

Sepuluh tahun perjalanan kasus Mabo di Pengadilan dapat menggambarkan dinamika kebijakan Australia baik dari Pemerintah Federal maupun Pemerintah Negara Bagian Queensland terhadap *indigenous people of Australia* (penduduk asli Australia).

1.5 Tujuan Penelitian

Kasus Mabo ini sangatlah menarik karena ini merupakan kasus tuntutan *land rights* pertama yang berhasil menang di pengadilan Australia. Walaupun banyak literatur Australia yang sudah membahas mengenai kasus ini, penulis ingin menghimpunnya menjadi suatu kajian baru dari sudut pandang seorang sejarawan Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjuangan Eddie Mabo dan pengaruh kasus hukumnya pada kebijakan Australia, khususnya Queensland, terhadap penduduk asli. Yang kedua, skripsi ini ditulis dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai konsep kepemilikan tanah yang dipahami oleh orang-orang Aboriginal dan juga penduduk Kepulauan Selat Torres serta bagaimana pandangan tersebut dapat berbenturan dengan konsep baru yang dibawa oleh orang-orang Eropa.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendalami tentang kebijakan dan sikap Pemerintah Negara Bagian Queensland terhadap penduduk asli. Penulis ingin mengetahui mengapa Queensland sangat berbeda dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Federal Australia terkait dengan *Aboriginal Land Rights*, dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya. Lalu pengaruh kemenangan Eddie Mabo di *High Court* yang menjadi tonggak dari dibentuknya *Native Title Act* (1993) yang secara legal melindungi hak-hak tradisional penduduk asli. Penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh disahkannya *Native Title Act* (1993) oleh Pemerintah Australia terhadap perjuangan land rights dari para penduduk asli.

Terakhir, sebagai seorang sejarawan Indonesia, penulis ingin Indonesia bisa bersama-sama belajar mengenai hak penduduk asli terhadap tanah di Australia. Seperti Australia, Indonesia juga memiliki penduduk asli yang memiliki akses terhadap tanah mereka. Namun sejak perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Agraria di Indonesia pada masa Orde Baru, tanah adat (*custom land*)

penduduk asli itu diambil alih oleh Pemerintah dan dijual kepada perusahaan-perusahaan asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri tidak ada pengadilan yang khusus menampung dan membantu penduduk asli untuk mengajukan tuntutan. Tercatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa dari 5.000 aduan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia, 1.300 di antaranya adalah mengenai masalah agraria.²¹

Seperti orang-orang Aborigin Australia, penduduk asli Indonesia pun seringkali bermasalah dengan perusahaan-perusahaan yang menempati tanah adat mereka. Contohnya pada 13 Oktober 2014, sekelompok suku Dayak Paser di Balikpapan, Kalimantan Timur, menyegel lahan PT Wilmar Nabati, sebuah perusahaan pengolah minyak kelapa sawit.²² Hal itu mereka lakukan karena PT Wilmar Nabati menduduki 42 hektar tanah adat suku Dayak Paser. Namun mereka menolak untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pengadilan karena ketiadaan surat-surat dan sertifikat tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut secara legal adalah milik mereka. Adapun tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan pembelajaran agar Indonesia bisa mulai meletakan basis yang sama bagi tuntutan tanah oleh penduduk asli seperti yang terjadi di Australia. Di Australia, penduduk asli tidak perlu memiliki surat-surat legal untuk mengajukan tuntutan mereka ke pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan. Menurut Louis Gottschalk, tahapan-tahapan ini adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah tahapan pertama di mana seorang sejarawan harus mengumpulkan data-data dan sumber sejarah terkait dengan fokus yang akan diteliti. Dalam tahap ini, penulis menghimpun data-data berupa buku-buku, jurnal, artikel surat kabar, rekaman wawancara, dan juga arsip-arsip Australia yang memiliki kaitan dengan kasus Eddie Mabo.

²¹ Singgih Soares, "Komnas Akan Berikan Solusi Masalah Lahan ke Jokowi-JK", *Tempo*, 1 Oktober 2014.

²² S. G. Wibisono, "Dewan Adat Dayak Segel Area Kantor Wilmar Nabati", *Tempo*, (13 Oktober 2014).

Untuk tahapan kedua yaitu kritik, terdapat kritik internal dan kritik eksternal. Pertama-tama penulis harus melakukan kritik eksternal yaitu kritik terhadap fisik dan keabsahan sumber dan data yang telah diperoleh melalui tahap heuristik. Sedangkan untuk kritik internal, penulis berusaha memilah-milah data dan sumber tersebut dengan kadar relevansinya terhadap tema penelitian. Penulis banyak sekali menemukan sumber dari internet sehingga dalam tahap ini, penulis melakukan kritik terhadap tulisan tersebut dari segi keabsahan dan relevansinya. Banyak sekali website yang membahas mengenai Mabo, namun penulis lebih memilih untuk mendapatkan data dari jurnal-jurnal *online* seperti JSTOR dan AustLII.

Setelah melakukan kritik, penulis melakukan tahap ketiga yaitu interpretasi. Penulis menilai kembali data-data dan sumber sejarah dengan suatu sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menginterpretasi kembali kasus Mabo sehingga penulis dapat menemukan dan menyimpulkan dampak kasus tersebut terhadap Australia dan kebijakannya terhadap penduduk asli terkait isu *land rights*.

Kemudian setelah selesai melalui seluruh tahapan tersebut, terakhir, penulis harus menyusun atau merekonstruksi peristiwa sejarah tersebut dalam suatu tulisan sejarah sehingga dapat menjadi suatu kajian yang utuh. Penulis secara deskriptif merekonstruksi kembali kebijakan terkait *Aboriginal Land Rights* di Australia dan juga perjalanan kasus Eddie Mabo dari tahun 1982 hingga tahun 1993 sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang akademis dan sistematis.

1.7 Sumber Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan mengacu kepada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer bisa didapatkan *online* oleh penulis dari situs resmi pemerintah Australia. Jurnal, artikel, serta rekaman wawancara Eddie Mabo bisa diakses melalui *Trove*, sebuah mesin pencari, milik *National Library of Australia*. Untuk memperkaya pemahaman penulis mengenai topik penelitian ini, penulis juga mengunduh berbagai rekaman diskusi dari berbagai perkuliahan di universitas-universitas di Australia, khususnya Queensland, yang membahas

mengenai kasus Eddie Mabo. Melalui www.trove.nla.gov.au, penulis juga dapat mengakses speta yang dibuat sendiri oleh Eddie Mabo yang menggambarkan batas-batas tanah yang ia tuntut ke *High Court of Australia*.

Selain itu, penulis dapat mengakses arsip Australia dari *National Archives of Australia* (NAA), melalui www.naa.gov.au dan juga jurnal AustLII melalui www.austlii.edu.au. Penulis juga menggunakan surat-surat kabar di Australia untuk memperkuat data sehingga bisa melengkapi penelitian ini. *Sydney Morning Herald*, sebuah surat kabar di Australia, memiliki sebuah mesin pencari artikel-artikel lama, dalam laman www.smh.com.au. Mesin pencari milik *Sydney Morning Herald* ini juga bisa mengakses berita-berita terkait dari surat kabar lain seperti *The Australian*, *The Age*, dan *Newcastle Herald*. Penulis menemukan kurang lebih 50 artikel mengenai pro dan kontra kasus Mabo dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Artikel-artikel tersebut digunakan penulis untuk mengetahui dampak kasus tersebut terhadap kebijakan Australia terhadap hak tanah dari penduduk asli serta tanggapan penduduk Australia dan dunia terhadap adanya kasus tersebut. Sedangkan untuk sumber sekunder, penulis menggunakan buku *Edward Koiki Mabo: His Life and Struggle for Land Rights* (1996) karya Noel Loos, *Compromised Jurisprudence: Native Title Cases Since Mabo* (2009) karya Lisa Strelein, *Aboriginal Autonomy: Issues and Strategies* (1994), karya H. C. Coombs, dan *No Ordinary Judgement: Mabo, the Murray Islanders' Land Case* (1996) karya Nonie Sharp.

Beberapa buku di atas bisa didapatkan di Perpustakaan Universitas Indonesia namun beberapa di antaranya hanya bisa diunduh dari situs *National Library of Australia*. Tetapi, beberapa buku hanya bisa didapatkan di Australia saja sehingga penulis meminta bantuan dari teman dan kolega yang berada di Australia serta dosen Ilmu Sejarah UI; Bapak Kresno Brahmantyo, S.S., M.Hum., yang sedang menempuh studi di Australia. Buku-buku sumber ini diperkuat juga dengan adanya jurnal-jurnal ilmiah mengenai kasus Mabo, yang bisa diakses secara *online* melalui JSTOR www.jstor.org dan *Australasian Legal Information Institute* (AustLII) www.austlii.edu.au. Dari jurnal AustLII, penulis berhasil mengakses sumber primer yang berisi laporan resmi jalannya sidang pengambilan keputusan mengenai *Mabo (No. 1)* dan *Mabo (No. 2)*, pada tanggal 3 Juni 1992,

yang diterbitkan secara resmi oleh *High Court of Australia*. Diharapkan dengan beragamnya sumber yang ditemukan penulis dapat memperkaya penulisan skripsi ini sehingga tulisan tersebut dapat berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada, terutama dari sudut pandang seorang sejarawan Indonesia yang belum pernah ada sebelumnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam lima bab untuk mengelompokkan penjabaran mengenai hal-hal yang akan dibahas. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai topik yang akan dibahas yaitu tentang *Meriam Traditional Land Claims: Native Title Act* di Australia (1982-1993).

Untuk bab dua, penulis menjabarkan tentang sejarah dari *land rights* atau gerakan yang diperjuangkan oleh para penduduk asli baik itu orang-orang aborigin maupun penduduk Kepulauan Selat Torres, untuk menuntut hak mereka atas tanah kepada Pemerintah Australia dan juga dinamika kebijakan pemerintah Australia terhadap mereka. Bagaimana orang-orang aborigin secara fisik dan gaya hidup berbeda dengan penduduk Kepulauan Selat Torres sehingga perlakuan Pemerintah kepada keduanya pun sedikit berbeda. Penerapan kebijakan tersebut di negara bagian Queensland pun akan disorot lebih tajam karena lokasi Kepulauan Selat Torres yang merupakan bagian dari Queensland. Kemudian proses peradilan dari kasus Eddie Mabo secara menyeluruh akan menjadi fokus dari bab tiga skripsi ini. Dari awal tuntutan tersebut diajukan hingga bagaimana penyelesaian kasus tersebut di *High Court of Australia* pada tahun 1992. Sedangkan dalam bab empat, arti penting kasus tersebut terhadap kebijakan Australia kepada penduduk asli dan bagaimana kemenangan Mabo di pengadilan menjadi dasar yang fundamental bagi *Native Title Act* (1993). Bab ini juga memfokuskan pembahasan pada arti penting kasus Mabo terhadap runtuhnya konsep *terra nullius* di Australia. Terakhir, bab lima berisikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan jawaban-jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam perumusan masalah.



BAB 2

PENDUDUK ASLI DAN KEBIJAKAN TANAH DI AUSTRALIA

2.1. Penduduk Asli Australia

Sebelum kedatangan Inggris, seorang berkebangsaan Belanda, Willem Janszoon telah lebih dulu sampai ke Australia. Namun, ia meragukan bahwa tanah tersebut kaya dan dapat memenuhi permintaan komoditi dagang bagi *Dutch East India Company*. Abel Tasman dan para penjelajah lain juga menyimpulkan bahwa Australia tidak cocok untuk dijadikan suatu koloni yang kekayaan alamnya bisa dieksplorasi.²³ Pendapat tersebut didukung oleh William Dampier, seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang tiba di Pesisir Barat Australia pada tahun 1688.²⁴ Dalam catatannya, ia menuliskan:

“The inhabitants of this country are the miserablest people in the world. . . and setting aside their human shape, they differ but little from brutes. Their eyelids are always half-closed to keep the flies out of their eyes . . . They have great bottle noses, pretty full lips and wide mouths . . . Their hair is black, short and curled like that of the Negroes; and not long and lank like the common Indians. The colour of their skins, both of their faces and the rest of their body, is coal black like that of the Negroes of Guinea. . . I know not but they do live in companies, 23 or 30 women and children together . . . I did not perceive that they did worship anything . . .”²⁵

(“Penghuni negara ini merupakan sekumpulan orang yang paling menyedihkan di dunia . . . meskipun memiliki bentuk menyerupai manusia, mereka hanya sedikit berbeda dari hewan. Kelopak mata mereka selalu setengah tertutup untuk menjaga agar lalat tidak masuk ke dalamnya . . . Mereka memiliki hidung bundar, bibir yang penuh, dan mulut yang lebar . . . Rambut mereka hitam, pendek, dan keriting seperti orang-orang Negro; tidak panjang dan lurus seperti orang-orang Indian. Warna kulit mereka, baik wajah dan seluruh tubuhnya, berwarna hitam arang dan mereka terlihat seperti orang Negro dari Guinea . . . Saya tahu bahwa mereka hidup dalam kelompok, 23 hingga 30 orang terdiri dari anak-anak dan dewasa . . . Saya merasa mereka tidak menyembah apapun . . .”)

Catatan Dampier tersebut menunjukkan pendapat awal bangsa Eropa mengenai orang-orang Aborigin Australia. Dampier mengkritik penampilan fisik serta cara hidup mereka yang sangat bertolak belakang dengan budaya Eropa. Berbeda dengan Dampier, James Cook dalam catatannya terkesan sangat kagum dan tertarik dengan bangsa kulit hitam yang menyambutnya di tanah Australia. Ia menulis, “. . . Mereka terlihat tidak memiliki nilai atas benda-benda yang kita

²³ Franklin, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁴ Moorehead, *op.cit.*, hlm. 121.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 121-123.

berikan kepada mereka, mereka juga tidak mau berpisah dengan hal-hal yang mereka miliki untuk bisa ditukar dengan kita, saya berargumentasi bahwa mereka merasa alam telah memberikan apapun yang mereka butuhkan . . . ”. Banyak pendapat berargumen bahwa Cook telah terinspirasi oleh pemikiran Rousseau mengenai konsep *Noble Savage*²⁶ atau makhluk mulia, yang membuatnya lebih mengapresiasi penampilan fisik dan cara hidup orang-orang primitif.²⁷ Orang Eropa saat itu cenderung menyalahartikan gaya hidup Aborigin ini sebagai suatu masalah kemiskinan. Tetapi yang tidak mereka pahami di awal, bangsa Aborigin ini tidak miskin kebudayaan. Mereka menuangkan kekayaan kebudayaan tersebut dalam *Dreamtime*, suatu budaya sejarah lisan yang menurunkan mitos, ritual, puisi, dan pengetahuan melalui hubungan ayah-anak secara turun-temurun.²⁸

Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Australia, orang Aborigin diidentifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu *urban* dan *rural*. Mereka yang *urban* adalah orang-orang Aborigin yang tinggal di kota sehingga kontak dengan bangsa lain banyak terjadi, biasanya mereka tinggal untuk menjadi buruh. Sedangkan orang-orang Aborigin *rural* adalah mereka yang masih tinggal jauh dari kota-kota besar. Kontak antara Aborigin dengan bangsa kulit putih dimulai ketika Perang Dunia II terjadi.²⁹ Bangsa Barat kekurangan tenaga kerja karena para lelaki pergi ke medan perang sehingga mau tidak mau mereka mempekerjakan orang-orang Aborigin. Sejak Juni 1939 sampai dengan Juni 1944, jumlah pekerja Aborigin naik dari 3.198 menjadi 5.625 orang.³⁰ Para pekerja Aborigin ini juga semakin hari semakin paham dengan kebijakan imigrasi

²⁶ A word used in the past to refer in a positive way to a person or people who did not live in an advanced human society. “Noble Savage”, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition*, 8th ed, CD-ROM, (Oxford: Oxford University Press, 2010). Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam dunia literatur melalui karyanya yang berjudul *Émile, ou, De l’education*, 4 vol. (1762) dalam “Noble Savage”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/416988/noble-savage>, diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.12 WIB.

²⁷ Franklin, *op.cit.*, hlm. 3.

²⁸ *Dreamtime* dipercaya oleh orang Aborigin sebagai saat di mana leluhur mereka pindah dan menempati tanah yang mereka tempati sekarang. Kisah tentang bagaimana awal nenek moyang mereka memulai kehiduan dan mengolah tanah diwariskan secara turun temurun melalui sejarah lisan seperti lagu, tarian, dan lukisan, dari generasi ke generasi dalam “The Dreaming”, <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/dreaming>, diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.15 WIB.

²⁹ Les Malezer, “Mabo and The Framework of Dominance”, <http://nationalcongress.com.au/wp-content/uploads/2012/06/20120603Mabo20speech.pdf>, diakses pada 20 April 2014, pukul 20.26 WIB.

³⁰ Franklin, *op.cit.*, hlm. 128.

Australia. Mereka melihat bangsa-bangsa lain selain Eropa yang datang ke Australia sebagai bangsa yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, namun mengapa mereka terkesan lebih dihargai dan mudah mendapatkan pekerjaan. Akhirnya bangsa Aboriginal semakin paham kalau mereka diperlakukan sebagai suatu kelompok yang terpisahkan. Hal ini membuat mereka mulai membentuk komunitas-komunitas politik Aboriginal seperti *National Tribal Council, the Black Panther Party* serta *the Aborigines Progress Association and the Council for Aboriginal Women*.³¹

2.1.1. Orang Aboriginal dan Penduduk Kepulauan Selat Torres

Asal usul Aboriginal menurut J. B. Birdsell, adalah kelompok ras Tasmanoid, berambut tebal seperti wol, berkulit gelap dan berasal dari Asia Tenggara. Kedatangan penduduk pertama ke benua Australia tersebut diikuti oleh ras Murrayians yang memiliki warna kulit sedikit lebih terang dibandingkan mereka karena masih memiliki relasi dengan suku Ainu di Jepang. Menurut situs arkeologi, penduduk Aboriginal telah tinggal di Australia selama kurang lebih 30.000 tahun. Selama masa tersebut, mereka memiliki kebudayaan dan cara hidup tersendiri. Mereka percaya terhadap *after-life*, dunia akhirat, dan oleh karenanya melakukan ritual-ritual religius. Para peneliti percaya bahwa orang-orang Aboriginal ini merupakan manusia-manusia pertama yang melakukan ritual mengkremasi mayat di dunia. Namun, mereka tidak memiliki sumber tertulis mengenai gaya hidup tersebut.

Penemuan Bob Fox di Filipina akan peralatan prasejarah dan juga tulang-belulang, memiliki kemiripan dengan penemuan arkeologis di Australia, sehingga antropolog McIntosh percaya bahwa orang-orang Aboriginal ini memulai perjalanan mereka ke benua Australia dari Eurasia sekitar 50.000 tahun yang lalu.³² Kedatangan orang-orang Aboriginal ke benua Australia sendiri hingga saat

³¹ Franklin, *op.cit.*, hlm. 202-203.

³² Menurut antropolog Australia Hebert Basedow, orang-orang Aboriginal berasal dari ras kaukasia yang puluhan ribu tahun lalu bermigrasi di saat benua Australia masih bersatu dengan Eurasia. Hal ini dibuktikannya dengan menguji fosil manusia purba Eropa dengan fosil orang-orang Aboriginal. Penelitian tersebut menunjukkan banyak sekali kemiripan di antara keduanya. Dikatakan orang-orang Aboriginal ini tadinya berkulit putih dan semakin jauh mereka pergi ke tempat yang jauh lebih panas dari Eropa, pigmen kulit mereka terus bertambah hingga mereka menjadi hitam (tidak berkulit cokelat seperti orang-orang Polynesia) dalam Moorehead, *op.cit.*, hlm. 143.

ini masih diperdebatkan di antara para ilmuwan. Saat itu ketinggian air laut sangatlah rendah karena masih banyak air yang membeku di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Hal tersebut memudahkan perjalanan nenek moyang Aboriginal dari Asia ke Australia. Tetapi antropolog Alan Thorne memiliki teori lain. Ia berargumen bahwa leluhur Aboriginal merupakan *homo erectus* yang berasal dari Jawa.³³

Keanggotaan kelompok dan suku dalam kehidupan orang-orang Aboriginal ditentukan secara patriarki dari garis lelaki. Para lelaki lahir dengan keanggotaan tersebut, berbeda dengan wanita yang menjadi anggota suatu suku atau kelompok melalui pernikahan dengan suaminya. Walaupun orang Aboriginal ini nomaden, mereka tetap berkeliaran dan berburu di wilayah yang secara adat merupakan ‘negaranya’. Tiap suku memiliki wilayahnya sendiri. Orang Aboriginal tidak memelihara ternak ataupun bercocok tanam, mereka bertahan hidup dengan berburu dan meramu (*hunter-gatherer*) makanan dari alam. Orang Aboriginal memang bepergian tanpa penutup tubuh apapun, tetapi di wilayah Australia yang memiliki cuaca ekstrim seperti di selatan, orang-orang Aboriginal biasa mengenakan kulit hewan yang bisa menghangatkan mereka di musim dingin.³⁴

Menurut sensus penduduk, pada tahun 1989, ada sekitar 39.500 orang Aboriginal dan 7.300 penduduk Kepulauan Selat Torres di Negara Bagian Queensland.³⁵ Sekitar 11.000 orang Aboriginal hidup di gereja dan wilayah-wilayah reservasi yang disediakan oleh Pemerintah. *Queensland Government's Act* (1965) terkait masalah Aboriginal dan Penduduk Kepulauan Selat Torres kemudian dibentuk untuk menggantikan *Aborigines Preservation and Protection Act* serta *Torres Strait Islanders Act*. Kebijakan tersebut dijalankan dan dikontrol oleh *Director of Native Affairs* (DNA) yang kemudian mengatur segala aspek hukum para penduduk asli.³⁶ Menghadapi berbagai kebijakan Queensland terhadap penduduk asli tersebut, orang-orang Aboriginal sedikit lebih tidak beruntung dibandingkan dengan penduduk Kepulauan Selat Torres.

³³ Franklin, *op.cit.*, hlm. 9.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ Faith Bandler, *Turning the Tide: A Personal History of the Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres Strait Islanders*, (Canberra: Aboriginal Studies Press, 1989), hlm. 66.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

Kehidupan orang *Aborigin* yang tinggal di *mainland* Australia agaklah berbeda dengan kehidupan para penduduk Kepulauan Selat Torres yang berada di sebelah utara Queensland. Tidak seperti *Aborigin*, kebudayaan dan gaya hidup mereka cukup terjaga hingga kini. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan Pemerintah yang ingin mengeksplorasi kekayaan alam, terutama hasil laut, dari Kepulauan Selat Torres.³⁷ Jika orang-orang *Aborigin* akhirnya dimasukkan ke dalam wilayah-wilayah reservasi dan memiliki keterbatasan kontak dengan orang kulit putih, penduduk Kepulauan Selat Torres memiliki kontak yang cukup sering dengan orang-orang asing.³⁸ Pemerintah Kolonial cenderung tidak keberatan dan membiarkan para penduduk di Kepulauan Selat Torres untuk melanjutkan gaya hidup mereka. Adapun beberapa hal tentu disesuaikan dengan budaya Inggris. Pemerintah membutuhkan tenaga serta pengetahuan lokal mereka dalam menangkap teripang (*beche-de-mer*)³⁹ dan mengumpulkan kerang-kerang mutiara. Nantinya, mereka bekerja di kapal-kapal asing bersama orang-orang kulit putih, walaupun gaji mereka tetap berada jauh di bawah bangsa kulit putih (lihat Lampiran 3 dan Lampiran 4).

Lokasi Kepulauan Selat Torres sangat strategis, yaitu di antara orang-orang Melanesia dan orang-orang *Aborigin* Australia. Ini memberikan kekayaan kebudayaan dan juga percampuran genetis yang terlihat dalam fisik mereka yang berkulit sedikit lebih terang dibandingkan dengan orang *Aborigin* di *mainland* Australia.⁴⁰ Selat Torres sendiri ditemukan oleh bangsa Eropa pada tahun 1606, tetapi kontak dengan para penduduk lokal tidaklah banyak dan sangat singkat.

³⁷ Orang-orang Eropa mulai mengeksplorasi hasil laut, seperti mutiara, di Kepulauan Selat Torres dari tahun 1868. Terhitung pada tahun 1877, di Kepulauan Selat Torres sendiri telah berdiri 16 firma pencari mutiara yang semuanya berbasis di Thursday Island. Pada tahun 1910, Australia terutama Perairan Broome, dinyatakan sebagai pusat mutiara terbesar di dunia dalam “Australia’s Pearling Industry”, <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/australias-pealing-industry>, diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.31 WIB.

³⁸ Penduduk Kepulauan Selat Torres memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang Papua, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Papua merupakan penghasil kayu besar yang sejak dulu sudah melakukan perdagangan dengan para penduduk Kepulauan Selat Torres. Kayu-kayu inilah yang kemudian mereka buat menjadi kano kecil yang panjangnya bisa mencapai 20 meter. Kano inilah yang kemudian membantu para penduduk lokal tersebut untuk menjelajahi seratus pulau di Selat Torres. Pulau-pulau tersebut umumnya sangat kecil dan banyak yang tidak memiliki sumber air bersih.

³⁹ Jeremy Beckett, *Torres Strait Islanders: Custom and Colonialism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 11.

⁴⁰ John Singe, *The Torres Strait: People and History*, (Queensland: University of Queensland Press, 1989), hlm. 26.

Namun hal ini berubah pada tahun 1788, ketika Australia telah menjadi koloni Inggris dan Selat Torres menjadi suatu jalur laut yang umum dilewati oleh para pedagang. Kemudian pada tahun 1860-an, banyak pedagang dari Asia dan Pasifik yang datang untuk mengeksplorasi hasil laut Selat Torres. Hal tersebut membuat Pemerintah Koloni Queensland berpikir untuk memperluas wilayah yuridiksi mereka hingga ke Selat Torres, dekat Papua Nugini.

Pada tahun 1871, Pemerintah Australia mulai mengirimkan *London Missionary Society* (LMS) ke Kepulauan Selat Torres. Para misionaris tersebut bertugas untuk membuat para penduduk lokal memeluk agama Kristen juga untuk mendidik mereka terutama untuk berbahasa Inggris.⁴¹ Kapal misionaris LMS pertama kali mendarat di Pulau Darney pada tanggal 1 Juli 1871. Kehadiran LMS di pulau tersebut diwakili oleh dua pendeta bernama Murray dan McFarlene. Kedatangan *Reverend* (Pendeta) Murray dan McFarlene pada tahun 1872 ke Selat Torres adalah untuk melakukan misi keagamaan, menyebarkan agama Kristen bagi para penduduk asli yang saat itu masih menganut sistem kepercayaan tradisional.⁴²

Sebelum terbentuk sebagai sebuah koloni, Queensland merupakan bagian dari Koloni New South Wales. Namun pada tanggal 6 Juni 1859, Ratu Victoria mengeluarkan *Letters Patent* yang mengatur pembentukan Koloni Queensland dan terpisah dari Koloni New South Wales (lihat Lampiran 5). Di tahun 1870, melihat tidak adanya hukum Inggris yang kuat dan sah di Selat Torres, Gubernur Koloni Queensland, meminta izin untuk memperluas area Queensland yaitu sekitar 100 kilometer ke utara Cape York (lihat lampiran 15). Hal ini kemudian disetujui oleh Ratu Victoria melalui *Letters Patent* ‘kedua’ yang disahkan pada 10 Oktober 1878. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meratifikasi batas wilayah Koloni Queensland dalam *Letters Patent* yang dikeluarkan pada tahun 1859. Menyambut kebijakan tersebut, Gubernur Queensland akhirnya memproklamasikan aneksasi Kepulauan Selat Torres ke dalam wilayah koloninya pada tanggal 21 Juli 1879 dan mengaturnya ke dalam *Queensland Coast Island Act* (1879). Dasar pertimbangan lain yang mendasari kebijakan tersebut adalah kesadaran

⁴¹ Menurut penduduk asli, periode ini dinamakan dengan “the Coming of the Light”, kedatangan cahaya ke Kepulauan Selat Torres.

⁴² Singe, *op.cit.*, hlm. 60.

Pemerintah Koloni Queensland akan arti penting Selat Torres dan adanya ketakutan jika pesaing-pesaing Eropa mereka akan merebut Selat Torres (lihat Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8).⁴³

Ketika *White Australia Policy* (1901)⁴⁴ dikampanyekan besar-besaran, pulau-pulau di Selat Torres harus pula menerapkan kebijakan tersebut. Ketika para buruh Kanaka dideportasi ke wilayah asal mereka di Pasifik dan Aboriginal dimasukkan ke wilayah reservasi, tahun 1914 para penduduk Kepulauan Selat Torres secara terpaksa dijadikan tenaga kerja kembali. Hal ini dikarenakan industri maritim Australia mengalami penurunan dan bangsa kulit putih tidak bisa menutupi kekurangan tenaga kerja yang ditinggalkan oleh para buruh Kanaka. Para penduduk lokal di Selat Torres akhirnya dijadikan alternatif yang cepat dan murah. Hal ini yang akhirnya membuat para penduduk di Kepulauan Selat Torres bisa melakukan pembelaan atas diri mereka sendiri, berbeda dengan orang-orang Aboriginal yang gerak-geriknya terbatas di wilayah-wilayah reservasi.

2.1.2. Edward (Eddie) Koiki Mabo

Ketika kontak dengan bangsa Eropa terjadi, dengan Penduduk Kepulauan Selat Torres, Pulau Murray⁴⁵ yang merupakan salah satu pulau di selat tersebut, saat itu dihuni oleh kurang lebih 500-700 orang penduduk. Dalam bahasa penduduk lokal, Pulau Murray disebut dengan nama Pulau Mer, begitu pula dua pulau lainnya yaitu Dauar dan Waier, yang lokasinya sangat berdekatan. Menurut legenda, seorang dewa bernama Agud atau Bomai tinggal bersama keponakannya,

⁴³ Beckett, *op.cit.*, hlm. 45.

⁴⁴ *White Australia Policy* merupakan salah satu UU pertama yang dikeluarkan Pemerintah ketika Australia telah bertransformasi menjadi negara Persemakmuran. UU tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Australia adalah milik bangsa ras kulit putih terutama bangsa Eropa. Dengan adanya kebijakan tersebut, orang-orang Aboriginal secara resmi dikeluarkan dari sistem kependudukan Australia dan bukan merupakan warga negara Australia. Penduduk asli Australia ini seringkali dianggap sebagai *doomed race*, atau ras terkutuk dalam Ann McGrath, *Contested Ground: Australian Aborigines under the British Crown*, (St. Leonards: Allen & Unwin, 1995), hlm. 5.

⁴⁵ Adapun *Murray Islands* terdiri dari tiga pulau kecil (*isles*) yang bernama Mer, Dauar, dan Waier. Ketiga pulau tersebut dinamakan *Murray Islands* (Pulau Murray) oleh Kapten E. Edwards yang saat itu melakukan ekspedisi ke Selat Torres dengan kapal Pandora-nya. Letak pulau-pulau tersebut hanya berjarak satu kilometer dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Ketiga pulau kecil ini terletak di sebelah utara *Great Barrier Reef* (Karang Penghalang Raksasa) dan dikelilingi pula oleh banyak batu karang raksasa. Tiga pulau ini merupakan yang terkaya di Selat Torres, namun hanya Pulau Murray yang berpenghuni mengingat kondisi geografis kedua pulau lainnya yang kurang memungkinkan. Beckett, *op.cit.*, hlm. 113-114.

Malo di sebuah desa bernama Las di Pulau Murray. Legenda Malo-Bomai ini menjadi gaya hidup atau kepercayaan para penduduk di Pulau Murray dan nantinya akan menjadi dasar argumentasi dari tuntutan hukum Eddie Mabo di pengadilan. Wujud Malo-Bomai direpresentasikan oleh seekor gurita yang tiap tentakelnya mengacu kepada tiap klan Meriam (sebutan untuk penduduk Pulau Murray atau Pulau Mer) dan tubuhnya merupakan suatu pusat dari kekuatan dan juga persatuan antar orang Meriam. Desa Las ini merupakan wilayah atau teritori dari klan Piadram, satu dari delapan klan yang ada di Pulau Murray dan tempat Eddie Mabo dibesarkan sebagai anak angkat dari Benny dan Maiga Mabo.⁴⁶

Edward Koiki Mabo, atau yang dikenal dengan nama Eddie Mabo lahir di Desa Las, Pulau Murray, pada 29 Juni 1936 (lihat Lampiran 13).⁴⁷ Ia adalah anak kandung dari Robert dan Poipe Sambo. Poipe Sambo yang merupakan adik dari Benny Mabo meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Eddie. Kemudian, mengikuti hukum adat Meriam, Eddie kemudian diadopsi oleh paman dan bibinya, Benny dan Maiga Mabo. Mereka memberikan nama belakangnya kepada Eddie. Dalam wawancaranya dengan Noel Loos, Mabo lebih memilih untuk dipanggil dengan nama Meriamnya yaitu Koiki. Sangatlah biasa jika orang-orang Meriam mengadopsi nama-nama Eropa, namun tetap memiliki nama Meriam sebagai nama tengah mereka. Sejak dulu, Mabo paham betul bahwa ia harus menguasai kebudayaan dan bahasa kulit putih, sebagus ia menguasai bahasa dan budaya kaumnya sendiri. Ia berasal dari klan Piadram yang telah menjadi penganut agama Kristen yang taat.

Setelah diangkat menjadi anak dari Benny dan Maiga Mabo, sebagai anak lelaki pertama, ia secara otomatis menjadi kepala keluarga Mabo. Nama Sambo yang seharusnya ia dapat dari keluarga kandungnya, diputuskan untuk tidak ia gunakan menurut nasihat orang tua angkatnya. Hal itu dikarenakan dalam keluarga Sambo, banyak sekali anak lelaki yang lebih tua dari pada Eddie, sehingga masa depannya akan lebih baik jika ia tetap menyandang nama belakang Mabo. Masa depan tersebut maksudnya adalah hak Eddie akan kepemilikan tanahnya di Desa Las, selepas kepergian Benny Mabo.⁴⁸

⁴⁶ Loos dan Mabo, *op.cit.*, hlm. xvii.

⁴⁷ Sharp, *op.cit.*, hlm. 63.

⁴⁸ Loos dan Mabo, *op.cit.*, hlm. 26.

Kehadiran guru kulit putih di Pulau Murray tidak begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah Robert Victor Miles yang merupakan guru Mabo ketika ia masih remaja. Miles dapat berbicara Meriam Mir (bahasa lokal orang-orang Meriam) dengan sangat fasih. Saat ibunya sakit, Mabo sempat tinggal selama dua tahun di rumah Miles. Saat itulah Mabo mempelajari bahasa Inggris dan kebudayaan Eropa, yang nantinya akan sangat berperan dalam masa depannya. Karena ketekunannya, Miles bahkan mempekerjakan Mabo di *Yorke Island School* untuk mengawasi anak-anak kelas satu dan dua. Pengalamannya tersebut membuatnya menjadi salah satu dari segelintir penduduk pulau yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Saat remaja, Mabo juga pernah bekerja sebagai penerjemah untuk Dokter McKerris yang dikirim ke Selat Torres oleh Pemerintah Queensland untuk menyelidiki wabah malaria yang saat itu sedang merebak di sana. Mabo ikut menjelajahi Kepulauan Selat Torres dan juga pesisir selatan Papua bersamanya. Setelah itu, pada tahun 1953, ia juga sempat bekerja selama dua tahun di kapal-kapal nelayan kecil di Pulau Murray.⁴⁹

Robert Sambo, ayah kandung Eddie Mabo, memutuskan untuk mencari pekerjaan di *mainland* Australia setelah mengetahui istrinya meninggal dunia. Robert Sambo merupakan salah satu orang Meriam yang bergabung dalam *Torres Strait Light Infantry* (sebuah badan militer yang didirikan pada masa Perang Dunia II dan beranggotakan Penduduk Kepulauan Selat Torres) ketika Perang Dunia II berkecamuk, begitu pula dengan Benny Mabo, ayah angkat Mabo.⁵⁰ Pada tahun 1951, Benny dan Maiga Mabo kembali mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kabozi.⁵¹

Pada tahun 1957, Eddie Mabo tersangkut dalam kasus pelanggaran hukum adat yang akhirnya menyebabkan ia mendapatkan hukuman untuk meninggalkan Pulau Murray selama dua belas bulan. Para petinggi adat mendapatkan laporan bahwa Mabo remaja terlihat bersama seorang gadis saat ia berada di bawah pengaruh alkohol. Mabo sendiri dalam tulisannya bertahun-tahun kemudian berkata bahwa saat itu ia mabuk dari alkohol tradisional Pulau Murray bernama

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵¹ “Excerpts from Moynihan’s Finding on Mabo”, <http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/info/excerptsMoynihansFindings.htm>, diakses pada 1 Desember 2014, pukul 00:07 WIB.

tuba yang ia ciptakan sendiri dari kelapa sawit. Baik hukum adat dan juga perwakilan Queensland di Pulau Murray sepakat mengirim Mabo ke luar pulau. Akhirnya Mabo pergi ke Thursday Island (TI) dan bekerja untuk *Bowden's Pearling Company* selama beberapa bulan.⁵² Dari situlah petualangan Mabo di luar Pulau Murray dimulai.

Melalui kepentingan ekonomi, hidup orang-orang Meriam dan para penduduk Kepulauan Selat Torres lainnya, sangat berbeda dengan kehidupan Aboriginal di *mainland* Australia. Para penduduk pulau hidup melalui subsistensi ekonomi yang mereka dapat dari hasil laut. Penduduk pulau menyediakan ratusan buruh murah bagi para *Master Boats* atau kapal-kapal besar milik pengusaha-pengusaha kulit putih. Hanya beberapa keluarga saja di Kepulauan Selat Torres yang memiliki kapal nelayan sendiri, kapal-kapal kecil tersebut biasa disebut *Company Boats*. Para penduduk pulau ini dipaksa untuk menjual tangkapan mereka hanya kepada Pemerintah Queensland dengan harga yang jauh di bawah para pembeli komersil lain.⁵³ Kondisi pekerja dan juga bagaimana mereka diperlakukan membentuk Mabo menemukan jati dirinya sebagai aktivis. Nantinya, Mabo bersama empat penuntut Meriam lainnya akan menantang Pemerintah Negara Bagian Queensland akan klaim tanah mereka di Pulau Murray selama sepuluh tahun lamanya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, Mabo kemudian mengambil beberapa pekerjaan seperti menjadi buruh di konstruksi jalan kereta api, awak kapal, dan sebagai tukang kebun. Tahun 1974, masa di mana Eddie Mabo bekerja sebagai tukang kebun di James Cook University, Townsville, Queensland, merupakan masa yang bisa dikatakan sebagai titik balik dirinya sebagai seorang aktivis. Pekerjaan tersebut memberinya akses yang mudah dan cepat kepada perpustakaan universitas di mana Mabo sering menghabiskan waktu luangnya. Suatu siang, Mabo diundang untuk menikmati makan siang bersama dua orang profesor sejarah di universitas tersebut, Henry Reynolds dan Noel Loos.⁵⁴ Menurut

⁵² Loos dan Mabo, *op.cit.*, hlm. 39.

⁵³ *Ibid.*, hlm. xix.

⁵⁴ Henry Reynolds adalah seorang sejarawan Australia ternama yang memiliki spesifikasi dalam bidang sejarah aborigin. Pada awal tahun 70-an, Reynolds menjadi professor di Departemen Sejarah James Cook University di North Queensland bersama Noel Loos yang mengajar mata kuliah Sejarah Hubungan Kulit Putih dan Kulit Hitam di Australia. Selain sebagai seorang

Profesor Henry Reynolds dalam salah satu kuliah umum yang diberikannya, Mabo memberi tahu mereka bahwa ia memiliki mimpi untuk mengakhiri masa tuanya di Pulau Murray yang telah menjadi tanah para leluhurnya selama 15 generasi. Reynolds pun bertanya *“How do you know that it’s still be there when you haven’t been to the island for more than ten years?”*, (“Bagaimana Anda tahu kalau hak tanah tersebut masih (berlaku) di sana jika Anda saja belum pernah kembali ke Pulau (Murray) selama sepuluh tahun?”). Para akademisi tersebut kemudian saling berpandangan dan keduanya sadar bahwa Mabo melewatkannya hal yang sangat fundamental; hukum adatnya mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak berlaku di hadapan hukum Australia. Dengan kata lain tanah itu secara legal bukan milik keluarganya.⁵⁵

Kesadaran akan ketidakberdayaan hukum adat penduduk asli di depan hukum Australia membuat Mabo sadar bahwa ia harus bertindak. Setelah berkomunikasi dengan saudara-saudaranya di Pulau Murray, organisasi-organisasi pembela HAM, dan juga beberapa pengacara serta akademisi, Mabo akhirnya sepakat untuk membangun kasus dan memasukkan tuntutan hukumnya atas hak tanah. Kegigihan Mabo selama sepuluh tahun memperjuangkan haknya di pengadilan banyak menginspirasi rakyat Australia, baik itu penduduk asli maupun penduduk kulit putih. Sayang sekali ketika *High Court of Australia* (pengadilan yang memiliki hierarki tertinggi di negara Australia) memutuskan kemenangan kasus Mabo pada 3 Juni 1992, Eddie Mabo tidak bisa ikut merayakan hal tersebut. Lima bulan sebelumnya, Mabo meninggal dunia setelah melalui perjuangan panjang melawan kanker. Walaupun Mabo telah tiada, keluarga, teman, kolega, serta rakyat Australia, ikut merayakan kemenangan kasus tersebut sebagai *tribute* kepada Mabo. Bryan Keon-Cohen, salah satu pengacara dalam Kasus Mabo mengatakan bahwa Eddie Mabo adalah “. . . a reformer who saw into the future

pengajar, Reynolds juga merupakan seorang aktivis yang membela bangsa Aborigin. Pada tahun 1982, karyanya yang berjudul *The Other Side of the Frontier*, memenangkan penghargaan *Ernest Scott Prize* karena isinya yang kontroversial. Buku tersebut berisikan hasil penelitian Reynolds akan respon bangsa Aborigin terhadap kolonisasi Inggris. Keduanya tidak diragukan lagi merupakan sejarawan-sejarawan yang memiliki kompetensi tinggi terkait isu Aborigin di Australia. Kedudukan serta pengetahuan mereka itulah yang membuat Eddie Mabo sangat menghargai pendapat keduanya. “Henry Reynolds”, <http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A34772>, diakses pada 2 Maret 2015, pukul 20.31 WIB.

⁵⁵ Duncan Kennedy, “Eddie Mabo, the Man Who Changed Australia”, <http://m.bbc.co.uk/news/magazine-18291022>, diakses pada 14 Desember 2013, pukul 20.17 WIB.

and far into the past”, seorang reformis yang mampu melihat baik ke masa depan dan juga ke masa lalu.⁵⁶

2.2. Kebijakan dan Perdebatan Atas Tanah

Tanah yang ditempati oleh orang-orang Aboriginal tidak pernah dimiliki secara perseorangan, namun oleh kelompok, klan, dan suku-suku. Mereka tidak mengenal konsep tanah pribadi. Mereka hidup secara berkesinambungan dari alam, selain mengenal alam sebagai tempat untuk berburu, mereka juga mengenal alam sebagai sebuah situs religius yang sakral. Aboriginal tidak mengenal sistem kasta atau kekayaan. Kepala suku hidup bersama-sama dengan kelompoknya. Posisi tersebut didapatkan atas dasar pengetahuan dan kebijaksanaannya.⁵⁷

Satu hal yang harus dipahami mengenai kedatangan bangsa Eropa pertama ke Australia, terdapat konsep yang berbeda antara *settler*⁵⁸ atau pemukim, dengan *squatter*⁵⁹ atau penghuni liar. *The first settlers*, pemukim pertama, merupakan orang-orang Inggris yang datang ke Australia dalam status narapidana. Nantinya, mereka ditempatkan di tanah-tanah kosong untuk mendirikan perkebunan dan pemukiman. Seiring dengan berkembangnya waktu, banyak *settler* yang akhirnya berubah menjadi *squatter*. Penghuni liar ini adalah para pemukim yang mencoba membohongi Pemerintah Inggris dan mengambil wilayah *Crown Land*⁶⁰ yang tersisa secara ilegal. Di sinilah konflik antara orang Eropa dengan Aboriginal terjadi.⁶¹ Konflik mulai terjadi ketika bangsa Eropa melihat orang Aboriginal berjalan di halaman mereka dan merasa bahwa orang-orang tersebut akan menjadi ancaman. Ketika konflik fisik terjadi, orang-orang Aboriginal pun melihat bahwa mereka harus membela diri dari bangsa asing

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁷ Franklin, *op.cit.*, hlm. 15.

⁵⁸ *A person who goes to live in a new country or a region.* Seseorang yang pergi untuk hidup di suatu negara atau wilayah baru. “*Settler*”, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition*, 8th ed, CD-ROM, (Oxford: Oxford University Press, 2010).

⁵⁹ *A person who is living in a building or on land without permission and without paying rent.* Seseorang yang tinggal di sebuah bangunan atau tanah tanpa izin dan tanpa membayar sewa. “*Squatter*”, *Ibid.*

⁶⁰ Tanah milik Kerajaan Inggris.

⁶¹ Sebelumnya, Pemerintah Inggris telah memerintahkan secara tegas kepada Gubernur Philips agar menghargai orang-orang Aboriginal yang mendiami benua Australia. Namun konflik antara Aboriginal dan *Squatters* semakin sering terjadi sehingga peraturan tersebut kian terlupakan. W. Sanders, (Ed.), *Mabo and Native Title: Origins and Institutional Implications*, (Canberra: Centre for Aboriginal Economic Policy Research Australian National University, 1994), hlm. 27.

tersebut sehingga banyak yang melihat bahwa orang-orang Aboriginal tersebut liar dan perlu dipisahkan dari pemukiman bangsa Eropa. Adapun Gideon Scott Lang (1865) berargumentasi bahwa penyebab konflik tersebut, yaitu:

“Pertama. Pemerintah Kolonial tidak pernah mengakui adanya kebijakan, otoritas, atau hak baik kelompok ataupun personal, di antara orang-orang Aboriginal. Kedua. Mereka telah diusir dari lahan berburu mereka tanpa adanya ketetapan bagi mereka, Negara ini kemudian ditempati oleh para pemukim kulit putih yang tidak menghargai kepentingan mereka . . .”

Akhirnya karena seringnya terjadi bentrokan, menurut pemukim Eropa, Aboriginal menjadi sangat berbahaya sehingga *settlers* dan *squatters* meminta perlindungan kepada Pemerintah Inggris di tahun 1826. Pemerintah mengeluarkan solusi dengan menawarkan lima pound sterling untuk setiap orang Aboriginal yang berhasil ditangkap. Perang dengan orang Aboriginal ini terus berlanjut hingga pada tahun 1830 Gubernur Arthur memiliki ide bahwa solusi yang paling tepat untuk masalah ini adalah dengan menempatkan orang Aboriginal di satu area yang bisa mereka kontrol. Rencana penangkapan orang Aboriginal secara besar-besaran tersebut hampir saja berakhir gagal. Tetapi seorang misionaris (mualim penyebar Injil) bernama Robinson menyukseskan rencana tersebut dengan menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Ia mencoba meyakinkan orang-orang Aboriginal dengan mempelajari bahasa mereka dan mendapatkan kepercayaan mereka. Ia meminta mereka untuk ikut dengannya meninggalkan alam liar dan pindah ke wilayah reservasi.⁶²

Pada tahun 1850, penghuni liar di daerah utara New South Wales menginginkan dibentuknya suatu koloni baru. Sehingga pada tanggal 10 Desember 1859, Pemerintah Kolonial Inggris mendirikan koloni baru Queensland dengan peraturan yang kurang lebih sama dengan koloni-koloni Inggris sebelumnya.⁶³ Di Queensland sendiri, bentrokan antara Aboriginal dan para pemukim itu terjadi karena keduanya memiliki dua visi yang berbeda mengenai penggunaan tanah. Para pemukim ingin mengolah tanah tersebut sedangkan Aboriginal ingin menggunakan tanah tersebut seperti saat sebelum kedatangan bangsa Barat. Aboriginal biasanya bepergian dalam sebuah kelompok kecil yang berisikan *nucleus family* atau keluarga inti sehingga mereka dapat ditangkap

⁶² Franklin, *op.cit.*, hlm. 30-31.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 68.

dengan mudah. Tidak seperti suku Maori⁶⁴ di Selandia Baru dan suku Indian di benua Amerika, Aborigin tidak memiliki pengalaman dalam perperangan sehingga tidak bisa memaksa Inggris menandatangani perjanjian formal dengan mereka.⁶⁵ Juga tidak adanya satu konfederasi kesukuan yang bisa bersatu untuk melawan bangsa Barat. Saat itu pula para pemukim mulai mengembangbiakkan bibit domba merino yang mereka bawa dari Eropa, di Australia sehingga mereka semakin menyeret Aborigin untuk pergi dari tempat tinggal mereka.⁶⁶

2.2.1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penduduk Asli

Dalam Konstitusi Australia, hanya ada dua ayat yang menyebutkan kedudukan Aborigin. Pasal 51 (xxvi) berbunyi: *“The people of any race, other than the Aboriginal race in any State, for whom it is deemed necessary to make special laws”*⁶⁷ Sedangkan dalam pasal 127 disebutkan: *“. . . to reckoning the numbers of people of the Commonwealth, or of a State or other part of the Commonwealth aboriginal natives shall not be counted”*.⁶⁸ Konstitusi Australia tersebut secara formal mengecualikan orang-orang Aborigin dan juga penduduk Kepulauan Selat Torres dari hak mereka sebagai penduduk sah dan warga negara Australia, dengan mengecualikan mereka dari sensus penduduk. Kedua pasal tersebut kemudian semakin didukung dengan dikeluarkannya *White Australia Policy* (1901) yang menjelaskan bahwa Australia adalah ‘benua kulit putih’.

Pada tahun 1872, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *Land Regulations*, di mana sekelompok orang Aborigin yang memenuhi syarat diberikan tanah untuk diolah. Namun tahun 1911-1912, ketika Australia telah terbentuk menjadi sebuah Federasi, terjadi sebuah bencana kekeringan yang

⁶⁴ Pemerintah Selandia Baru telah menyetujui hukum internasional mengenai penduduk asli dan menerima bahwa orang-orang Maori adalah pemilik sah tanah di Selandia Baru. Hal ini diatur dalam *Treaty of Waitangi Act* (1975) dalam Henry Reynolds, *Dispossession: Black Australians and White Invaders*, (St. Leonards: Allen & Unwin, 1989), hlm. 149.

⁶⁵ Di Amerika Utara, bangsa Eropa yang mendarat di benua tersebut mau tidak mau berkompromi dengan bangsa Indian dan melakukan perjanjian agar bisa membeli tanah dari mereka. Usaha bangsa Eropa ini terjadi di hampir seluruh wilayah Amerika Utara selama abad ke-18 dalam *Ibid.*, hlm. 78.

⁶⁶ Franklin, *op.cit.*, hlm. 36.

⁶⁷ “The Constitution”,

http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/52%20Sen/523%20PPP/2012_Australian_Constitution.pdf, diakses pada 27 November 2014, pukul 21.12 WIB.

⁶⁸ *Ibid.*

dahsyat sehingga pada tahun 1914-1915, jumlah Aboriginal yang tetap tinggal dan mengolah tanah tersebut bisa dihitung oleh jari.⁶⁹ Archibald Meston, diminta *Minister for Aboriginal Affairs* untuk membuat laporan akan orang-orang Aboriginal di Queensland. Meston membawa laporan dengan hasil yang mengejutkan. Menurutnya pada tahun 1871, tadinya ada lima suku Aboriginal besar di Queensland yang berjumlah sebanyak 3.000 orang. Namun pada tahun 1896, jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 100 orang saja. Dengan data tersebut Meston mengusulkan bahwa kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan hal ini adalah kebijakan segregasi yang memisahkan bangsa kulit putih dengan orang-orang Aboriginal. Pada tahun 1897 akhirnya Pemerintah Queensland menerima usul Meston tersebut.⁷⁰

Pada tahun 1931, *Arnhem Land Aboriginal Reserve*, sebuah wilayah reservasi untuk orang Aboriginal, didirikan di Yirrkala, Northern Territory. Terhitung sejak bulan Agustus 1963, Arnhem Land telah menjadi rumah bagi 89 laki-laki Aboriginal, 130 wanita Aboriginal, 288 anak-anak Aboriginal ditambah dengan lima staf kulit putih. Sedangkan tanah yang mereka klaim, saat itu merupakan tambang bauksit milik *Gove Bauxite Corporation*, seluas 360 km².⁷¹ Sejak 1944, di bawah *Natives (Citizenship Rights) Act*, orang-orang Aboriginal bisa mendaftar untuk mendapatkan *Certificate of Citizenship* ke Pemerintah Negara Bagian Western Australia. Namun, hal ini bisa dilakukan jika mereka telah memenuhi beberapa syarat. Dengan sertifikat kependudukan tersebut, orang-orang Aboriginal bisa masuk ke komunitas publik dan hidup berdampingan dengan orang-orang kulit putih, melalui proses naturalisasi. Melalui kebijakan ini, tidak banyak orang-orang Aboriginal yang dapat tersaring terutama karena pengertian umum mereka mengenai hak kependudukan yang masih jarang dipahami.⁷²

Perlakuan Pemerintah Australia terhadap penduduk asli bisa dinilai dengan penemuan sebuah surat perintah dari periode Perang Dunia II yang terekam dalam *National Archives Australia*. Surat tersebut ditulis oleh *Director of*

⁶⁹ Franklin, *op.cit.*, hlm. 59.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷¹ Jennifer Clark, *Aborigines and Activism: Race, Aborigines and the Coming of the Sixties to Australia*, (Crawley: University of Western Australia Press, 2008), hlm. 94-95.

⁷² *Ibid.*, hlm. 187.

Native Affairs, William Street, yang isinya adalah mengenai nasib penduduk Kepulauan Selat Torres yang saat itu dikepung Jepang.

“Since the evacuation most of the Islanders have returned to their respective Islands, and are now without employment of any kind, except perhaps for a little gardening . . . The Missionaries of the Islanders have been moved and this leaves the Islanders very much to their own devices . . . It is therefore suggested that they could be moved South and given employment in some primary industry such as the Cane fields or other farming work where they could be of use in the 100% war effort, instead of being innocent potential assistants to the enemy . . .”⁷³

(“Sejak evakuasi kebanyakan Penduduk Pulau telah kembali ke Pulau yang mereka hormati dan sekarang tidak memiliki pekerjaan apapun, kecuali sedikit berkebun . . . Misionaris di Kepulauan tersebut telah dipindahkan dan hal ini membuat Penduduk Pulau ditinggal sendirian . . . Akan lebih baik jika mereka bisa dipindahkan ke Selatan dan diberikan pekerjaan dalam industri primer seperti ladang Tebu atau pada peternakan di mana mereka bisa berguna 100% untuk kepentingan perang, dibandingkan menjadi sasaran yang potensial untuk membantu musuh . . .”)

Dari sumber primer tersebut bisa dilihat jika penduduk Kepulauan Selat Torres ditinggalkan begitu saja di rumah-rumah mereka, ketika Perang di Pasifik terjadi (lihat Lampiran 11). Disebutkan bahwa para misionaris yang tentunya berkulit putih, telah dievakuasi ke daratan Australia sehingga hanya tersisa 750 orang penduduk pulau yang bisa dijadikan sebagai tenaga kerja. Pemerintah Australia tentunya takut hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk keuntungan mereka sendiri. Selain dapat digunakan sebagai tenaga kerja, para penduduk pulau ini bisa mereka manfaatkan sebagai sumber informasi karena pemahaman tidak terbatas yang mereka miliki mengenai Selat Torres. Nantinya, setelah Perang berakhir, ini pula yang membawa kesadaran kepada Penduduk Kepulauan Selat Torres bahwa mereka merupakan golongan penduduk yang terlupakan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa mereka tidak ikut dievakuasi ketika perang terjadi. Yang dievakuasi ke daratan Australia ketika perang hanyalah orang-orang Eropa dan Asia saja, pihak militer dan Penduduk Kepulauan Selat Torres tetap berada di tempat.⁷⁴ Menurut *Defence Act*, semua orang yang bukan merupakan keturunan Eropa, tidak dilibatkan dalam wajib militer. Tetapi aturan tersebut tidak berlaku jika mereka ingin mengajukan diri secara sukarela seperti yang diatur dalam *Australian Military Regulation and Orders No. 177*. Tetapi kemudian peraturan tersebut ditangguhkan oleh Militer Australia, karena Darwin dibom oleh Jepang

⁷³ “Torres Strait Islanders”, www.naa.gov.au, diakses pada 12 November 2014, pukul 17.55 WIB.

⁷⁴ *Ibid.*

sehingga akhirnya *Northern Territory Special Reconnaissance Unit* dan *Torres Strait Defence Force* pun dibentuk. Namun status tentara “pulau” yang direkrut ini tidak jelas. Mereka dipisahkan dari tentara kulit putih lainnya, baik markas ataupun tugas, mereka juga dibayar kurang dari setengah bayaran normal yang diterima oleh para tentara kulit putih.⁷⁵

Awalnya pihak militer mendirikan *Torres Strait Inf. Coy* dan *Torres Strait Emp. Coy*, namun berbeda dengan *Torres Strait Inf. Coy*, yang mendapatkan pelatihan militer penuh selayaknya tentara, *Torres Strait Emp. Coy* dipekerjakan sebagai tenaga kerja biasa. Akhirnya karena adanya tendensi, dikeluarkanlah putusan yang menghapuskan *Torres Strait Inf. Coy* dan *Torres Strait Emp. Coy* dan digantikan dengan *Torres Strait Light Infantry Battalion* (lihat Lampiran 9 dan Lampiran 10). Sebanyak 671 penduduk lokal akan diberikan pelatihan militer yang memadai namun mereka masih bisa digunakan sebagai tenaga kerja jika diperlukan.⁷⁶

Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ben Chifley (1945-1949) ditekan untuk segera memberikan kekuatan serta status legislatif bagi orang-orang Aboriginal. Namun Referendum ini ditolak. Referendum mengenai Aboriginal yang sukses nantinya adalah Referendum 1967 dengan suara sebanyak 89,34% dari publik setuju bahwa orang-orang Aboriginal merupakan warga negara Australia.⁷⁷ Dari seluruh jumlah penduduk Australia, hanya 527.007 orang yang tidak setuju dengan proposal tersebut. Pada tahun 1965, Pemerintah South Australia mengeluarkan *Aborigines' Land Trust* (pada masa pemerintahan Buruh). Namun hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan Buruh di Queensland, New South Wales, dan Western Australia sama kerasnya dengan South Australia dan Northern Territory yang tadinya dipimpin oleh Partai Liberal.⁷⁸

Walaupun orang-orang Aboriginal telah ditempatkan ke dalam wilayah-wilayah reservasi, pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang layak seperti sekolah untuk anak-anak Aboriginal. Banyak dari mereka menyadari sekolah

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Franklin, *op.cit.*, hlm. 185.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 188.

merupakan jalan mereka untuk hidup dalam standar kulit putih, namun akses mereka untuk mencapai hal tersebut sangatlah kecil. Diskriminasi dan pelecehan terhadap para penduduk asli membuat Australia dipandang sebagai bangsa Anglo-Saxon yang sangat rasis dan tidak memiliki kedulian terhadap bangsa-bangsa non-Eropa baik di negaranya sendiri maupun di negara lain di dunia. Pandangan dunia luar ini memberikan tekanan bagi Australia untuk melakukan perubahan sikap dalam kebijakan mereka terhadap penduduk asli. Untuk itu, *Federal Council for Aboriginal Advancement* resmi dibentuk pada tahun 1957.⁷⁹ Usaha tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Pemerintah Federal untuk membuat referendum terkait dengan kebijakan asimilasi⁸⁰ bagi penduduk asli, pada tahun 1967.⁸¹ Referendum yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Harold Holt (1966-1967) berhasil menarik suara sekitar 90,7% positif terkait isu persamaan hak di Australia. Sehingga untuk pertama kalinya orang-orang Aboriginal menjadi penduduk resmi yang tercatat secara sah dari negara Australia. Sikap Partai Liberal mengenai isu *land rights* (gerakan untuk menuntut hak tanah bagi penduduk asli) ini sangat beragam. Walaupun sama-sama berasal dari Partai Liberal, sikap antara Harold Holt, dan perdana-perdana menteri Australia penerusnya seperti John Gorton serta William McMahon tidaklah sama.⁸²

Sejak terbentuk menjadi Federasi, Australia telah melalui 17 Referendum, tetapi hanya lima yang berhasil disukseskan termasuk Referendum 1967 mengenai status penduduk Australia sebagai warga negara yang sah. Walaupun demikian, situasi tidak banyak berubah, karena meskipun masalah Aboriginal sudah diatur oleh Pemerintah Federal, nyatanya banyak negara bagian yang tetap ingin mengatur sendiri dengan alasan masalah Aboriginal tersebut tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Pada Masa pemerintahannya, Perdana Menteri Harold Holt mengalokasikan dana sebanyak \$36,000 untuk *the Office of Aboriginal Affairs*, sebanyak \$23,000 di antaranya digunakan untuk membayar pegawai kulit putih dan hanya tersisa \$13,000 yang digunakan untuk administrasi dan kesejahteraan Aboriginal. Pada Desember 1968, posisi Harold Holt sebagai

⁷⁹ Kemudian badan tersebut pada 1958 berganti nama menjadi *Federal Council for the Advancement for Aborigines and Torres Strait Islanders* (FCAATSI).

⁸⁰ Titik balik dari kebijakan *separation and segregation*, kebijakan asimilasi (*assimilation*).

⁸¹ Franklin, *op.cit.*, hlm. 123.

⁸² West, *op.cit.*, hlm. 63.

Perdana Menteri digantikan oleh John Gorton (1968-1971) yang berasal dari Partai Liberal Australia.⁸³ Pemerintahan Gorton yang didukung oleh koalisi Partai Liberal-Country akan mengalokasikan dana sebanyak \$10,000,000 untuk *Aboriginal Trust Account* (1968).⁸⁴

Pada tanggal 26 Februari 1971, William Wentworth menulis artikel di surat kabar *The Australian* yang berjudul ‘*Discrimination and Queensland Aboriginals*’. Hal ini dilatarbelakangi oleh satu kebijakan Negara Bagian Queensland terhadap penduduk asli yaitu *Aborigines and Torres Strait Islanders Affairs Act* (1965). Ayat 27 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa *district officer* bisa mengambil alih dan mengurus properti dari orang Aborigen yang dirasa kurang mampu mengatasi masalah administrasinya sendiri. Undang-undang ini juga mengatur sistem pembayaran upah pekerja Aborigen yang dibayarkan ke dalam sebuah *trust accounts*, rekening kepercayaan. Sayangnya sangat sulit untuk menarik uang dari rekening tersebut. Wentworth mengingatkan Queensland bahwa bisa saja *Commonwealth* menghapus kebijakan Queensland tersebut karena sifatnya yang sangat rasis. Wentworth bisa mengatakan hal tersebut karena ia didukung oleh pidato Perdana Menteri John Gorton pada tahun 1968 yang mengatakan bahwa semua hukum yang terkesan mendiskriminasi Aborigen akan segera dihapus oleh Parlemen Federal (baik hukum *Commonwealth* ataupun hukum negara bagian).⁸⁵

Saat itu, Negara Bagian Queensland sedang dipimpin oleh *Premier*⁸⁶ Joh Bjelke-Petersen (1968-1987) yang berasal dari *National Party of Australia*⁸⁷. Ia merupakan *premier* Queensland dengan masa bakti terlama yang selalu menolak

⁸³ Hal ini terjadi ketika Harold Holt dinyatakan hilang dan tewas ketika sedang berenang di pesisir Victoria.

⁸⁴ Dana itu ia gunakan untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan Aborigen. Selain itu dana tersebut ia gunakan untuk membantu usaha kecil orang-orang Aborigen. Selebihnya, PM Gorton juga membentuk *Minister for Aboriginal Affairs* dengan menteri pertamanya William Wentworth. Peter Nixon, *Minister for the Interior*, sangat tidak setuju dengan ide untuk memberikan tanah kepada orang Aborigen. “*It is wholly wrong to encourage Aboriginals to think that because their ancestors have had a long association with a particular piece of land, Aboriginals of the present day have the right to demand the ownership of it.*” (“Sangatlah salah untuk membuat orang Aborigen bahwa hanya karena mereka merupakan nenek moyang mereka memiliki asosiasi panjang terhadap tanah, orang Aborigen di masa kini memiliki hak untuk menuntut kepemilikan yang sama dengan nenek moyang mereka tersebut.”) dalam West, *op.cit.*, hlm. 193.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 195-196.

⁸⁶ Sebutan untuk pemimpin negara bagian di Australia.

⁸⁷ Joh Bjelke-Petersen merupakan *Premier* yang menjabat di Negara Bagian Queensland ketika Eddie Mabo mengajukan tuntutannya ke *High Court of Australia* di tahun 1982.

tuntutan atas tanah baik oleh orang-orang Aboriginal ataupun Penduduk Kepulauan Selat Torres. *Premier* Petersen berdalih jika *land rights* bertolak belakang dengan kebijakan asimilasi yang mana seharusnya penduduk asli hidup bersama dengan masyarakat Australia lainnya. Dalam kutipan pernyataannya di dalam buku *Race and Racism in Australia* (1988, 157), *Premier* Petersen menyatakan bahwa Pemerintah Queensland memiliki komitmen tegas terhadap persamaan hak (*equal rights*), tetapi tidak pada hak atas tanah (*land rights*).⁸⁸

Di Queensland sendiri, banyak terdapat tambang-tambang yang memiliki prospek besar terhadap perekonomian negara bagian sehingga kebijakan pemerintah sifatnya selalu menolak keberadaan pergerakan-pergerakan penduduk asli mengenai *land rights*. Banyak tuntutan orang-orang Aboriginal diajukan hingga ke tingkat pengadilan, namun tidak ada satupun yang pernah menang karena mereka menganggap penduduk asli tidak pernah memiliki pengaturan atas tanah sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebenarnya, walaupun tidak tertulis, penduduk asli baik orang Aboriginal dan Penduduk Selat Torres, mereka sudah memiliki aturan yang diterapkan secara turun-temurun mengenai pembagian tanah. Mereka tidak akan merebut tanah milik suku lainnya, dan kepemilikan tanah pun diturunkan melalui garis laki-laki. Namun, konsep *terra nullius* jauh lebih dipercaya oleh masyarakat Australia.⁸⁹

Kemudian Gorton jatuh dari posisinya sebagai Perdana Menteri di tahun 1971 dan digantikan oleh William McMahon (1971-1972) yang berasal dari Partai Liberal. Dengan demikian karier Wentworth sebagai *Minister of Aboriginal Affairs* dan desakannya agar Pemerintah Negara Bagian Queensland memperlunak kebijakannya terhadap penduduk asli juga berakhir. McMahon membutuhkan dukungan dari Queensland dalam Koalisi Partai *Liberal-Country*-nya. Oleh karena itu ia tidak menjalankan usulan dari Wentworth tapi mengikuti kemauan Joh Bjelke-Petersen. Menurut Bjelke-Petersen kebijakan Queensland tersebut adalah untuk melindungi orang Aboriginal dan Penduduk Kepulauan Selat Torres.⁹⁰

⁸⁸ McConnochie; Hollinsworth; Pettman, *op.cit.*, hlm. 157.

⁸⁹ Reynolds, *op.cit.*, hlm. 67.

⁹⁰ Akhirnya McMahon berkeputusan untuk menghapus *Office of Aboriginal Affairs* dari *Prime Minister Department* dan memindahkan kantor tersebut ke bawah Departemen Lingkungan, Aboriginal, dan Seni. (197-198) *National Tribal Council* sempat mengeluarkan Manifesto yang salah satu isinya menuntut: “*Land and mineral rights – a policy of a full recognition of ownership*

Pada 26 Januari 1972,⁹¹ Perdana Menteri William McMahon mengumumkan bahwa orang Aborigin tidak akan pernah mendapatkan *land rights*. Dia berkata bahwa Pemerintah telah sangat murah hati dengan memberikan *land leases* (penyewaan tanah) di Northern Territory. Pernyataan inilah yang melatarbelakangi peristiwa *Tent Embassy*, Kedutaan Tenda, yang digelar para aktivis pro Aborigin di depan Gedung Parlemen Australia, Canberra di tahun 1972.⁹² Pada awalnya Tony Corey, salah satu aktivis penggagasnya, menggunakan nama *tent embassy* awalnya sebagai lelucon semata. Ia bermaksud menyindir Pemerintah dengan mengatakan bahwa penduduk asli Australia bukanlah penduduk ‘asli’ Australia sehingga mereka membutuhkan ‘kantor kedutaan’ tersendiri. *Tent Embassy* merupakan salah satu faktor dari jatuhnya Pemerintahan koalisi *Liberal-Country Party* pimpinan McMahon. Media saat itu menjadi lebih pro-*Labor*.

Tindakan McMahon tersebut mengundang penolakan dari pihak Oposisi Partai Buruh Australia atau *Australian Labor Party* (ALP), yang dipimpin oleh Gough Whitlam. Whitlam mengecam tindakan pemerintah secara terbuka pada 1971, di Konferensi Hobart. Oposisi tersebut membuat Partai Buruh berhasil menang di pemilu yang kemudian menjadikan Gough Whitlam (1972-1975) sebagai perdana menteri Australia selanjutnya. Ia segera mengembalikan kekuatan *Minister of Aboriginal Affairs* dan kemudian mengangkat Gordon Bryant dari *Federal Council for the Advancement for Aborigines and Torres Strait*, (FCAATSI) untuk menjadi menteri.⁹³ Perjuangan akan *land rights* semakin gencar setelah Referendum 1967, sehingga keterlibatan aktivis Aborigin di dunia politik pun semakin menguat.

Salah satu gebrakan besar dari Whitlam terjadi pada tanggal 10 April 1973, di mana Whitlam mengeluarkan *Aboriginal Land Fund* untuk membeli tanah-tanah di luar wilayah reservasi Aborigin yang nantinya akan digarap oleh komunitas Aborigin itu sendiri. Tiap tahunnya, direncanakan Pemerintah akan

of traditional land and compensation for all land taken from Aborigines and royalties to be paid for communities affected by exploitation.” Ibid., hlm. 205.

⁹¹ Tanggal 26 Januari di Australia merupakan peringatan *Australia Day* yang diselenggarakan tiap tahun untuk memperingati kedatangan Kapten Cook ke benua Australia

⁹² McConnochie; Hollinsworth; Pettman, *op.cit.*, hlm. 154.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 142.

menyisihkan pengeluaran sebesar \$5,000,000 untuk *Aboriginal Land Fund* tersebut.⁹⁴ Pemerintah Federal di bawah Whitlam mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk menyejahterakan penduduk asli. Pemerintah berani membukukan izin untuk eksplorasi tambang di Northern Territory. Sejak Referendum 1967, Pemerintah juga telah berupaya untuk mengambil alih otoritas negara bagian dalam menangani masalah Aborigin di wilayah mereka. South Australia, Western Australia, Victoria, dan New South Wales menyetujui intervensi Pemerintah Federal terkait masalah tersebut. Hanya Negara Bagian Queensland saja yang terus bersikeras menolak intervensi Pemerintah Federal.

Isu Aborigin sudah menjadi masalah internasional. Bahkan *Minister for Justice* Kenya, Tom M'boya, mengatakan Australia memiliki reputasi di Afrika sebagai “. . . a land of white people with an immigration policy based on White Australia and a domestic policy that systematically denied the Aboriginal equal rights and treatment on his own land”, sebuah tanah kulit putih dengan kebijakan imigrasi berdasarkan *White Australia* dan kebijakan domestik yang secara sistematis menolak kesetaraan hak dan perlakuan yang sama terhadap orang-orang Aborigin di tanahnya sendiri. Posisi Australia yang kian terhimpit selepas Perang Dunia II, membuat negara tersebut sadar bahwa mereka harus melakukan perubahan kebijakan terhadap orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Pada tahun 1948, Herbert Evatt, seorang politisi Australia, diangkat menjadi Presiden dari *the United Nations General Assembly* (1948-1949). Pada masa jabatannya, Evatt membantu menyusun *United Nations Universal Declarations of Human Rights* (1948).⁹⁵ Sehingga banyak kritik dilayangkan kepada Australia, karena selain negara tersebut adalah anggota awal PBB, Australia pun melakukan kampanye mengenai HAM di dunia internasional yang mana di negara mereka, isu tersebut masih menjadi permasalahan.

Australia sudah mulai mendapatkan tekanan dari dunia luar terkait dengan perlakuan mereka terhadap penduduk asli sejak tahun 1950-an. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Labor Organisation* (ILO)

⁹⁴ Franklin, *op.cit.*, hlm. 213.

⁹⁵ Les Malezer, “Mabo and The Framework of Dominance”, <http://nationalcongress.com.au/wp-content/uploads/2012/06/20120603Mabo20speech.pdf>, diakses pada 20 April 2014, pukul 20.26 WIB.

mulai mengirimkan utusan-utusan mereka ke Australia yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri William McMahon, untuk mempelajari sendiri bagaimana kondisi orang-orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Hal ini semakin gencar dilakukan oleh pihak luar semenjak terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* yang kemudian diadopsi oleh *United Nations General Assembly*, Mahkamah Umum PBB, pada tahun 1948.⁹⁶

“McMahon said that ‘the Government understands fully the desire of the Aboriginal people to have their affinity with the land with which they had been associated recognised by law,’ but the government did not really understand that at all.”⁹⁷

(“McMahon mengatakan bahwa ‘Pemerintah paham betul akan hasrat bangsa Aborigin untuk memiliki afinitas terhadap tanah yang tengah mereka asosikan untuk diterima oleh hukum,’ namun pemerintah tidak benar-benar memahami hal tersebut”)

Akhirnya, pada tahun 1976, Pemerintahan Malcolm Fraser (1975-1983) yang menggantikan Pemerintahan Whitlam, mengeluarkan *Northern Territory Land Rights Act* yang sebelumnya disusun pada masa pemerintahan Whitlam. Walaupun demikian, UU tersebut tidak mengatur kepemilikan tanah orang Aborigin secara menyeluruh. Dalam UU tersebut diatur bahwa Aborigin berhak mengklaim dan menerima hak atas tanah yang tidak diduduki baik oleh perumahan ataupun perusahaan tambang.⁹⁸ Nantinya, kebijakan ini akan ditinjau kembali sebagai referensi ketika Mabo memperjuangkan hak tanahnya di Pulau Murray, Kepulauan Selat Torres, Queensland.

2.2.2. Hukum Adat Penduduk Asli Mengenai Tanah

Ketiga pulau kecil yang biasa disebut dengan Pulau Murray berada di wilayah Kepulauan Selat Torres dan berada di ujung utara *Great Barrier Reef* Australia. Ketiga pulau tersebut dalam bahasa lokal yaitu bahasa Meriam Mir, dinamakan Mer, Dauar, dan Waier. Namun pada tahun 1791, kapten dari Kapal Pandora yang saat itu berhasil sampai ke Selat Torres, menamakan ketiganya dengan Kepulauan Murray. *Reverend* (Pendeta) David Passi, salah satu penuntut Meriam dalam Kasus Mabo berkata, *“I am born into the ownership of this land . . .*

⁹⁶ Sharp, *op.cit.*, hlm. 188.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 237.

⁹⁸ “*The Aboriginal Land Rights Act*”, <http://www.clc.org.au/articles/info/the-aboriginal-land-rights-act/>, diakses pada 12 Februari 2015, pukul 20.29 WIB.

. It is against our traditional law that we sell the land . . . it is trespassing against Malo's (our traditional god's) law." ("Saya terlahir dengan kepemilikan atas tanah ini . . . Akan melanggar hukum tradisional kami jika kami menjual tanah . . . ini juga melanggar hukum Malo (dewa tradisional kami.") Kebanyakan saksi dalam Kasus Mabo mengaku mempraktikkan hukum Malo (*Malo's Law*) yang kemudian mereka kombinasikan dengan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-harinya.⁹⁹ Malo sendiri merupakan pemimpin spiritual dari orang-orang Meriam. Ia bisa dikatakan merupakan tokoh mitos yang disebut-sebut menyatukan delapan klan Meriam di bawah satu rumpun.¹⁰⁰

Sebelum Kasus Mabo, sebenarnya telah banyak kasus serupa yang dilancarkan oleh para penduduk asli agar Pemerintah Australia memberi hak tanah yang sah serta perlakuan dan hak yang setara kepada mereka. Salah satu di antara kasus-kasus tersebut adalah demo yang dilakukan orang-orang Aboriginal Gurindji yang bekerja di Wave Hill melakukan demo menuntut kenaikan upah dan kasus orang-orang Yolngu di Arnhem Land, Northern Territory yang menuntut Perusahaan Nabalco Pty Ltd di Gove Peninsula. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama legalnya yaitu *Milirrpum v. Nabalco*. Orang-orang Yolngu ini mengklaim bahwa tanah yang dijadikan tambang bauksit oleh perusahaan tersebut adalah tanah tradisional mereka. Namun dari sekian banyak tuntutan, tidak satu pun kasus tersebut yang berakhir dengan pengakuan bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh penduduk Australia berkulit putih itu pada awalnya adalah tanah dari nenek moyang para penduduk asli. Biasanya Pemerintah hanya akan memberikan sistem sewa tanah (*land lease*) di mana para penduduk asli bisa mengelola tanah yang sebelumnya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk ditinggali dan diolah.

Orang-orang Meriam yang hidup di Pulau Murray, Kepulauan Selat Torres, berdasarkan bukti-bukti antropologi dan juga arkeologi, berasal dari Papua

⁹⁹ Malo adalah sosok seorang dewa yang dipercaya oleh orang-orang Meriam yang tinggal di Pulau Murray. Menurut cerita, Malo datang ke Selat Torres dari arah barat laut selat tersebut. Malo datang ke Pulau Murray menggunakan wujud sebagai seekor paus dan kemudian mentransformasikan dirinya menjadi banyak hewan laut lainnya seperti gurita. Gurita adalah sosok terakhir jelmaan Malo sehingga kemudian Malo dan sosoknya sebagai gurita dipercaya menjadi dewa mereka dan merupakan pelindung dari delapan klan Meriam yang ada di Pulau Mer, termasuk klan Mabo dalam "Mabo: the Native Title Revolution", <http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/> diakses pada 12 Februari 2015, pukul 19.39 WIB.

¹⁰⁰ Sharp, *op.cit.*, hlm. xix-xx.

Nugini dan Irian Jaya. Beribu-ribu tahun lalu, mereka bermigrasi ke selatan dan menempati Pulau Murray. Oleh karena itu, kulit orang-orang Kepulauan Selat Torres berwarna sedikit lebih cerah dibandingkan dengan orang-orang Aboriginal yang hidup di *mainland* Australia. Orang-orang Meriam merupakan nelayan. Secara tradisional, dalam hukum mereka, tidak ada tanah yang kosong ataupun tidak memiliki tuan. Pembagian tanah telah diatur secara turun temurun melalui garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki pertama akan mendapatkan jatah tanah yang lebih besar.¹⁰¹

Yang menarik, hukum Meriam memperbolehkan sistem ‘adopsi’ anak, seperti yang terjadi dalam Kasus Mabo yang mana Eddie Mabo merupakan anak adopsi. Status tersebut tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan tanah secara tradisional dari orang tua mereka. Hak atas tanah di Pulau Murray dilindungi oleh Hukum Malo (*Malo’s Law*) yang merupakan seperangkat aturan religius yang harus dipatuhi orang-orang Meriam. Ada satu Hukum Malo mengenai tanah yang diajarkan sejak orang-orang Meriam masih kanak-kanak. Hukum tersebut berbunyi “*Malo tag mauki mauki, Teter mauki mauki*” yang berarti Malo tidak akan pernah menyentuh ataupun menginjak tanah orang lain. Dalam Kasus Mabo, saat terjadi proses *hearing*, dengar pendapat, 33 saksi Meriam mengucapkan kalimat yang sama ke pada juri di pengadilan.¹⁰² Yang menarik, Pemerintah Australia terkesan mendukung klaim tersebut untuk mencegah migrasi penduduk Kepulauan Selat Torres ke *mainland* Australia. Hal ini terus bertahan hingga tahun 1960an, sehingga sedikit sekali penduduk Kepulauan Selat Torres yang aktif di organisasi-organisasi HAM. Tidak seperti orang-orang Aboriginal di daratan Australia yang telah banyak mendapat pengaruh dari dunia internasional.¹⁰³

Seperti yang diketahui, orang-orang Aboriginal menurunkan ilmu, hukum, serta adat istiadat mereka melalui proses sejarah lisan yang dilakukan secara turun-temurun. Selain lukisan-lukisan gua yang ditemukan di berbagai wilayah di Australia, Aboriginal hampir tidak mengenal sejarah tertulis. Namun, sedikit berbeda dengan Aboriginal, penduduk Pulau Murray yang merupakan penduduk

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰³ Sanders, *op.cit.*, hlm. 10.

Kepulauan Selat Torres, mulai mengerti pentingnya penulisan sejarah lisan tersebut. Sehingga mulai tanggal 23 Januari 1962, seorang tokoh masyarakat Meriam, Marou Mimi, mulai menuliskan hal-hal yang diketahuinya mengenai Hukum Malo.¹⁰⁴ Sebelumnya pun, Pasi (Passi) kakek dari *Reverend* David dan Sam Passi, dua penuntut lain dalam Kasus Mabo, telah melakukan hal serupa sejak tahun 1898.¹⁰⁵

Selama bertahun-tahun sejak kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Murray dan juga aneksasi wilayah Kepulauan Selat Torres ke dalam Negara Bagian Queensland, orang-orang Meriam bisa terus mempraktekkan adat-istiadat mereka. Walaupun nantinya Queensland mengeluarkan *Torres Strait Islanders Act*, penduduk Kepulauan Selat Torres masih bisa bergerak lebih bebas dibandingkan orang-orang Aboriginal yang hidup dalam wilayah reservasi. Di pengadilan, penduduk Meriam berargumentasi bahwa pengadilan lokal di Pulau Murray yang diciptakan oleh Pemerintah Queensland, ditujukan untuk melatih praktik hukum tradisional mereka. Namun Queensland membantah, pihak Queensland mengatakan bahwa pengadaan pengadilan lokal tersebut bertujuan untuk memutus mereka dengan praktik-praktik di masa lalu. “*The Meriam people’s link to land is two-sided: they both own and belong to it, a dual relation of right and responsibility.*”¹⁰⁶ (“Terdapat dua sisi dari ikatan orang-orang Meriam dengan tanah: mereka memiliki lahan tersebut, dan mereka juga bertanggung jawab akan tanah yang ditempatinya.”)

Ketika seorang pria Meriam meninggal, merupakan hal yang biasa jika ia berwasiat untuk menurunkan kepemilikan tanah miliknya ke anak lelakinya yang pertama. Menurut Stanner, ada dua konsep kepemilikan tanah Aboriginal yang keduanya dianut secara bersamaan oleh mereka. Yang pertama adalah

¹⁰⁴ Pada tahun 1950an, Marou Mimi pun sempat menjelaskan kepada seorang antropologis, Jeremy Beckett, yang sedang melakukan penelitian di Mer mengenai Hukum Malo. Beckett nantinya menjadi salah satu saksi ahli yang dipanggil ke pengadilan dalam kasus *Mabo v. Queensland* (No. 2) Menurutnya satu hal yang harus dijunjung tinggi adalah untuk tidak masuk ke tanah orang lain, “*Keep to your own path*”, (“Tetaplah berada di jalur mu sendiri”).

¹⁰⁵ Sydney Ray sendiri merupakan antropolog Cambridge yang sedang melakukan ekspedisi di Pulau Murray. Passi sendiri kemudian menuliskan mitos-mitos, adat, dan sistem kelas orang Meriam sebanyak 59 halaman dalam bahasa Meriam Mir dan juga Inggris. Dengan demikian, budaya menulis telah dikenal oleh orang Meriam sejak kedatangan *London Missionary Society* yang pada akhir abad ke-19 tersebut mendirikan Papuan Institute di Pulau Mer. Sharp, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

kepemilikan tanah melalui hubungan spiritual (*in animum*) dan kepemilikan tanah melalui hubungan material (*in rem*). Kasus Eddie Mabo, nantinya merupakan perdebatan antara kedua konsep hukum yang dianut masing-masing pihak, yaitu konsep hukum Inggris dan Hukum Malo. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Australia dikenal paling keras dalam kebijakannya terkait penduduk asli. Pengadilan di Kanada, pada tahun 1973, memenangkan tuntutan orang-orang Nishga, yang merupakan penduduk asli, dalam kasus *Calder v Attorney-General of British Columbia*. Menurut pengadilan, mereka memiliki hak secara sah dalam tanah yang diklaimnya. Kasus tersebut kemudian diikuti oleh kemenangan kasus *Hamlet of Baker Lake v Ministry of Indian Affairs and Northern Development* yang memberikan 112 orang Inuit (penduduk asli Antarktika) hak tanah yang diklaimnya, pada tahun 1978.¹⁰⁷ Oleh karena itu, banyak aktivis Aborigin di Australia yang menjalin hubungan dengan para penduduk asli dari berbagai negara seperti Kanada dan Selandia Baru. Dengan demikian, mereka bisa mempelajari kasus hukum atas klaim tanah tersebut dari kemenangan-kemenangan kasus serupa di luar negeri.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰⁸ “*Mabo: the Native Title Revolution*”, <http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/>, diakses pada 12 Februari 2015, pukul 19.39 WIB.

BAB 3

EDDIE MABO DAN KLAIM TANAH DI PULAU MURRAY

3.1. Persiapan Kasus Hukum

Pasca kedatangan mereka ke benua Australia, bangsa Inggris telah berspekulasi bahwa orang-orang Aboriginal merupakan suku pengembala yang tidak memiliki sistem hukum, agama, sosial, dan politik yang terstruktur.¹⁰⁹ Gaya hidup para penduduk asli Australia yang jauh dari standar Eropa membuat pemberian terhadap konsep *terra nullius*. Ketidakhadiran sistem hukum modern di benua tersebut juga diartikan bahwa Australia terbuka untuk pendudukan dan kolonialisasi bagi kekuatan asing manapun yang menginginkannya.¹¹⁰

Sejarawan Henry Reynolds berpendapat bahwa konsep *terra nullius* memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama adalah sebuah tempat tidak berpenghuni, sedangkan yang kedua adalah sebuah negara yang sistem pelaksanaannya tidak diakui oleh sistem hukum Eropa.¹¹¹ Orang Aboriginal yang menempati Australia tidak memiliki suatu sistem kepemimpinan yang terpusat atau seorang ketua yang dapat berbicara mewakili seluruh komunitas mereka. Orang Aboriginal biasanya hidup mengikuti sistem yang didasarkan dari pandangan ketua adat mereka. Inilah yang kemudian mendasari Inggris melakukan klaim dan menyatakan bahwa benua Australia adalah *terra nullius*.

Adapun kasus hukum mengenai tuntutan *land rights* pertama yang diajukan oleh orang Aboriginal adalah pada tahun 1970. Saat itu, orang-orang Yolngu, klan Aboriginal yang tinggal di Gove Peninsula, Arnhem Land, Northern Territory, menuntut Perusahaan Nabalco Pty. Ltd. ke Pengadilan Negara Bagian Northern Territory.¹¹² Tuntutan tersebut mereka ajukan agar Perusahaan Nabalco berhenti menambang bauksit di wilayah reservasi mereka. Kasus yang kemudian dikenal dengan nama *Milirrpum v. Nabalco* ini kalah di pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Blackburn. Hakim Blackburn menyatakan bahwa orang-orang Aboriginal Yolngu mengembangkan hubungan yang berbeda dengan tanah yang

¹⁰⁹ Lewis P. Hinchman dan Sandra K. Hinchman, "Australia's Judicial Revolution: Aboriginal Land Rights and the Transformation of Liberalism", *Polity*, Vol. 31, hlm. 26.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 34.

mereka klaim tersebut. Suku atau klan Aborigin secara fundamental terikat dalam hubungan religius dengan tanah, tetapi mereka tidak membentuk suatu unit kohesif yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap lahan tersebut.¹¹³ Tentu jika dilihat melalui konsep itu, perusahaan-perusahaan tambang memiliki posisi yang lebih menguntungkan di pengadilan karena besarnya kepentingan ekonomi yang mereka miliki di tanah tersebut.

Dua belas tahun setelah Kasus Yirrkala diajukan ke *Supreme Court of Northern Territory*, Eddie Mabo, seorang penduduk Kepulauan Selat Torres, mengajukan tuntutan atas tanah leluhurnya di Pulau Murray pada tahun 1982. Setelah perbincangannya dengan Profesor Henry Reynolds dan Noel Loos dari James Cook University mengenai kepemilikan legalnya atas tanah di Pulau Murray, Mabo sepakat untuk membawa tuntutan tersebut ke *High Court of Australia*. Selama hidupnya di Pulau Murray, Eddie Mabo tumbuh sedikit berbeda dengan orang-orang Meriam kebanyakan. Ia paham betul pentingnya penggunaan bahasa Inggris dan pengenalan budaya Eropa ke dalam kehidupannya di masa depan. Karena hukuman yang diberikan ketua adat kepadanya untuk meninggalkan Pulau Murray, Mabo kemudian bekerja sebagai awak kapal pada tahun 1957, dengan upah sebesar 17 pound sterling per bulannya.¹¹⁴ Dua belas bulan kemudian Mabo memutuskan untuk pindah ke *mainland* Australia dan menjadi buruh pada pembangunan rel kereta di Townsville, Queensland. Dari sinilah Mabo memulai karier politiknya. Melihat kondisi rekan-rekan kerjanya, Mabo semakin menyadari perlakuan diskriminatif yang diterima para penduduk asli yang bekerja sebagai buruh. Mabo mulai aktif dalam serikat-serikat buruh yang beranggotakan penduduk asli Australia. Semangat ini sejalan dengan semangat pergerakan yang sedang diperjuangkan oleh Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat.

Pada tanggal 10 Oktober 1959, Eddie Mabo menikahi seorang gadis Aborigin bernama Bonita yang akrab disapa dengan nama Netta (lihat Lampiran 17). Bersama Bonita, Mabo memiliki sepuluh putra dan putri. Masa-masa tersebut merupakan periode yang sangat sulit bagi hidup Mabo. Pegawai *Harbour Board* tempatnya bekerja, melihat Mabo sebagai seorang komunis. Namun menurutnya,

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 35.

¹¹⁴ Loos dan Mabo, *op.cit.*, hlm. 43.

menjadi orang kulit hitam saat itu, memang identik dengan menjadi komunis. Karena kebutuhan keluarganya yang meningkat dan gajinya yang sangat kecil, Mabo memutuskan untuk pindah hingga kemudian ia bekerja sebagai tukang kebun di James Cook University. Dalam periode itu juga Mabo aktif dalam organisasi-organisasi Aboriginal, seperti menjadi sekretaris untuk *Aboriginal Advancement League*. Ketika Gough Whitlam naik menjadi Perdana Menteri Australia, organisasi yang telah berganti nama menjadi *Advancement League to Council for Aboriginal Rights* ini menerima bantuan dana sebesar 3000 pound sterling dari Pemerintah.¹¹⁵

Tekad Mabo untuk menyejahterakan penduduk asli serta kepeduliannya terhadap dunia pendidikan anak-anak mereka, membuat Eddie dan Bonita Mabo mendirikan *Black Community School* yang diperuntukkan bagi anak-anak berkulit hitam, pada tahun 1973.¹¹⁶ Sekolah ini merupakan sekolah independen pertama di *mainland* Australia yang didedikasikan khusus untuk anak-anak Aboriginal. Pada tahun 1977, laporan dari *National Aboriginal Education Committee* menyatakan *Black Community School* sebagai sesuatu yang “menyegarkan” di dalam komunitas masyarakat Australia. Walaupun demikian, dari tahun 1977 hingga tahun 1978, Mabo hanya menerima gaji sebesar \$25.95 setiap tahunnya.¹¹⁷

Menurut keterangan Bonita, Mabo harus melakukan perjalanan ke Sydney, Melbourne, dan juga Brisbane untuk bertemu dengan orang-orang yang tertarik untuk membantunya mengajukan tuntutan ke *High Court*.¹¹⁸ Selama berhari-hari, Mabo menghabiskan waktunya di kereta untuk menemui para pengacara di berbagai wilayah di Australia karena kondisi keuangan Mabo tidak memungkinkannya untuk melakukan perjalanan melalui udara. Setelah pertemuannya dengan Profesor Henry Reynolds serta Noel Loos, dan menjadi salah satu pembicara dalam *Land Rights and the Future Race Relations Conference* pada Agustus 1981, Mabo banyak mendapatkan dukungan dari para aktivis yang gencar menyuarakan isu *land rights* di Australia. Tim Mabo saat itu terdiri dari H. C. Coombs, Garth Nettheim, *Reverend* (Pendeta) Dave Passi, Nonie

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50-51.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

¹¹⁷ Richard Gulliatt, “The Man Who Changed Australia”, *Sydney Morning Herald*, 22 Agustus 1997, hlm. 8.

¹¹⁸ Roberta Sykes, “The Other Side of Mabo”, *The Age*, 8 Juni 1995, hlm. 13.

Sharp, Phillip Mills, dan Flo Kennedy yang turut datang di konferensi tersebut.¹¹⁹ Selain *Reverend* Dave Passi yang akan ikut menemani Mabo untuk menjadi penuntut di *High Court*, anggota tim lainnya merupakan akademisi, politisi, dan juga aktivis yang peduli terhadap penduduk asli Australia.¹²⁰ Di tahap ini pula mereka mendengar berita bahwa Pemerintah Queensland akan merevisi *Torres Strait Islanders Act* (1971-1979) dengan tujuan untuk mengubah batas kontrak sewa tanah oleh penduduk asli hingga menjadi 50 tahun saja.¹²¹ Dengan kata lain, jika kebijakan tersebut direvisi oleh Pemerintah Queensland, maka para penduduk Kepulauan Selat Torres wajib memperbarui ijin tinggal di atas tanah yang mereka tempati selama puluhan generasi, setiap 50 tahun sekali. Tentu saja ini konsep yang sangat asing bagi para penduduk pulau yang meyakini bahwa tanah di Kepulauan Selat Torres secara utuh adalah milik mereka.

Pada bulan September hingga November 1981, tim Mabo semakin diperkuat dengan kehadiran Gregory McIntyre, Barbara Hocking, Ron Castan, dan Bryan Keon-Cohen, para pengacara yang akan mewakili Eddie Mabo dan para penuntut (*plaintiffs*) Meriam lainnya selama proses peradilan (lihat Lampiran 19, Lampiran 20, dan Lampiran 21). Kehadiran mereka membuat Mabo bisa membentuk sebuah tim pengacaranya sendiri yang khusus untuk mempersiapkan berkas-berkas legal atas tuntutannya. Menurut Barbara Hocking, rencana mereka untuk mengajukan gugatan tidak boleh terdengar oleh Pemerintah Queensland setidaknya hingga *writ* atau dokumen legal atas tuntutan mereka telah dikeluarkan. Pada tanggal 20 Mei 1982, tuntutan Mabo tersebut resmi masuk ke *High Court of Australia* dengan nama *Eddie Mabo and Others v. the State of Queensland and the Commonwealth of Australia* (1982). Sebagai penuntut dalam kasus tersebut, Eddie Mabo ditemani oleh Celuia Salee dari klan Piadram, *Reverend* Dave dan Sam Passi dari klan Dauar, dan James Rice yang saat itu menjabat sebagai Ketua *Murray Island Council*.¹²² Para penuntut tersebut

¹¹⁹ H. C. Coombs sendiri merupakan mantan ketua dari *Council for Aboriginal Affairs*, sedangkan Nonie Sharp adalah seorang antropolog ahli yang telah lama menghabiskan waktunya untuk meneliti Penduduk Kepulauan Selat Torres.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

¹²¹ Sharp, *op.cit.*, hlm. 23-24.

¹²² *Murray Islands Council* ini hadir pasca peristiwa pemogokan yang dilakukan oleh para buruh pencari mutiara, yang merupakan penduduk pulau, terhadap Pemerintah Queensland pada tahun 1936. Untuk meredakan amarah para penduduk pulau, Pemerintah Queensland sepakat untuk

menginginkan hak kepemilikan legal atas tanah masing-masing yang telah diwariskan dari generasi ke generasi kepada mereka. Walaupun tuntutan tersebut bersifat pribadi, status para penuntut yang datang dari berbagai klan menunjukkan bahwa mereka juga mewakili kepentingan bersama.

Tim pengacara Mabo mengklaim bahwa orang-orang Meriam merupakan pemilik sah dari Pulau Murray dan Pemerintah Queensland tidak memiliki otoritas untuk merebut hak tersebut. Klaim ini didasari oleh ketiadaan kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Persemakmuran ataupun Pemerintah Negara Bagian Queensland terkait penghapusan hak tradisional orang-orang Meriam.¹²³ Berbeda dengan kasus Yirrkala di Northern Territory, pihak hakim tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang Meriam tidak memiliki hubungan ekonomi dengan tanah yang dituntut. Menurut catatan sejarah orang-orang pekerjaan orang-orang Meriam adalah berkebun dan bercocok tanam, bukan sebagai pengumpul dan peramu (*hunter-gatherer*) seperti orang-orang Aboriginal di daratan utama Australia.¹²⁴ Oleh karena itu, Pengadilan tidak bisa lagi menggunakan dikotomi hubungan religius ataupun ekonomi dalam kasus Mabo ini.

3.2. Proses Peradilan

Tuntutan dasar dari orang-orang Meriam adalah untuk mendapatkan hak legal atas tanah mereka di Pulau Murray. Selain itu, tuntutan diajukan agar mereka memiliki kebebasan dalam mengolah atau menikmati kepemilikan tanah dan kebebasan untuk mempraktikkan hukum adat di tanah tersebut. Menjawab tuntutan yang diajukan orang-orang Meriam ke *High Court*, pada 16 Agustus 1982, Pemerintah Queensland mengeluarkan pernyataan melalui *affidavit*¹²⁵ oleh

mendirikan suatu dewan yang berasal dari penduduk pulau dan dipilih oleh penduduk pulau. Mereka bertanggung jawab atas masalah persediaan air bersih, jalan umum, perumahan, dan juga acara-acara komunitas dalam “Torres Strait Timeline”, http://iaha.com.au/wp-content/uploads/2013/03/000209_tsihistorictimelines.pdf, diakses pada 1 April 2015, pukul 19.01 WIB.

¹²³ “High Court of Australia, Mabo v Queensland (No 2) (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Sworn written statement used as evidence.* (Sumpah pernyataan tertulis yang digunakan sebagai bukti). “Affidavit”, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition*, 8th ed, CD-ROM, (Oxford: Oxford University Press, 2010).

PJ Killoran yang menjabat sebagai Ketua dari *Queensland Department of Aboriginal and Islander Advancement* sebagai agumen pembelaan mereka yang pertama. PJ Killoran mendukung kesaksiannya dengan menyertakan dokumen tertanggal 1 Oktober 1985, saat Queensland masih berstatus koloni.¹²⁶ Tertulis dalam dokumen itu bahwa Pemerintah Koloni Queensland menyebut orang-orang Aboriginal sangat “. . . berbahaya dan menakutkan, namun sekarang mereka tidak berbahaya dan sangat bersahabat”. PJ Killoran menyatakan hal itu didasarkan oleh fakta bahwa penduduk Pulau Murray telah menerima agama Kristen dan pengaruh asing lainnya.¹²⁷ PJ Killoran juga menambahkan bahwa masuknya penduduk Pulau Murray ke dalam agama Kristen dalam periode ‘*The Coming of The Light*’ membuat mereka telah menolak kepercayaan serta hukum adat mereka. Dengan kata lain, tuntutan Eddie Mabo dan para penuntut lainnya tersebut tidak beralasan.

Pada tahun 1870, Queensland yang baru saja memisahkan diri dari Koloni New South Wales di tahun 1859, mengajukan proposal kepada Kerajaan Inggris untuk memperluas wilayah maritim mereka ke utara Cape York guna menguasai Kepulauan Selat Torres. Menurut Queensland, wilayah perairan yang strategis tersebut harus cepat dikuasai untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh individu ataupun kelompok lain. Akhirnya pada 10 Oktober 1878, Ratu Victoria mengesahkan kembali *Letters Patent* yang isinya meratifikasi wilayah perairan Queensland dan aneksasi pulau-pulau yang terletak di Selat Torres untuk masuk ke dalam teritori Kerajaan Inggris. *Letters Patent* pertama kali dikeluarkan oleh Ratu Victoria pada 6 Juni 1859 dan mengatur tentang pembentukan Koloni Queensland yang terpisah dengan Koloni New South Wales. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1879, setelah perratifikasi *Letters Patent* oleh Ratu Victoria, melalui *Queensland Coast Island Act* (1879), Gubernur Queensland memproklamirkan bahwa Kepulauan Selat Torres “. . . shall be annexed to and become part of the Colony of Queensland”, telah dianeksasi dan menjadi bagian dari Koloni Queensland.¹²⁸

¹²⁶ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Argumentasi Pemerintah Queensland terkait tuntutan orang-orang Meriam tersebut adalah bahwa hukum Inggris secara langsung berlaku pada setiap teritorinya, termasuk Pulau Murray. Oleh karena itu, pasca aneksasi, Kerajaan Inggris menjadi pemilik absolut atas semua tanah sehingga tidak ada lagi individu atau kelompok yang bisa menuntut bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Hukum Inggris pun menyatakan jika sebuah koloni telah didirikan, maka hukum Inggris secara otomatis diterapkan ke seluruh wilayah koloni. Hukum ini nantinya bisa berubah jika koloni-koloni tersebut telah memiliki aturannya sendiri.¹²⁹

Proses *hearing* atau dengar pendapat dari kasus *Mabo and Others v. the State of Queensland and the Commonwealth of Australia* tersebut dimulai pada bulan Oktober 1982 dan dipimpin oleh Hakim Deane. Hakim Deane, pada 27 November 1982, memutuskan bahwa kasus tersebut bisa terus diproses jika pihak penuntut bisa menyediakan fakta yang mendukung tuntutan mereka. Pada tanggal 19 Desember 1984, pihak penuntut berhasil menyediakan dokumen legal sebanyak empat volume yang berisi deklarasi tuntutan hingga dokumen-dokumen lainnya yang mendukung tuntutan mereka. *High Court* memberikan kesempatan bagi Queensland untuk mengajukan bantahannya pada 5 Februari 1985. Dalam proses *hearing* tersebut, Queensland menyatakan bahwa hak tradisional apapun yang dituntut oleh para penuntut Meriam telah terharsuskan semenjak Kerajaan Inggris menganeksai Pulau Murray. Menurut mereka, dengan masuknya hukum Inggris dan pengaruh Queensland ke pulau tersebut, maka dengan sendirinya hak penduduk asli telah hilang.¹³⁰

3.2.1. Perdebatan Antara Mabo dan Pemerintah Queensland

Australia memiliki tujuh Parlemen yaitu satu Parlemen Persemakmuran dan enam Parlemen lainnya yang mewakili semua Negara Bagian dan Wilayah Teritorial di Australia. Parlemen Persemakmuran hanya bisa membuat hukum atau peraturan yang berkaitan dengan masalah Konstitusi Australia sedangkan Parlemen Negara Bagian bisa membuat peraturan mengenai apapun. Walaupun demikian, hukum yang ditetapkan oleh Parlemen Negara Bagian hanya bisa diberlakukan di wilayah Negara Bagian yang mengeluarkannya. Apabila terjadi

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

bentrokan antara hukum yang dikeluarkan Parlemen Persemakmuran dengan hukum yang dikeluarkan oleh Parlemen Negara Bagian, status hukum Parlemen Persemakmuran berada di atas Parlemen Negara Bagian. Hal ini diatur dalam Pasal 109 Konstitusi Australia yang berbunyi, “*When a law of State is inconsistent with the law of the Commonwealth, the latter shall prevail and the former shall, to the extent of the inconsistency, be invalid*”.¹³¹ Dapat diartikan jika hukum Negara Bagian tidak konsisten dengan hukum Persemakmuran, maka hukum Negara Bagian tersebut bisa dinyatakan tidak berlaku.

Inilah yang kemudian mendasari argumentasi pihak penuntut ketika Pemerintah Negara Bagian Queensland mengeluarkan *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985). Parlemen Negara Bagian Queensland secara cepat mengeluarkan dan mengesahkan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan tuntutan serta argumentasi para penuntut Meriam di *High Court*. Melalui undang-undang tersebut, Queensland bermaksud untuk menyatakan bahwa tidak ada hak tradisional yang bertahan setelah aneksasi Pulau Murray oleh Kerajaan Inggris di tahun 1879. Undang-undang ini juga mewajibkan *Island Council* untuk memberikan daftar tanah di Pulau Murray untuk nantinya disewakan oleh Pemerintah Queensland ke orang-orang yang memiliki kualifikasi.¹³²

Pada 27 Februari 1986, *High Court* memutuskan bahwa kasus Mabo tersebut harus dibawa ke *remitter court*¹³³, pengadilan di Negara Bagian Queensland.¹³⁴ Hal ini ditujukan agar para penduduk Pulau Murray bisa memberikan kesaksian mereka dengan lebih mendalam. Dalam *remitter court* tersebut, Hakim Moynihan ditunjuk dan ditugaskan untuk meneliti bukti-bukti yang diserahkan penuntut dan terdakwa serta mendengarkan kesaksian dari orang-orang Meriam dan pihak Queensland. *Senior Counsel* (Penasihat Senior) Ron Castan, yang merupakan pengacara penuntut, membuka sidang di *Supreme Court*

¹³¹ Colin Howard, “Chapter One: the Racial Discrimination Act 1975 and Mabo”, <http://www.samuelgriffith.org.au/papers/html/volume3/v3chap1.htm>, diakses pada 2 Maret 2015, pukul 13.02 WIB, hlm. 2.

¹³² Sharp., *op.cit.*, hlm. 32.

¹³³ *To refer (a case) to another court for further consideration or action.* (Untuk mereferensikan sebuah kasus ke pengadilan lain dalam langkah untuk mengambil tindak lanjut yang lebih mendalam) dalam “*Remitter Court*”, <http://www.thefreedictionary.com/remitter>, diakses pada 1 April 2015, pukul 9.05 WIB.

¹³⁴ Sharp., *op.cit.*, hlm. 35.

of Queensland di Brisbane pada 5 Oktober 1986. Pada tahap ini, mulai terdengar isu bahwa *Reverend* Dave dan Sam Passi ingin keluar dari kasus tersebut dikarenakan tekanannya yang terlalu besar. Celuia Mapo Salee, sebagai penuntut Meriam lainnya pun telah meninggal dunia. Agar tuntutan milik Celuia Mapo Salee bisa terus diperjuangkan, Eddie Mabo mengambil alih tuntutan tersebut.¹³⁵ Sehingga pada tahap ini hanya Eddie Mabo dan James Rice yang menjadi penuntut dalam perjuangan menentang Pemerintah Negara Bagian Queensland dan Pemerintah Persemakmuran.

Proses dengar pendapat di Brisbane dimulai dari tanggal 13 hingga tanggal 17 Oktober 1986. Di depan Hakim Moynihan, Mabo membuka sidang dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebanyak 65 halaman yang berisikan tuntutan serta argumentasinya. Isi dari pernyataan tersebut adalah mengenai tanah bagian Mabo yang ia warisi dari ayahnya serta batas-batas jaring ikan milik keluarga Mabo di laut (lihat Lampiran 16). Dalam kesempatan tersebut, Mabo, dalam Bahasa Inggris yang sangat lancar, memberi kesaksian mengenai cerita kakeknya ketika ia dan orang-orang Meriam lainnya diancam dibunuh oleh para misionaris jika mereka masih mempraktikkan upacara-upacara adat. Oleh karena itu, menurut Mabo, upacara adat terakhir yang dilakukan oleh kakeknya adalah di tahun 1922.¹³⁶

Selain Mabo, tim pengacara penuntut juga telah menyiapkan 20 saksi Meriam lainnya untuk menyampaikan kesaksian mereka di *Supreme Court of Queensland*. Selama proses pemeriksaan tersebut, 289 keberatan diajukan oleh pihak Queensland atas kesaksian lisan yang diberikan para saksi. Menurut pihak Queensland kesaksian lisan atau *oral testimony*, kesaksian lisan, tersebut masih harus dipertanyakan keabsahannya. Dari semua saksi Meriam yang dipersiapkan oleh pihak penuntut, 80% di antaranya ditolak oleh pihak Queensland dan dipertanyakan kredibilitasnya. Pihak terdakwa Queensland berargumen bahwa kesaksian pihak penuntut tidak didasarkan atas fakta melainkan hanya ‘*hearsay*’ atau rumor belaka saja.¹³⁷

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm .70.

Sam Passi, salah satu penuntut Meriam pada kesaksiannya mengatakan, *“If you want to be a real Murray Islander you follow Malo’s Law.”*¹³⁸ (“Jika anda ingin menjadi Penduduk Murray sejati anda harus mengikuti Hukum Malo.”) Sam Passi mengatakan dia sudah tidak memuja Malo sebagai dewa karena ia telah menganut agama Kristen, namun ajaran dan hukum Malo diakui masih ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh para saksi lainnya sehingga Hakim Moynihan pada laporannya menyatakan:

*“The witnesses will recount how they came to know Malo’s Law, its content and what it required them to do, their obligations particularly in relation to land. They will recount how they wish to deal with land which they see as belonging to them: the means by which they claim to own certain lands, how they came to know about them and how they came to be the owners.”*¹³⁹

(“Para saksi akan menjelaskan bagaimana mereka mengenal Hukum Malo, ajarannya dan apa yang harus mereka lakukan, juga bagaimana kewajiban mereka terhadap tanah. Mereka akan menjelaskan bagaimana harapan mereka atas tanah yang seharusnya menjadi milik mereka: bagaimana mereka mengklaim tanah tersebut, serta bagaimana mereka bisa menjadi pemilik dari tanah tersebut.”)

Melihat hal tersebut pihak Queensland kembali berargumen bahwa hukum Malo yang mereka sebut-sebut tersebut telah hilang seiring masuknya orang-orang Meriam ke dalam agama Kristen. Tetapi pihak penuntut menegaskan bahwa mereka mempraktikkan agama Kristen seiring dengan Hukum Malo.¹⁴⁰ Mr. Byrne, Penasihat Senior dari pihak Queensland menyatakan keberatannya di depan Hakim Moynihan:

*“I object the evidence, Your Honour. There are two distincts aspects of it: the first is the assertion that the gentleman to whom we reference is being made is Mr Mabo’s grandfather. I object to that on the basis that it is hearsay: . . . the evidence must also be hearsay.”*¹⁴¹

(“Saya menyatakan keberatan, Yang Mulia. Terdapat dua aspek dalam hal ini: yang pertama adalah fakta bahwa orang yang kita jadikan referensi adalah kakek dari Mr Mabo. Saya keberatan dan menyatakan hal tersebut hanyalah sebatas rumor belaka: . . . bukti-bukti yang disediakan pun hanyalah rumor belaka.”)

Jelas terlihat bagaimana pihak Queensland berusaha menjatuhkan kredibilitas orang-orang Meriam yang datang menjadi saksi di *Supreme Court of Queensland*. Banyak di antara mereka yang hanya paham bahasa Inggris sehari-hari sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memahami pertanyaan-

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 112.

pertanyaan dari hakim dan juri. Menurut pihak Queensland, tradisi lisan yang disampaikan oleh para saksi dari pihak penuntut hanyalah rumor belaka dan tidak bisa dijadikan bukti. Sedangkan dari sudut pandang penuntut, tradisi lisan merupakan inti dan hal yang sangat mendasar dari kebudayaan orang-orang Meriam. Sejak abad ke-17, hukum Inggris telah mengecualikan ‘*hearsay*’ dari sistem hukum legal Inggris sehingga pihak Queensland berusaha melakukan hal yang serupa.¹⁴²

Para saksi Meriam menginginkan proses *hearing* untuk berlangsung di *High Court* di Canberra, namun Gregory McIntyre, pengacara pihak penuntut, menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan. Kesaksian yang diberikan oleh orang-orang Meriam sangat penting bagi pihak penuntut, namun hal ini tidak bisa dilakukan di *High Court of Australia*. Pada tanggal 27 Maret 1987, pihak Mabo mendapatkan kabar bahwa *the Office of Legal Aid Administration* dari *Attorney-General’s Department* di Canberra tidak akan menyediakan dana lagi bagi mereka. *Attorney-General’s Department* telah memberikan dana sebanyak AUS\$200,000 kepada pihak penuntut.¹⁴³ Jika Queensland terus menolak kredibilitas saksi yang diajukan oleh pihak penuntut, maka pihak penuntut terancam tidak memiliki dana untuk menerbangkan saksi lainnya dari Pulau Murray.

Menurut bukti-bukti yang ditemukan oleh Hakim Moynihan dalam proses *hearing* di *Supreme Court of Queensland*, dapat dinyatakan bahwa orang-orang Meriam memiliki kehidupan yang bersifat komunal¹⁴⁴ dari generasi ke generasi. Berkebun dan bercocok tanam telah menjadi aktivitas utama penduduk Meriam bahkan jauh sebelum adanya kontak dengan bangsa Eropa. Pernikahan dan sistem adopsi memegang peranan besar dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dengan adanya penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁴⁴ *Shared or used by members of a group or community*. Dibagi atau digunakan oleh anggota kelompok dari sebuah kelompok atau komunitas dalam “*Comunal*”, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/communal>, diakses pada 1 April 2015, pukul 19.15 WIB.

Meriam diatur oleh sistem adat bukan sebuah sistem hukum legal seperti yang dimiliki oleh bangsa Eropa.¹⁴⁵

Status Eddie Mabo yang merupakan anak adopsi dari Benny dan Maiga Mabo pun dipertanyakan oleh pihak Queensland. Menurut pihak Queensland, budaya adopsi di Pulau Murray tidak sah secara birokratis. Hal ini telah dinyatakan melalui *Torres Strait Islanders Act* (1965) yang menyebutkan bahwa setiap praktik adopsi yang dilakukan oleh penduduk pulau harus didaftarkan secara sah dan memerlukan registrasi.¹⁴⁶ Tetapi yang menjadi masalah adalah, 24 orang Meriam yang menjadi saksi di Pengadilan Negara Bagian tersebut telah menjadi orang dewasa ketika peraturan tersebut dikeluarkan sehingga mereka sudah terlambat bila ingin melakukan registrasi. Namun ketika status Mabo dipertanyakan oleh pihak Queensland, semua saksi Meriam memberikan pernyataan yang kuat dan tidak meragukan bahwa Eddie Mabo adalah anak dan pewaris sah dari keluarga Mabo.

Pada 3 April 1987, menjawab tuntutan para penuntut Meriam yang mempertanyakan keabsahan *Queensland Coast Island Declaratory Act* (1985), *High Court* setuju untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Proses pemeriksaan mengenai undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah Negara Bagian Queensland itu sendiri baru dimulai pada tanggal 15 Maret 1988.¹⁴⁷ Hakim Ketua Mason memimpin jalannya persidangan di *High Court of Australia* tersebut bersama Hakim Wilson, Hakim Brennan, Hakim Deane, Hakim Dawson, Hakim Toohey, dan Hakim Gaudron.¹⁴⁸

Adapun agenda utama dari *High Court of Australia* saat itu adalah untuk membahas *demurrer* atau keberatan yang diajukan para penuntut Meriam terkait kebijakan baru Queensland tersebut. Menurut pihak pengacara para penuntut, Pemerintah Negara Bagian tidak memiliki kekuatan yudisial untuk menghapus

¹⁴⁵ "High Court of Australia, Mabo v Queensland (1988) HCA 69; (1989) 166 CLR 186 (8 December 1988)", <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1988/69.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.10 WIB.

¹⁴⁶ Sharp, *op.cit.*, hlm. 76.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁴⁸ "High Court of Australia, Mabo v Queensland (1988) HCA 69; (1989) 166 CLR 186 (8 December 1988)", <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1988/69.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.10 WIB.

hak tradisional para penduduk pulau.¹⁴⁹ Hal fundamental yang mendasari tuntutan orang-orang Meriam kali ini adalah pasal *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985), yang menyatakan, “*It has the effect that those rights which might otherwise have survived annexation in 1879 are deemed not to have survived and, for the purposes of 1985, never to have survived.*” Para penuntut Meriam menolak pernyataan undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa hak tradisional apapun yang selamat dari aneksasi 1879, akan dihapuskan seluruhnya. Menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 dari *Racial Discrimination Act* (1975) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Persemakmuran. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Section 9 Racial Discrimination Act 1975:

- 1) *It is unlawful for a person to do any act involving a distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise, on an equal footing, of any human right or fundamental freedom in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.*
...

Section 10 Racial Discrimination Act 1975:

- 1) *If, by reason of, or of a provision of, a law of the Commonwealth or of a State or Territory, persons of a particular race, colour or national or ethnic origin do not enjoy a right that is enjoyed by persons of another race, colour or national or ethnic origin, or enjoy a right to a more limited extent than persons of another race, colour or national or ethnic origin, then, notwithstanding anything in that law, persons of the first-mentioned race, colour or national or ethnic origin shall, by force of this section, enjoy that right to the same extent as persons of that other race, colour or national or ethnic origin.*
...

(Pasal 9 *Racial Discrimination Act* (1975):

- 1) Dinyatakan melanggar hukum bila seseorang melakukan pengistimewaan, pengecualian, pelarangan, dan preferensi yang didasarkan atas ras, warna kulit, keturunan atau suku bangsa atau etnis yang memiliki tujuan untuk menghapuskan pengakuan, kenikmatan, atau praktik berdasarkan kesetaraan dari hak asasi manusia atau kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan publik.
...

Pasal *Racial Discrimination Act* (1975):

- 1) Jika, dengan alasan apapun atau ketentuan hukum dari Persemakmuran atau Negara Bagian atau Teritorial, orang-orang dari ras, warna kulit atau suku bangsa atau etnis tertentu tidak menikmati hak sama yang dinikmati oleh orang-orang dari ras, warna kulit atau suku bangsa atau etnis atau menikmati hak tapi dalam skala yang dibatasi, maka kendati apapun dalam hukum tersebut, maka harus mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang dari ras, warna kulit atau suku bangsa atau etnis lainnya.
...)

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

Dapat dilihat lebih lanjut jika memang hak tradisional orang-orang Meriam dihapuskan tanpa adanya kompensasi, maka mereka menerima diskriminasi dan tidak menikmati hal yang sama dengan penduduk Queensland lainnya. Oleh karena itu, pihak Queensland dapat dikatakan telah melanggar *Racial Discrimination Act* (1975) dengan mengeluarkan *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985). Namun pihak Queensland berargumen jika mereka mengakui hak tradisional penduduk asli, maka nantinya orang-orang Eropa yang merupakan pendatang tidak bisa menikmati hak yang sama dengan para penduduk asli tersebut. Dan jika diteliti lebih lanjut, hal itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk dari diskriminasi ras.¹⁵¹ Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1988, *High Court of Australia* yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mason, memutuskan bahwa *Queensland Coast Island Declaratory Act* (1985) inkonsisten dengan *Racial Discrimination Act* (1975) dan tidak bisa diberlakukan. Adapun *demurrer* atau keberatan yang diajukan oleh pihak penuntut Meriam terhadap kebijakan Queensland tersebut diizinkan oleh *High Court of Australia* (lihat Lampiran 18.1 dan Lampiran 18.2). Keputusan *High Court of Australia* mengenai status *Queensland Coast Island Declaratory Act* (1985) tersebut sering disebut sebagai *Mabo No. 1* (1988).

Selanjutnya, *Supreme Court of Queensland* kembali melanjutkan proses *hearing* pada bulan Mei 1989. Proses tersebut dilaksanakan di aula publik di Desa Umar, Pulau Murray (lihat Lampiran 22). Hal ini sangatlah tidak biasa, namun mengingat kurangnya anggaran untuk menerangkan saksi dari Pulau Murray, akhirnya *Supreme Court of Queensland* menggelar proses sidang di sana. Pengadilan juga diselenggarakan di Thursday Island untuk kemudian dilanjutkan di Brisbane pada akhir tahun 1989.¹⁵² Selain untuk proses pemeriksaan, anggota pengadilan beserta Hakim Moynihan datang ke Pulau Murray untuk menginspeksi tanah yang diklaim para penuntut Meriam. Tidak diragukan juga bahwa mereka ingin melihat keakuratan klaim yang diajukan oleh penuntut seperti luas, batas tanah serta letak jaring ikan milik tiap keluarga di laut.

Mengacu kepada proses pemeriksaan tersebut, Eddie Mabo dan James Rice menyelesaikan pemberian pernyataannya sebagai penuntut. Pada sidang ini,

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sharp, *op.cit.*, hlm. 115.

Reverend Dave Passi masuk kembali ke dalam tim sebagai penuntut dan Sam Passi menjadi saksi untuk pihak penuntut. Di sisi lain, Queensland memanggil enam saksi ahli non-Meriam untuk proses *hearing* seperti ahli genealogi, ahli biologi kelautan, dan antropolog. Salah satu dari keenam saksi ahli tersebut adalah PJ Killoran yang saat itu berstatus mantan ketua dari *Queensland Director of the Department of Aboriginal and Islanders Advancement*. Para penuntut mengajukan keberatan dan mempertanyakan kredibilitas PJ Killoran sebagai saksi ahli dalam sidang tersebut. Dalam kesaksiannya, PJ Killoran kembali menyatakan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Murray tidak dipungkiri telah mengubah cara hidup tradisional orang-orang Meriam. Menurutnya, segala hukum adat yang dipraktikkan oleh para penduduk pulau hanyalah kepercayaan biasa seperti kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Australia pada umumnya. Dengan mempraktikkan kepercayaan tersebut, menurutnya tidak berarti bahwa hak tradisional atau *native title* orang-orang Meriam berhasil selamat pasca aneksasi oleh Kerajaan Inggris.¹⁵³

Pada tanggal 16 November 1990, Hakim Moynihan menyampaikan tiga volume dari hasil temuannya selama proses *hearing* di *Supreme Court of Queensland*. Temuannya tersebut dinamakan *Determination of Issues of Facts* dan terdiri dari 227 halaman. Temuan Hakim Moynihan ini berasal dari hasil transkrip sidang di Brisbane, Pulau Murray, dan Thursday Island; pernyataan saksi dan pembelaan yang berjumlah sebanyak 3.489 halaman. Sebelum berkas kembali dilimpahkan ke *High Court of Australia*, *Supreme Court of Queensland* yang dipimpin oleh Hakim Moynihan tersebut menolak klaim Mabo.¹⁵⁴ Menurut Hakim Moynihan dalam kesimpulan yang dibacakannya, “*Before you can have a private right there has got to be a system which recognises such rights and such a system is a system of appropriate general rights.*”¹⁵⁵ Moynihan tersebut mengatakan kepada pihak penuntut bahwa sebelum meminta pengakuan atas hak pribadi mereka, seharusnya ada sistem yang bisa menaungi dan mengakui hak mereka secara umum.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

Menurut kesaksian Nonie Sharp yang memberitahukan kabar itu kepada Mabo, Mabo berkata bahwa ia akan keluar dari kasus tersebut.¹⁵⁶ Pernyataannya itu jelas menggambarkan emosinya ketika ia harus terpaksa mengakui usahanya selama hampir sepuluh tahun belakangan tersebut akan berakhir sia-sia. 14 bulan kemudian, pada tanggal 21 Januari 1992, lima bulan sebelum *High Court of Australia* memberikan keputusan akhir bagi kasus tersebut, Eddie Mabo meninggal dunia karena sakit kanker yang telah lama diidapnya.

3.2.2. Kasus Mabo di *High Court of Australia*

Setelah melalui *remitter court* di *Supreme Court of Queensland*, kasus Mabo ini kembali dilanjutkan di *High Court of Australia* diawali dengan proses dengar pendapat di Canberra dari tanggal 28 hingga 31 Maret 1991. Proses peradilan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua (*Sir*) Anthony Mason dan didampingi oleh keenam hakim lainnya yaitu Hakim (*Sir*) Gerard Brennan, Hakim (*Sir*) William Deane, Hakim (*Sir*) Daryl Dawson, Hakim John Toohey, Hakim Mary Gaudron, dan Hakim Michael McHugh.¹⁵⁷

Di *High Court of Australia* yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mason, Hakim Moynihan memberi keterangan bahwa kasus Mabo ini sangat berbeda dengan kasus Yirrkala di Northern Territory. “*I am . . . dealing with a very different society and very different relationships and attitudes towards land*”. (“Saya . . . berurusan dengan kelompok masyarakat yang sangat berbeda dan jenis hubungan dan sikap yang berbeda dengan tanah.”) Ia juga menyatakan bahwa Pulau Murray adalah rumah dari suatu penduduk yang dinamis. Menurutnya, setelah mendengarkan banyak saksi Meriam di *Supreme Court of Queensland*, Hukum Malo adalah manifestasi dari perilaku sosial yang telah tertaman secara mendalam dalam kebudayaan Meriam.¹⁵⁸

Di *High Court of Australia*, para penuntut Meriam yaitu Eddie Mabo, James Rice, dan *Reverend* Dave Passi, mendasarkan tuntutannya atas dua hal. Yang pertama, hak tradisional atau *traditional title* (juga dikenal dengan istilah *common law* atau *native title*) yang dinikmati oleh nenek moyang orang-orang

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁵⁷ Craig McGregor, “Courting Trouble”, *Sydney Morning Herald*, 22 Maret 1997, hlm. 6.

¹⁵⁸ Sharp, *op.cit.*, hlm.. 153.

Meriam di Pulau Murray, selamat atau tidak hilang pasca aneksasi oleh Kerajaan Inggris. Yang kedua, para penuntut berharap kasus ini bisa membuka jalan bagi mereka untuk melegalisasikan hak tradisional tersebut hingga sesuai dengan standar hukum Eropa.¹⁵⁹

Pada tahap ini Pemerintah Persemakmuran telah keluar dari kasus tersebut, meninggalkan Pemerintah Queensland sebagai pihak terdakwa tunggal. Queensland berargumen:

“When desert uninhabited countries were colonized by English settlers, however, they brought with them ‘so much of the English law as (was) applicable to their own situation and the condition of an infant colony’. . . When Englishmen establish themselves in an uninhabited or barbarous country, they carry with them not only the laws, but the sovereignty of their own State; and those who live amongst them and become also partakers of, and subject to the same laws.”¹⁶⁰

(“Ketika negara asing dan tidak berpenghuni dikolonialisasi oleh pemukim Inggris, bagaimanapun mereka membawa ‘hukum Inggris yang bisa diaplikasikan terhadap situasi dan kondisi mereka di koloni baru tersebut’ . . . Ketika bangsa Inggris tinggal di negara yang berbahaya dan tidak berpenghuni, mereka membawa tidak hanya hukum, namun juga kedaulatan dari Negara mereka, dan siapapun yang hidup di antara mereka akan menjadi penjaga dan subjek dari hukum tersebut.”)

Menurut pihak Queensland para pemukim yang datang ke Australia tidak hanya membawa hukum Inggris, tetapi juga kedaulatan negara mereka. Oleh karena itu, *High Court of Australia* bertugas untuk menentukan efek aneksasi Pulau Murray oleh Kerajaan Inggris, eksistensi hak tradisional para penduduk asli pasca proses aneksasi tersebut, serta kapasitas Kerajaan Inggris untuk menghapuskan hak tradisional yang sebelumnya dinikmati oleh para penduduk asli.¹⁶¹ Perlu diingat jika konsep kepemilikan tanah yang diklaim oleh orang-orang Meriam tidaklah sama dengan konsep kepemilikan tanah yang dikenal oleh hukum bangsa Eropa khususnya hukum Inggris.

Ketika pada tanggal 21 Juli 1879 Gubernur Koloni Queensland secara resmi memasukan Kepulauan Selat Torres ke dalam wilayahnya, menurut pihak Queensland maka serta-merta hukum *land tenure* yang berlaku di Inggris, berlaku

¹⁵⁹ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2014, pukul 21.04 WIB.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

juga di wilayah tersebut.¹⁶² Pasca *Norman Conquest*,¹⁶³ Raja William menyatakan bahwa semua tanah di Inggris yang dulunya dikuasai oleh raja-raja Anglo-Saxon, ia kuasai sepenuhnya. Raja William kemudian memberikan *tenure*, atau masa jabatan kepada para ksatria dan bangsawan agar dapat mengolah tanah yang mereka kehendaki. Nantinya, kaum bangsawan ini akan menyewakan tanah tersebut kepada para rakyat biasa. Rakyat biasa inilah yang nantinya menggarap lahan tersebut hingga bisa menghasilkan produksi untuk membayar harga sewa.¹⁶⁴ Status Pulau Murray sebagai koloni Inggris, menjadikannya subjek langsung dari praktek hukum Inggris tersebut. Menurut pihak Queensland, ketika Kerajaan Inggris menganeksasi Pulau Murray, hak tradisional yang tadinya dinikmati oleh para penduduk asli tersebut digantikan oleh hukum *land tenure* yang mana Kerajaan Inggris adalah pemilik sah dari tanah-tanah tersebut.

Pasca aneksasi dan masuknya Kepulauan Selat Torres ke dalam wilayah Koloni Queensland, Pemerintah Koloni berhasil bernegosiasi dengan orang Meriam untuk menyerahkan dua hektar tanah kepada para misionaris melalui *London Missionary Society* (LMS) pada Februari 1882. Penduduk Meriam bersedia mengabulkan permintaan Koloni Queensland tersebut dengan syarat Pemerintah Koloni mau membantu mereka untuk mengusir orang-orang Kepulauan Pasifik Selatan dari Pulau Murray. Pemerintah Koloni Queensland menepati janjinya dan mengusir semua orang asing yang ada di Pulau Murray. Oleh karena itu, berbeda dengan orang-orang *Aborigin* di *mainland* Australia, orang-orang Meriam bisa menikmati hak tradisional mereka secara ekslusif. Orang-orang Meriam statusnya saat itu tidak mengetahui ataupun memahami proses hukum terkait aneksasi wilayah mereka ke dalam kerajaan Inggris.¹⁶⁵

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Norman Conquest* adalah sebuah penaklukan militer raja-raja Anglo-Saxon di Inggris yang dipimpin oleh William, *duke of Normandy*, dari Perancis, pada 14 Oktober 1066. Penaklukan ini menghasilkan perubahan yang sangat fundamental baik secara politik, administratif, maupun social dalam tubuh Inggris dalam “Norman Conquest”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/418324/Norman-Conquest>, diakses pada 1 April 2015, pukul 20.01 WIB.

¹⁶⁴ “History of Real Estate Law: The Old English Landholding System”, <http://www.wwlia.org/LegalResources/UK/ID/258/History-of-Real-Estate-Law-The-Old-English-Landholding-System.aspx>, diakses pada 23 Maret 2015, pukul 21.31 WIB.

¹⁶⁵ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

Setelah aneksasi Kepulauan Selat Torres, Pemerintah Kolonial Queensland mengeluarkan *Crown Land Act* (1884) yang tujuannya adalah untuk mereservasi dan memisahkan Pulau Murray secara permanen dengan tujuan untuk melindungi penduduk aslinya.¹⁶⁶ Dalam sidang di *High Court of Australia*, Ron Castan juga mempertanyakan apakah Inggris bisa menghapus hak tradisional para penduduk asli hanya karena sistem tersebut tidak bisa memenuhi standar bangsa Eropa. Ini pula yang berusaha dijawab oleh para hakim di sidang tersebut. Menurut Ron Castan, pandangan yang mengatakan, “*There was no land law or tenure existing in the Colony at the time of its annexation to the Crown*” (“Ketidadaan hukum tanah atau sewa-menyeWA di Koloni Queensland pada saat Kerajaan Inggris menganeksasi wilayah tersebut”), hanya dilihat dari sudut pandang bangsa Eropa.¹⁶⁷ Yang tidak mereka pahami saat itu adalah fakta bahwa orang-orang Aboriginal memiliki hukum komunal yang mengatur batas-batas wilayah kelompok mereka. Setiap klan atau kelompok tentu memiliki wilayah yang berbeda dengan kelompok yang lainnya.

Pada tahun 1886, Mr. Milman, pemangku jabatan *Government Resident* di Selat Torres menuliskan dalam catatannya, “. . . *There is no doubt that if every acre has not a reputed owner . . . but every grove . . . has its proper and legitimate hereditary owner. To disturb these rights, great care would have been exercised . . .*”.¹⁶⁸ Keterangan Mr. Milman tersebut sangatlah menarik karena tidak hanya tanah, menurut hukum orang-orang Meriam, setiap pohon bahkan memiliki pemilik yang sah.

Pihak Queensland juga menyatakan bahwa alasan dari argumentasi mereka yang menyatakan bahwa orang-orang Meriam tidak lagi memiliki hak tradisional adalah karena orang-orang Meriam telah mengadopsi gaya hidup bangsa Eropa. Walaupun demikian, Hakim Toohey menyatakan bahwa argumentasi ini sangat lemah. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan penduduk asli pasca kedatangan bangsa Eropa tentu tidak bisa dibantah. Contohnya adalah dengan kehadiran fasilitas-fasilitas publik di Pulau Murray seperti sekolah, rumah sakit, pengadilan,

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ “In the High Court of Australia, Office of the Registry Brisbane, No B12 of 1982, Transcript of Proceedings”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCATrans/1991/24.pdf>, diakses pada 2 Maret 15.02 WIB, hlm. 120.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 170-171.

kepolisian serta agensi pemerintahan lainnya. Agama Kristen yang diperkenalkan *London Missionary Society* pun membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang-orang Meriam. Begitu pula dengan ekonomi para penduduk yang sekarang banyak didasarkan pada pekerjaan bergaji dibandingkan dari hasil memancing dan berkebun. Namun tetap saja, menurut Hakim Toohey, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan bahwa hak tradisional penduduk asli telah hilang. Perubahan yang terjadi pada tubuh masyarakat Meriam tersebut hanya menunjukkan modifikasi gaya hidup mereka untuk menerima penetrasi budaya asing yang lebih dominan.¹⁶⁹

Pihak Queensland bersikeras bahwa hak yang dinikmati oleh orang-orang Meriam di Pulau Murray tersebut didasarkan atas izin dari Kerajaan Inggris karena Pulau Murray merupakan *Crown Land* atau tanah milik Kerajaan Inggris. Pihak Queensland memperkuat argumentasinya melalui kebijakan *Land Act* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Koloni Queensland pada tahun 1910. Dalam Pasal 4 kebijakan tersebut tertulis bahwa makna dari *Crown Land* berarti adalah tanah yang diberikan atau disewakan oleh Kerajaan Inggris, kepada seseorang. Dapat diartikan pula bahwa *Crown Land* adalah tanah yang direservasi untuk kepentingan bersama.¹⁷⁰

Yang dipertanyakan oleh para penuntut Meriam adalah kebenaran status Pulau Murray sebagai *Crown Land*. Menurut Hakim Brennan, Pulau Murray bukanlah *Crown Land* karena pasca aneksasi dan keputusan Pemerintah Koloni Queensland untuk menjadikannya sebagai wilayah reservasi, tidak ada seorang pun *trustee* atau wali yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas tanah tersebut kepada Kerajaan Inggris.¹⁷¹ Hakim Brennan pun berpendapat bahwa hak tradisional penduduk dari sebuah wilayah akan hilang jika klan atau kelompok yang menghuni wilayah tersebut kehilangan hubungan dengan tanah tradisional mereka. Ketika hal tersebut terjadi, barulah Kerajaan Inggris menjadi pemilik absolut dari tanah tersebut. Pendapat Hakim Brennan ini disetujui oleh Hakim Deane dan Hakim Gaudron yang mengatakan jika orang-orang Meriam secara

¹⁶⁹ "High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)", <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2014, pukul 21.04 WIB.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

sukarela menyerahkan hak tersebut kepada Kerajaan Inggris atau jika mereka meninggalkan tanah yang mereka huni sebelumnya, maka barulah tanah tersebut menjadi subjek dari *Crown Land*. Tentu kasus ini tidak terjadi di Pulau Murray karena orang-orang Meriam tidak pernah kehilangan hubungan dengan tanah yang mereka huni baik secara ekonomi maupun secara religius ataupun menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Kerajaan Inggris.¹⁷²

Argumentasi lain yang digagas oleh pihak terdakwa Queensland adalah fakta bahwa pada tanggal 6 Mei 1931, Pemerintah Negara Bagian Queensland memberikan kontrak sewa selama 20 tahun kepada dua orang yang bukan merupakan orang Aboriginal atas seluruh wilayah di Pulau Dauer dan Waier. Kedua orang tersebut bertujuan untuk membangun pabrik sardine di sana. Nantinya sewa ini dilanjutkan oleh Perusahaan *Murray Island Fisheries Limited* pada tanggal 10 Juni 1932. Namun kontrak sewa mereka dibatalkan sebelum habis masa kontraknya karena perusahaan tersebut tidak membayar sewa pada tahun 1938. Menurut Hakim Dawson, pemberian kontrak sewa atas Pulau Dauer dan Waier tersebut menunjukkan bahwa Pulau Murray merupakan subjek dari *Crown Land*. Tetapi pihak penuntut membantah dengan mengatakan bahwa sewa tersebut bisa terjadi dengan syarat bahwa penyewa harus berjanji tidak mengganggu hak para penduduk asli untuk berkebun dan bercocok tanam ataupun mengganggu penduduk yang biasa mencari ikan di sekitar karang-karang di Pulau Murray. Tetapi kemudian mengingat status Pulau Murray sebagai wilayah reservasi, *Chief Protector of Aboriginal* mengeluarkan keputusan yang menyatakan komitmen Negara Bagian Queensland untuk mengembalikan Dauer dan Waier menjadi wilayah reservasi.¹⁷³

Ron Castan memperkuat argumen pihak penuntut Meriam dengan membawa bukti yang mengatakan setiap Pemerintah Negara Bagian Queensland ingin membangun fasilitas publik di Pulau Murray, pihak Queensland harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang Meriam sebagai pemilik tradisional. Pada tahun 1967, *Queensland Department of Aboriginal and Islander Advancement* mencari tanah yang cocok sebagai lokasi pembangunan sebuah taman kanak-kanak. Setelah mendapatkan tanah dengan lokasi yang sesuai,

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

Pemerintah Negara Bagian Queensland bermaksud untuk membeli tanah tersebut dari pemilik tradisionalnya. Tetapi pemilik tradisional tersebut menolak untuk menjual tanahnya sehingga pihak Queensland harus mencari tanah di tempat lain. Queensland akhirnya memberi tanah dari penduduk Meriam bernama Gobedar Mabo seharga \$50.¹⁷⁴ Hal ini bisa ditafsirkan bahwa pada satu titik, Pemerintah Negara Bagian Queensland mengakui bahwa Pulau Murray secara tradisional dimiliki oleh orang-orang Meriam.

Semenjak *Murray Islands Native Court* didirikan di Pulau Murray, tercatat setidaknya terdapat 400 kasus yang melibatkan perseteruan orang-orang Meriam mengenai persengketaan tanah. Biasanya kasus tersebut meliputi permasalahan batas-batas tanah dan konflik mengenai pewarisan tanah dalam keluarga. Jika seorang Meriam akan pergi meninggalkan Pulau Murray dalam jangka waktu tertentu, *Islands Court* atau Pengadilan Pulau ini memiliki kuasa untuk mengatur penanggung jawab yang akan mengurus tanah selama kepergian mereka.¹⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Meriam tidak tahu mengenai pemilik legal dari tanah mereka dan Pemerintah Negara Bagian Queensland terkesan cenderung membiarkan orang-orang Meriam tersebut berpikir Pulau Murray masih milik mereka.

Para penuntut Meriam pun mempermasalahkan kehadiran *Islands Court* tersebut. Bagaimana pengadilan tersebut bekerja sesuai dengan sistem Eropa, namun permasalahan yang mereka urus setiap harinya merupakan masalah adat dan perseteruan hak tradisional antar penduduk Meriam. Dengan demikian, mereka mempertanyakan mengapa Queensland masih bersikeras berargumen bahwa hak tradisional atau *native title* ini dihapuskan pasca aneksasi oleh Kerajaan Inggris. Dalam Sidang di *High Court of Australia*, Ron Castan juga menambahkan bahwa tidak pernah ada hukum Negara Bagian Queensland yang mengatakan kepada orang-orang Meriam “*You do not have this*” (“Kamu tidak memiliki ini”), “*You cannot have this system*” (“Kamu tidak memiliki sistem ini”), atau “*You cannot continue to claim that you are owners*” (“Kamu tidak bisa

¹⁷⁴ “In the High Court of Australia, Office of the Registry Brisbane, No B12 of 1982, Transcript of Proceedings”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCATrans/1991/24.pdf>, diakses pada 2 Maret 15.02 WIB, hlm. 174.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

melanjukan tuntutan sebagai pemilik") mengingat permasalahan yang diurus oleh *Islands Court* setiap harinya.¹⁷⁶ Tuntutan mereka diperkuat dengan adanya *Island Councilors Conference* yang diselenggarakan pada tahun 1937 di Pulau Yorke. Konferensi tersebut menyimpulkan bahwa jika ada kasus di Pulau Murray dan *Islands Court* belum bisa memberikan putusan atas kasus tersebut, maka para penuntut dan terdakwa disarankan untuk datang ke para tetua adat untuk meminta petunjuk dari penyelesaian masalah mereka.¹⁷⁷ Banyak bukti yang menyiratkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung Pemerintah Negara Bagian Queensland telah mengakui hak tradisional dari orang-orang Meriam meskipun tidak secara tertulis dan legal.

3.3. Keputusan *High Court of Australia*

Lima bulan sebelum *High Court of Australia* memberikan keputusan dari kasus perseteruan tanah ini, Eddie Mabo yang merupakan inti dari perjuangan tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1992 karena kanker. Ia meninggal di usia 55 tahun. Kematian Eddie Mabo meninggalkan James Rice dan *Reverend* Dave Passi sebagai penuntut Meriam yang masih hidup untuk menyaksikan keputusan bersejarah yang dikeluarkan oleh *High Court of Australia*. Pada tanggal 3 Juni 1992, *High Court of Australia* yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mason memimpin sidang guna memberikan putusan atas perkara kasus Mabo tersebut.

Hakim Brennan yang menulis opini utama dalam kasus tersebut berkata: "*The common law of Australia does not embrace the enlarge notion of terra nullius or persist in characterizing the indigenous inhabitants as people too low in the scale of social organization to be acknowledge as possessing rights and interests in land*".¹⁷⁸ Menurutnya, orang-orang Aborigin bukanlah sekelompok masyarakat rendahan hingga tidak bisa dimasukkan ke dalam struktur sosial masyarakat Australia. Opini yang diberikan Hakim Brennan tersebut menunjukkan bahwa ia keberatan dengan penerapan konsep *terra nullius* untuk benua Australia. Lebih jauh ia berkata bahwa hukum yang tidak mengakui adanya

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

¹⁷⁸ Hinchman dan Hinchman, *op.cit.*, hlm. 39.

hak tradisional yang dimiliki oleh penduduk asli Australia tersebut adalah suatu hal yang rasis dan harus dipertanyakan validitasnya. Oleh karena itu, Hakim Brennan mengatakan bahwa *High Court* bertugas untuk menentukan apakah orang-orang Meriam kehilangan hak tradisional mereka pasca aneksasi Pulau Murray pada tanggal 1 Agustus 1879. *High Court* juga harus bisa mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut tanpa harus mencederai fondasi hukum yang telah menjadi tulang belakang Australia selama lebih dari 200 tahun.¹⁷⁹

Menurut hukum internasional, sebuah wilayah dapat diklaim melalui pendudukan jika wilayah tersebut tidak diolah oleh penduduk asli. Jika demikian, barulah kekuatan yang baru bisa menggarap wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah lahan yang produktif secara ekonomi.¹⁸⁰ “*But in conquered or ceded countries, that have already laws of their own, the king may indeed alter and change those laws; but till he does actually change them, the ancient laws of the country remain, . . .*”¹⁸¹ (“Di negara-negara yang menyerahkan diri atau berhasil ditaklukan, tetapi memiliki hukumnya sendiri, raja bisa mengesampingkan dan mengubah hukum tersebut; tetapi hingga raja benar-benar menggantinya, hukum kuno di negara tersebut akan terus bertahan, . . .”) Namun bukan ini yang terjadi pada kasus Pulau Murray, gaya hidup orang-orang Meriam untuk berkebun dan bercocok tanam membuat Pulau Murray tidak bisa dijadikan subjek dari wilayah pendudukan tersebut. Jika dilihat melalui peraturan dari hukum internasional, bangsa Eropa bisa memiliki Pulau Murray melalui penaklukan atau perjanjian dengan penduduk asli atas kepemilikan pulau tersebut. Tetapi, Kerajaan Inggris ataupun Koloni Queensland tidak pernah menaklukan Pulau Murray ataupun melakukan perjanjian dengan orang-orang Meriam terkait permasalahan itu.

Seharusnya, sebuah teritori yang ditempati oleh sekelompok orang atau suku yang memiliki organisasi sosial dan politik tersendiri tidak dianggap sebagai *terra nullius*. Konsep tersebut sangat diskriminatif sehingga harus dipertimbangkan kembali mengingat citra Australia di mata dunia internasional.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁸⁰ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland* (No 2) (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

¹⁸¹ *Ibid.*

Menurut Hakim Brennan, hukum *land tenure* juga tidak bisa diterapkan di Australia mengingat orang-orang Meriam tidak berkewajiban atas apapun terhadap Kerajaan Inggris. Setelah kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia, banyak klan atau grup penduduk asli yang dipisahkan dari tanah serta hak tradisional mereka. Tetapi hal ini tidak bisa dikatakan secara umum dan menyeluruh karena terdapat klan atau grup penduduk asli seperti orang-orang Meriam yang tidak dipisahkan dari tanah ataupun hak tradisional mereka. Hakim Brennan berargumentasi keras bahwa jika sebuah klan atau grup dapat menjaga hubungan mereka dengan tanah tradisional, maka eksistensi dari komunitas tradisional dari klan atau grup itu pun tetap terjaga.¹⁸²

Menurut Henry Reynolds dalam buku *The Law of The Land* (1987), konsep *terra nullius* yang diterapkan pada benua Australia karena tidak adanya penduduk yang menetap di suatu tempat masih harus diperdebatkan. Ia berpendapat gaya hidup orang-orang Aborigin yang berpindah-pindah tersebut bukan karena mereka tidak memiliki suatu sistem tetapi karena mereka secara praktis hidup berpindah mengikuti ketersediaan air dan makanan. Mengingat kondisi iklim Australia yang ekstrem, hal tersebut tentu mengharuskan mereka berpindah tempat jika ingin melanjutkan kehidupan. Pandangan ini pun pernah digunakan dalam *International Court of Justice*, Pengadilan Internasional, ketika membahas kasus di Western Sahara. Pihak penuntut menolak konsep yang mengatakan bahwa Sahara Barat (Western Sahara) adalah *terra nullius* sebelum kedatangan bangsa Spanyol ke sana.¹⁸³

Walaupun Kerajaan Inggris memberikan kontrak sewa tanah seluas dua hektar pada *London Missionary Society*, terdapat peraturan bahwa kontrak yang diberikan di Pulau Murray tersebut tidak boleh mengganggu hak penduduk asli atau mengganggu perkebunan atau tanaman mereka. Adapun bukti-bukti yang ditemukan oleh Hakim Moynihan dalam *Supreme Court of Queensland* tanah-tanah yang disewakan oleh Kerajaan Inggris di Pulau Murray murni bersifat administratif. Terlihat dari penggunaan tanah sewa tersebut untuk membangun

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

gedung pengadilan, rumah sakit, toko, sekolah, tempat tinggal guru hingga bangunan penjara.¹⁸⁴

Hakim Toohey mendukung argumentasi Hakim Brennan dengan mengatakan bahwa anggapan benua Australia sebagai *terra nullius* tidak bisa diterima, baik secara hukum ataupun fakta. Hakim Toohey menyatakan bahwa hak tradisional orang-orang Meriam tidak hilang hanya karena aneksasi oleh Kerajaan Inggris, tetapi tetap berlangsung hingga ada hukum yang menyatakan hal tersebut secara resmi dihapuskan. Kemungkinan ini sebelumnya telah dipikirkan oleh pihak Queensland sehingga di bawah *Premier* Jon Bjelke-Petersen, Negara Bagian Queensland mengeluarkan *Queensland Island Declaratory Act* (1985) yang menghapuskan hak-hak tradisional penduduk asli yang masih tersisa pasca aneksasi oleh Kerajaan Inggris. Sayangnya, pihak Queensland tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa kebijakan yang mereka keluarkan tersebut bertentangan dengan *Racial Discrimination Act* (1975) yang dikeluarkan oleh Persemakmuran. Menurut Konstitusi Australia, jika hal tersebut terjadi maka peraturan yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Parlemen Negara Bagian dan Wilayah Teritorial.¹⁸⁵

Amerika Utara mengambil langkah yang berbeda ketika dihadapkan pada pertanyaan mengenai eksistensi hak tradisional penduduk asli mereka. Hal ini dipraktikkan pada kasus *Hamlet of Baker Lake v. Minister of Indian Affairs and Northern Development* (1979). Hakim Mahoney yang memimpin proses peradilan kasus tersebut, setelah memeriksa otoritas dari Kanada dan Amerika Serikat serta mempelajari kasus Millirrum di Australia, memutuskan bahwa:

“The elements which the plaintiffs must prove to establish an aboriginal title cognizable at common law are:

1. *That they and their ancestors were members of an organized society.*
2. *That the organized society occupied the specific territory over which they assert the aboriginal title.*
3. *That the occupation was to the exclusion of other organized societies.*
4. *That the occupation was an established fact at the time sovereignty was asserted by England.”*¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

(“Elemen yang harus dibuktikan para penuntut untuk mendirikan suatu hak aborigin yang dapat diakui oleh sistem hukum Australia adalah:

1. Bahwa mereka dan nenek moyang mereka adalah anggota dari suatu masyarakat yang sudah terorganisir.
2. Bahwa masyarakat yang terorganisir tersebut menduduki wilayah spesifik yang mereka tuntut atas hak aborigin.
3. Bahwa pendudukan tersebut hak eksklusivitas bagi masyarakat yang terorganisir tersebut.
4. Bahwa pendudukan tersebut didasarkan atas fakta bahwa kedaulatan mereka dulu diambil oleh Inggris.”)

Jika mengacu pada pendekatan yang diambil oleh Hakim Mahoney di Amerika Utara tersebut, orang-orang Meriam secara jelas dapat dikatakan memiliki hak tradisional yang legal dan sah atas Pulau Murray. Dan untuk menjawab keraguan pihak Queensland atas kredibilitas Eddie Mabo sebagai pewaris sah Keluarga Mabo, Ron Castan membawa contoh-contoh kasus di Inggris yang menyangkut masalah pewarisan tanah. Di Kent, Inggris, terdapat suatu hukum yang dinamakan *gavelkind*.¹⁸⁷ Hukum tersebut sudah ada sejak masa Anglo-Saxon dan bertahan hingga tahun 1925. Menurut hukum tersebut, seseorang bisa mewariskan tanah kepada anak bungsunya. Ini adalah hal yang tidak lazim mengingat pengaplikasian hukum Inggris di mana hanya anak lelaki tertua yang bisa mewarisi tanah dari ayahnya. Menurut Ron Castan, tanah tradisional bisa diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh orang-orang Meriam dalam komunitas mereka sehingga pihak Queensland tidak bisa mempertanyakan status Eddie Mabo sebagai anak adopsi untuk kemudian mewarisi tanah keluarga Mabo.

Sependapat dengan Hakim Brennan dan Hakim Toohey, Hakim Deane dan Hakim Gaudron berpendapat bahwa orang-orang Meriam hidup di dalam sebuah komunitas yang sangat terorganisir bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka mengenal konsep kepemilikan individu atau kelompok (keluarga) dan pengolahan tanah di sekitar mereka untuk dijadikan ladang atau kebun. Jika memang Pulau Murray ditujukan untuk menjadi wilayah reservasi Aborigin, berarti Kerajaan Inggris ingin melindungi hak penduduk asli, bukan untuk

¹⁸⁷ *A tenure of land existing chiefly in Kent from Anglo-Saxon times until 1925 and providing for division of an intestate's estate equally among the sons or other heirs.* Sebuah hukum tanah yang ada di Kent sejak masa Anglo-Saxon hingga tahun 1925. Hukum ini juga menyediakan kerangka aturan untuk membagi rata warisan tanah kepada anak-anak lelaki dari si pewaris dalam “Gavelkind”, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/gavelkind>, diakses pada 2 Maret 2015, pukul 17.13 WIB.

menghapuskan hak mereka. Oleh karena itu Hakim Deane dan Hakim Gaudron berpendapat bahwa hak tradisional orang-orang Meriam selamat dari aneksasi oleh Kerajaan Inggris.¹⁸⁸

Berbeda dengan hakim-hakim lainnya, Hakim Dawson bersikeras bahwa hak tradisional orang Meriam sudah hilang pasca aneksasi oleh Kerajaan Inggris. Dia mengatakan:

“. . . If, for instance, Aboriginal people have particular privileges which do not extend to others in the community, let us say to hunt endangered species on their land, and then that particular privilege is removed, would you say that would fall within section 10? Because that is the same argument, that they are merely exercising a right to use their land in a particular manner and to bring them back to the level of other inhabitants of the State is interfering with a right which they have, which other inhabitants have, of using their land and therefore it is discriminatory.”¹⁸⁹

(. . . Jika, contohnya, orang Aborigin memiliki hak istimewa yang terbatas untuk masyarakat lainnya, seperti berburu spesies langka di tanah mereka, dan hak istimewa tersebut dicabut, apakah kamu mengatakan hal tersebut bertentangan dengan pasal 10? Karena hal itu berdiri di atas argumentasi yang sama, bahwa mereka hanya menggunakan hak mereka uatas penggunaan lahan dan membawanya sebagai suatu hak istimewa di atas hak penduduk Negara lainnya untuk menggunakan tanah secara sama, adalah perilaku yang diskriminatif.”)

Dapat dijelaskan dari pernyataan Hakim Dawson tersebut bahwa ia tidak setuju jika penghapusan hak tradisional orang-orang Meriam terutama atas tanah adalah melanggar Pasal 10 *Racial Discrimination Act* (1975) yang dikeluarkan oleh Persemakmuran. Menurut Hakim Dawson, jika mengambil alih tanah tradisional orang-orang Meriam dikatakan diskriminatif, berarti melarang para penduduk asli untuk memburu hewan-hewan langka juga bisa dikatakan demikian. Sedangkan, untuk memberikan hak kepada penduduk asli untuk memburu hewan-hewan langka berarti memberikan hak istimewa yang tidak dinikmati oleh penduduk Queensland lainnya dan hal tersebut juga melanggar *Racial Discrimination Act* (1975). Oleh karena itu, Hakim Dawson tetap berpendapat bahwa orang-orang Meriam tidak memiliki hak atas tanah di Pulau Murray.

¹⁸⁸ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakes pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

¹⁸⁹ “In the High Court of Australia, Office of the Registry Brisbane, No B12 of 1982, Transcript of Proceedings”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCATrans/1991/24.pdf>, diakses pada 2 Maret 15. 02 WIB, hlm. 221.

Setelah melalui hari yang panjang, di penghujung hari pada tanggal 3 Juni 1992, enam dari tujuh hakim di *High Court of Australia* menyatakan bahwa para penuntut Meriam memiliki hak yang legal dan sah atas tanah mereka di Pulau Murray (lihat Lampiran 23). Adapun keputusan tersebut adalah:

“In lieu of answering the questions reserved for the consideration of the Full Court,

- 1) *Declare that the land in Murray Islands is not Crown land within the meaning of that term in s. 5 of the Land Act 1962 (Q.);*
- 2) *... declare that the Meriam people are entitled as against the whole world to possession, occupation, use and enjoyment of the lands of the Murray Islands;*
- 3) *Declare that the title of the Meriam people is subject to the power of the Parliament of Queensland and the power of the Governor in Council of Queensland to extinguish that title by valid exercise of their respective powers, provided any exercise of those powers is not inconsistent with the laws of the Commonwealth.*¹⁹⁰

(“Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada Mahkamah Peradilan,

- 1) Memutuskan bahwa tanah di Pulau Murray bukanlah *Crown Land* mengacu kepada artinya menurut pasal 5 dari *Land Act 1962* (Q.);
- 2) . . . memutuskan bahwa orang-orang Meriam memiliki hak atas kepemilikan, pendudukan, penggunaan, dan kenikmatan terhadap Pulau Murray;
- 3) Memutuskan bahwa hak kepemilikan orang-orang Meriam tunduk kepada kekuasaan Parlemen Negara Bagian Queensland dan kekuasaan *Governor in Council* Queensland, asalkan kekuasaan mereka tersebut tetap konsisten dengan hukum-hukum dari Persemakmuran.”)

Dengan demikian, Eddie Mabo dan para penuntut lainnya yang mewakili orang-orang Meriam memiliki hak legal atas tanah yang telah mereka huni bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia. Sayangnya Eddie Mabo yang merupakan penuntut utama dalam kasus tersebut tidak bisa menikmati jerih payah yang telah ia lakukan selama sepuluh tahun lamanya karena ia telah meninggal dunia beberapa bulan sebelum keputusan akhir dari *High Court* ini dikeluarkan. Kasus ini lebih populer dengan nama *Mabo No. 2* (1992), sedangkan keputusan akhir ini dikenal dengan nama *Mabo Decision*. *Mabo Decision* inilah yang nantinya akan menjadi framework atau kerangka dari *Native Title Act* (1993), sebuah undang-undang yang dikeluarkan Persemakmuran dalam rangka merekonsiliasi hubungan Australia para penduduk aslinya.

¹⁹⁰ “High Court of Australia, *Mabo v Queensland (No 2)* (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

BAB 4

ARTI PENTING KEMENANGAN MABO DI AUSTRALIA

4.1 Respon Pemerintah Atas Kemenangan Mabo

Pasca kemenangan kasus Mabo, berbagai media cetak di Australia ramai membicarakan *Mabo Decision*, nama populer yang digunakan untuk putusan hukum para hakim di *High Court*. Surat kabar *The Australian* yang merupakan salah satu media cetak besar di Australia menulis tajuk utama dengan judul “*Aborigines rejoice as High Court ends terra nullius*” (lihat Lampiran 25).¹⁹¹ *The Australian* melaporkan bagaimana orang-orang Aborigin berpesta dan merayakan ketika Australia mengakui hak dan keberadaan mereka sebagai penduduk asli.¹⁹² Eddie Mabo, yang merupakan simbol dan orang yang paling berpengaruh atas perubahan tersebut, sayangnya tidak bisa menikmati hak yang telah ia perjuangkan selama lebih dari satu dekade. Menurut Maleta West, anak dari Eddie Mabo, walaupun ia sakit keras, kata-kata terakhir yang ia ucapkan adalah tentang kasus pengadilan yang ia ajukan.¹⁹³ Tidak hanya pihak keluarga dan tim pengacara yang sudah menemaninya selama kasus tersebut bergulir di pengadilan, para penduduk asli di seluruh wilayah Australia ikut merayakan hal tersebut.

Bryan Keon-Cohen yang merupakan salah satu pengacara Mabo mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan pertama bagi *High Court* sejak pendiriannya pada 1901, untuk menghadapi pertanyaan penting mengenai eksistensi dari *native title*, hak tradisional, dalam sistem hukum Australia.¹⁹⁴ Ia juga mengatakan:

“... anybody engaged in Aboriginal Islander Affairs in this country should understand that the judges have not only radically changed the law: they have dramatically altered the relationships between indigenous communities and governments, and cast a heavy onus on governments to justify any denial of native title when it can properly be claimed.”¹⁹⁵

¹⁹¹ David Solomon, Deanie Carbon, dan Fiona Kennedy, “Aborigines Rejoice As High Court Ends Terra Nullius”, *The Australian*, 4 Juni 1992, hlm. 1.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁹⁴ Tim Rowse, *After Mabo: Interpreting Indigenous Traditions*, (Carlton: Melbourne University Press, 1993), hlm. 4-5.

¹⁹⁵ Bryan Keon-Cohen, “Eddie Mabo and Ors v The State of Queensland (1992)”, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AboriginalLawB/1992/32.html>, diakses pada 10 Maret 2015, pukul 09.11 WIB.

(“. . . siapapun yang terlibat dalam permasalahan Aboriginal dan Penduduk Kepulauan (Selat Torres) di negara ini harus memahami bahwa para hakim tidak hanya mengubah hukum secara radikal: mereka mengubah hubungan di antara komunitas penduduk asli dan pemerintah secara dramatis, dan juga memberi tanggung jawab besar kepada pemerintah untuk mengadili penolakan akan adanya hak tradisional ketika hal tersebut dapat diklaim.”)

Tetapi kemenangan Mabo ini tidak disambut baik oleh beberapa pihak dalam tubuh masyarakat Australia, Hugh Morgan selaku perwakilan dari *Western Mining Corporation* mengatakan kepada media bahwa keenam juri yang memenangkan Mabo di pengadilan, telah menciptakan suatu krisis politik dan konstitusional (lihat Lampiran 24).¹⁹⁶ Ia menambahkan bahwa Australia memang *terra nullius* dan keputusan *High Court* tersebut telah mengacaukan kerangka dari hak kepemilikan properti dari seluruh komunitas di Australia.¹⁹⁷ Penolakan ini salah satunya juga terjadi karena pada bulan Oktober 1992, Pemerintahan keating membentuk *Inter-Departmental Committee* yang terdiri dari *Department of Prime Minister and Cabinet, Attorney-General's, Aboriginal and Torres Strait Islanders Council*, dan *Department of Primary Industry and Energy*. Kelompok panitia ini didirikan untuk mengeksplorasi *Mabo Decision*. Hasil kerja mereka kemudian dikeluarkan dengan nama “*The High Court Decision on Native Title*”.¹⁹⁸ Bill Hassel, yang merupakan Presiden Partai Liberal di Western Australia, menolak *Mabo Decision*. Menurut Hassel hal tersebut akan merugikan Negara Bagian Western Australia.¹⁹⁹ Perwakilan dari asosiasi perusahaan-perusahaan tambang tersebut khawatir perusahaan mereka tidak bisa lagi melakukan eksplorasi karena tanah yang mereka sewa akan menjadi subjek dari klaim penduduk asli.

Karena kekacauan yang terjadi, Pemerintah Federal Australia yang saat itu dipimpin oleh Paul Keating (Partai Buruh), untuk merespon *Mabo Decision* di depan publik pada tanggal 10 Desember 1992. Keating sendiri memilih Redfern Park, sebuah taman di Sydney, New South Wales, sebagai tempat untuk menyampaikan pidatonya. Hal ini dikarenakan taman tersebut berjarak sekitar 15

¹⁹⁶ “The Mabo Case and the Native Title Act”, http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/Previousproducts/1301.0Feature%20Article21995?open_document, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.01 WIB.

¹⁹⁷ John Garden-Gardiner, *the Mabo Debate – A Chronology*, (Canberra: Department of the Parliamentary Library, 1993), hlm. 3.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁹⁹ Richard Bartlett, “Political and Legislative Responses to Mabo, [1993] UWA LAW RW 30; (1993) 23 (2)”, <http://www.austlii.edu.au/journals/UWALawRw/1993/30.html>, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.15 WIB, hlm. 352.

menit (dengan kendaraan) dari tempat orang-orang Inggris menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di benua Australia. Menurut Keating kedatangan bangsa Eropa tersebut merupakan awal dari penderitaan orang-orang Aborigin sehingga terasa benar jika Australia mengakhiri penderitaan tersebut tepat di mana hal tersebut bermula.²⁰⁰ Oleh karena lokasinya, nantinya pidato Paul Keating tersebut dikenal dengan nama *Redfern Speech*.²⁰¹ Sebelumnya, Keating sempat mengatakan bahwa *Mabo Decision* tersebut adalah “. . . a large step towards reconciliation and away from the injustice dealt to Aborigines over 200 years.”, sebuah langkah besar menuju rekonsiliasi dan menjauhi ketidakadilan yang telah diterima orang-orang Aborigin selama lebih dari 200 tahun.²⁰² Redfern merupakan sebuah *suburb* (pinggiran kota) yang terletak di selatan Sydney di mana banyak sekali komunitas Aborigin yang hidup di dalamnya. New South Wales sendiri merupakan negara bagian dengan konsentrasi orang Aborigin terbanyak di Australia. Oleh karena itu, ketika Keating menyampaikan pidatonya, terlihat jelas banyak sekali orang-orang Aborigin yang berkumpul di kerumunan.

Pada pembukaan pidatonya, Keating mengumumkan bahwa tahun 1993 akan menjadi peringatan *International Year of the World's Indigenous People* yang pertama bagi Australia.²⁰³ Dalam kesempatan tersebut, Keating juga menyatakan penyesalannya akan penderitaan yang dialami orang-orang Aborigin. Paul Keating merupakan perdana menteri Australia pertama yang secara resmi mengakui dampak buruk kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia pada para penduduk asli.²⁰⁴ Ini merupakan bentuk dukungan besar dari Partai Buruh

²⁰⁰ “Redfern Speech”, https://antar.org.au/sites/default/files/paul_keating_speech_transcript.pdf, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 21.30 WIB.

²⁰¹ “Terra Nullius Rejected and the Mabo Saga Unfolds”, *The Age*, 22 Desember 1993, hlm. 4..

²⁰² Bartlett, *op.cit.*, hlm. 355.

²⁰³ *The International Year of the World's Indigenous People* yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus (mulai dari tahun 1995 hingga tahun 2004) diproklamirkan untuk pertama kalinya oleh *United Nations General Assembly* (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1993. Hal ini dilakukan atas permintaan dari kelompok dan organisasi-organisasi penduduk asli di seluruh dunia. *United Nations General Assembly* menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan, “. . . to strengthen international cooperation for the solution of problems faced by indigenous communities in areas such as human rights, the environment, development, education and health”. (“. . . memperkuat kerjasama internasional untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh komunitas penduduk asli di area seperti hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.”) dalam “The International Day of the World's Indigenous People”, <http://www.indigenous.gov.au/news-and-media/event/international-day-worlds-indigenous-peoples>, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.55 WIB.

²⁰⁴ “Paul Keating's Redfern Address”,

terhadap hak tradisional penduduk asli. Dukungan itu merupakan salah satu kebijakan yang selalu didengungkan Partai Buruh dalam kampanye untuk pemilu.

“ . . .
*We took the traditional lands and smashed the traditional way of life.
 We brought diseases. The alcohol.
 We committed the murders.
 We took the children from their mothers.
 We practiced discrimination and exclusion.
 It was our ignorance and our prejudice.
 And our failure to imagine these things being done to us.*
 . . .”²⁰⁵

(“ . . .
 Kita mengambil tanah dan menghancurkan gaya hidup tradisional (mereka).
 Kitamembawa penyakit. Alkohol.
 Kita melakukan pembunuhan.
 Kita mengambil anak-anak dari ibunya.
 Kita melakukan diskriminasi dan pengucilan.
 Itu semua adalah (bentuk) ketidakpedulian dan kecurigaan kita.
 Dan kegagalan kita untuk membayangkan jika hal ini terjadi dan dilakukan kepada kita
 . . .”)

Keating juga mengingatkan masyarakat Australia kepada fakta bahwa benua tersebut telah menjadi suaka bagi bangsa Irlandia yang terbuang, bangsa Inggris yang menginginkan awal yang baru, hingga pengungsi Perang Dunia II dari Eropa dan Asia. Menurut Keating inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa masyarakat Australia merupakan masyarakat multikultural yang dapat menerima siapapun. Sudah saatnya bagi Australia untuk mengakui hak penduduk asli yang selama ini telah menjadi orang asng di tanah mereka sendiri. Keating juga menyebutkan bahwa kata keadilan dan kesetaraan akan memiliki makna jika bangsa Australia mampu mencapai sebuah hasil akhir yang konkret. Oleh karena itu, pemerintahan Buruh Keating berjanji akan membuat suatu hukum legislatif yang mengesahkan hak tradisional penduduk asli agar diakui secara legal oleh sistem hukum Australia. Janji Keating tersebut juga salah satunya didasari oleh keinginan pemerintahannya untuk menjaga komitmen serta keseriusan Australia dalam menaati isi dari *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*.²⁰⁶

<http://www.abc.net.au/archives/80days/stories/2012/01/19/3415316.htm>, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 17.03 WIB.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Janice Gray, “The Lost Promise of Mabo: An Update on the Legal Struggle for Land Rights in Australia with Particular Reference to the Ward and Yorta Yorta Decisions”,

Terikat dengan komitmen tersebut, sebagai salah satu negara anggota PBB, Australia harus menaati isi dari *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*.²⁰⁷ Dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi yang secara resmi diberlakukan pada 4 Januari 1969 ini, disebutkan bahwa:

*“In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”*²⁰⁸

(“Dalam Konvensi ini, kata “diskriminasi ras” berarti pembedaan, pengecualian, pelarangan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau suku bangsa atau etnis yang memiliki tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan, pijakan yang sama, atas hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, atau aspek lain dari kehidupan publik.”)

Selain itu, menurut pasal 6 Konvensi tersebut, Australia harus mengatur warga negaranya agar tidak melakukan tindakan yang masuk ke dalam kategori diskriminasi ras.²⁰⁹ Pelanggaran dalam bentuk apapun akan dihitung sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²¹⁰ Dengan demikian, pidato yang disampaikan Keating di Redfern Park juga bertujuan untuk memulihkan citra Australia di mata internasional sebagai satu-satunya bekas koloni Inggris yang belum mengakui hak tradisional para penduduk aslinya. Keating juga mengatakan bahwa *Mabo Decision* akan menjadi sebuah peristiwa bersejarah jika Australia mampu menjadikan keputusan tersebut sebagai titik balik dari proses rekonsiliasi hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat Australia lainnya.²¹¹

4.1.1 Perdebatan Pemerintah Federal dengan Negara Bagian

Pada tanggal 6 Februari 1993, Richard Court yang merupakan pemimpin Oposisi dari Partai Liberal dilantik menjadi *Premier* Western Australia. Posisinya

http://www3.brandou.ca/library/cjns/23.2/cjns23no2_pg305-348.pdf, diakses pada 10 Maret 2015, pukul 14.02 WIB.

²⁰⁷ “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, <http://legal.un.org/avl/ha/cedr/cedr.html>, diakses pada 10 Maret 2014, pukul 14.05 WIB.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>, diakses pada 11 Maret 21.10 WIB.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ “Redfern Speech”, https://antar.org.au/sites/default/files/paul_keating_speech_transcript.pdf, diakses pada 11 Maret 2015, pukul 21.30 WIB.

sebagai pemimpin Oposisi kemudian digantikan oleh John Hewson. Adapun agenda utama dari kebijakan politik Court sebagai *Premier* salah satunya adalah untuk menolak penerapan dari *Mabo Decision* di Negara Bagian yang dipimpinnya tersebut.²¹² Penolakannya tersebut secara resmi ia katakan pada tanggal 26 Maret 1993, dalam pidatonya tersebut Court juga mempertanyakan legitimasi dan keabsahan keputusan *High Court* mengenai kasus Mabo.²¹³

Melihat banyaknya respon yang menentang penerapan *Mabo Decision*, berbagai organisasi Aboriginal mengadakan pertemuan di Alice Springs, Northern Territory. Pada tanggal 26 April 1993, Keating mengundang sebelas delegasi Aboriginal yang telah bertemu di Alice Springs tersebut untuk membahas tuntutan serta usulan mereka. Delegasi tersebut memberikan *Peace Plan* yang berisikan tentang tuntutan mereka kepada Pemerintah Federal untuk melindungi hak Aboriginal, mendirikan pengadilan khusus untuk permasalah klaim tanah bagi orang-orang Aboriginal, mendirikan *National Land Fund* untuk membantu orang-orang Aboriginal yang tidak diuntungkan dengan adanya penerapan *Mabo Decision*, perlindungan atas situs-situs suci, dan juga kompensasi untuk pengambilan mineral di tanah mereka, serta hak untuk bernegosiasi dengan perusahaan tambang. Keating menyanggupi permintaan tersebut kecuali bagian di mana Pemerintah harus mengganti rugi pengambilan mineral di tanah Aboriginal, dan mereka pun menyetujui hal tersebut.²¹⁴

Komitmen Keating untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukannya dengan mengadakan rapat bagi *Council of Australian Governments* (COAG) pada tanggal 8 dan 9 Juni 1993 di Melbourne. Dalam rapat tersebut, Paul Keating mengajukan sebuah pendekatan dalam skala nasional untuk melindungi dan mengantur hak tradisional penduduk asli. Selain itu, pendekatan tersebut diusulkan Keating untuk menunjukkan integritas Australia dalam memelihara *Racial Discrimination Act* (1975), termasuk pembayaran kompensasi kepada penduduk asli yang telah kehilangan tanah tradisionalnya.²¹⁵ Rapat tersebut kemudian menghasilkan *Framework of Principle* atau sebuah kerangka kerja

²¹² Bartlett, *op.cit.*, hlm. 353.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 353.

²¹⁴ Garden-Gardiner, *op.cit.*, hlm. 8.

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 353.

dengan nama *Mabo Discussion Paper*.²¹⁶ Hal-hal utama yang sangat disoroti dalam kerangka kerja tersebut adalah tekad pemerintahan Keating untuk membentuk suatu sistem pengadilan (*tribunal system*) yang khusus didirikan untuk mengurusi berbagai klaim tanah dari penduduk asli. Poin penting lainnya yang menjadi titik berat dari kerangka kerja tersebut adalah pembuatan rencana undang-undang dalam skala nasional yang dapat mengatur *native title* atau hak asli penduduk dengan legal. Nantinya, kompensasi yang akan diterima oleh penduduk asli yang kehilangan tanah tradisionalnya akan ditanggung bersama-sama oleh Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian. Tetapi kemudian terdapat satu ratifikasi dalam kerangka tersebut yaitu pernyataan bahwa kompensasi yang akan dibayarkan kepada para penduduk asli akan ditanggung secara penuh oleh Pemerintah Federal tanpa melibatkan Pemerintah Negara Bagian.²¹⁷ Jika dianalisis hal ini menjadi manuver atau taktik Pemerintahan Keating agar negara-negara bagian dapat ikut menerapkan kebijakan ini dengan cepat tanpa perlu melakukan banding ke *High Court*.

Pada tanggal 18 Juni 1993, Keating secara resmi mengumumkan bahwa *Mabo Decision* akan menjadi dasar dari pembentukan undang-undang legislatif terkait hak tradisional penduduk asli. Pada hari yang bersamaan, Lois O'Donoghue yang merupakan perwakilan *Aboriginal and Torres Strait Islanders Council* (ATSIC) Australia, berbicara di depan *United Nations Working Group on Indigenous Populations* di Jenewa, Swiss. O'Donoghue menegaskan bahwa Perdana Menteri Keating benar-benar berkomitmen untuk menaati isi *draft*, rancangan, dari *Declaration on Rights of Indigenous People* yang sedang dibahas di PBB.²¹⁸ Sikap Pemerintahan Keating yang berusaha memberikan keadilan bagi para penduduk asli ini disambut baik oleh negara-negara anggota PBB lainnya.

Premier Court tentu saja menolak usulan dari Perdana Menteri Keating tersebut. Pada *Western Australia Liberal Party's State Conference* yang diadakan pada bulan Juli 1993, Court dan Hassel memulai kampanye untuk menolak usulan tersebut. Court meminta Pemerintah Federal untuk membatasi kekuatan legislatif

²¹⁶ "Non-Aboriginal responses to land and water rights and Native Title", http://hsc.csu.edu.au/ab_studies/part2/land/aboriginality_and_land/alresponses.html, diakses pada 10 Maret 12.53 WIB.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Garden-Gardiner, *op.cit.*, hlm. 14.

dari penerapan *Mabo Decision* dan *Racial Discrimination Act* (1975) agar tiap negara bagian bisa mendapatkan kebebasan dalam mengatur konstitusi mereka terkait hak tanah penduduk asli. Menjawab berbagai penolakan yang disuarakan oleh banyak pihak, Henry Reynolds menulis argumentasinya dalam surat kabar *The Australian* yang diterbitkan pada 3 Juli 1993. Reynolds mengatakan kalau pemimpin-pemimpin konservatif Australia tersebut jauh lebih tidak peduli pada hak orang-orang Aborigin dibandingkan dengan para aristokrat Inggris 150 tahun yang lalu. Argumentasi serupa dilayangkan oleh Kenneth Davidson, seorang jurnalis terkenal dari surat kabar *The Age*. Davidson berargumentasi bahwa *Mabo Decision* tidak bisa dipisahkan dari proses rekonsiliasi sampai rekonsiliasi itu sendiri berhasil dicapai. Apapun yang telah dibangun negara ini, sesungguhnya dibangun di atas fondasi yang sangat lemah dan inilah yang akan menghalangi kesempatan Australia untuk mencapai potensi ekonomi dan kemanusiaan yang maksimal.²¹⁹

Tetapi tetap saja, pada pidatonya di Sydney tanggal 24 Agustus 1993, *Premier Court* menyatakan bahwa Western Australia tidak perlu membayar kompensasi atas kerugian yang diderita orang-orang Aborigin dengan alasan Ratu Victoria yang memulai penderitaan mereka saja tidak memberikan kompensasi kepada mereka.²²⁰ Negara Bagian Victoria pun mendukung keputusan Western Australia untuk menolak penerapan *Mabo Decision*. Pemimpin Oposisi Queensland dari Partai Nasional, Rob Borbridge, mengatakan pada media bahwa penerapan *Mabo Decision* akan mengancam perusahaan-perusahaan tambang untuk membayar kompensasi ke orang-orang Aborigin terhitung tahun 1788, yaitu sejak kedatangan bangsa Eropa.²²¹

Court memulai aksinya pada 4 November 1993, Pemerintah Negara Bagian Western Australia dengan mengeluarkan RUU *Land (Title and Traditional Usage) Act* (1993) yang bertujuan untuk melawan penerapan dari *Mabo Decision*. RUU tersebut mengatur bahwa negara bagian Australia memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur hak tradisional penduduk asli. Hal ini menunjukkan keunikan sistem politik yang dimiliki pemerintahan di Australia di mana

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

²²⁰ Bartlett, *op.cit.*, hlm. 354.

²²¹ Garden-Gardiner, *op.cit.*, hlm. 18.

Pemerintah Negara Bagian tetap memiliki independensi yang bisa diterapkan di wilayahnya tanpa perlu mengikuti Pemerintah Federal, selama kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah Federal. Selain itu, penduduk asli yang bisa membuktikan keberlanjutan hubungan tradisional dengan tanah yang diklaimnya, hanya bisa menikmati 20% dari luas tanah yang mereka klaim. RUU ini nantinya akan disahkan di Parlemen Negara Bagian Western Australia, satu bulan sebelum pengesahan dari penerapan *Mabo Decision* secara legislatif.²²² Nantinya, undang-undang *Land (Title and Traditional Usage) Act* (1993) ini akan dituntut oleh Pemerintahan Keating ke *High Court* pada tahun 1995 dengan alasan bahwa UU tersebut melanggar *Racial Discrimination Act* (1975). Nama legal dari kasus tersebut adalah *The State Western Australia v The Commonwealth* (1995).²²³

4.2. Lahirnya *Native Title Act* (1993)

Kerangka kerja yang dihasilkan dari rapat *Council of Australian Governments* (COAG) pada bulan Juni 1993 sebelumnya kemudian menjadi dasar dari dikeluarkannya *Mabo Bill*, sebuah rancangan undang-undang (RUU) terkait hak penduduk asli. Untuk mengesahkan RUU tersebut, pertama-tama RUU harus diperkenalkan kepada *House of Representatives* (Dewan Perwakilan Rakyat) dan *Senates* (Senat). *House of Representatives* dan *Senates* inilah yang nantinya akan mengesahkan RUU tersebut melalui debat parlemen.²²⁴ Pada bulan Desember 1993, Pemerintahan Keating memperkenalkan *Mabo Bill* ke *House of Representatives* dan *Senates*. Keating menegaskan bahwa *Mabo Bill* merupakan sebuah RUU yang mendesak sehingga harus segera disahkan.²²⁵ Hal tersebut dikarenakan banyaknya berita yang makin menimbulkan keresahan publik. Salah satunya adalah berita bahwa orang-orang *Macassan* (orang-orang Makassar yang berasal dari Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Aru di wilayah timur Indonesia),

²²² Bartlett, *op.cit.*, hlm. 354.

²²³ “High Court of Australia, Western Australia v Commonwealth [1995] HCA 47; (1995) EOC 92-687 (extracts); (1995) 69 ALJR 309; (1995) 183 CLR 373 (15 September 1995)”, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1995/47.html>, diakses pada 1 Maret 2015, pukul 20.10 WIB.

²²⁴ “Making a Law”, <http://www.peo.gov.au/learning/fact-sheets/making-a-law.html>, diakses pada 12 Maret 2015, pukul 21.48 WIB.

²²⁵ Paul Chamberlin, “Senate Divided Over Mabo”, *Sydney Morning Herald*, 15 Desember 1993, hlm. 6.

bisa melakukan klaim atas tanah tradisional mereka di utara Australia.²²⁶ Tentu saja hal ini segera dibantah oleh Gareth Evans, *Minister for Foreign Affairs and Trade*, yang mengatakan bahwa undang-undang legislatif terkait *Mabo Decision* harus segera dibuat karena akan berdampak buruk bagi ekonomi Australia.²²⁷

Debat parlemen terkait *Mabo Bill* berlangsung sangat lambat karena banyaknya amandemen yang diajukan oleh berbagai pihak. Oposisi terhadap *Mabo Bill* paling keras disuarakan oleh *National Farmers' Federation* dan *Australian Mining Industry Council*.²²⁸ Tetapi Pemerintah memberi jaminan kepada mereka bahwa petani dan industri tambang tidak akan mendapatkan kesulitan dalam memperbarui kontrak sewa mereka.²²⁹ Oposisi ini dilakukan karena mereka takut tanah yang mereka tempati saat itu akan diberikan kepada orang-orang Aboriginal. Kritik keras terhadap *Mabo Bill* juga datang dari John Hewson, Pemimpin Oposisi dari Partai Liberal. Hewson berpandangan bahwa *Mabo Bill* merupakan suatu kebijakan yang buruk bagi orang-orang Aboriginal, buruk bagi perekonomian, dan buruk bagi bangsa Australia sendiri.²³⁰ Hal ini dikarenakan *Mabo Bill* memiliki kerangka yang sama dengan *Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act (1976)*.²³¹ Artikel tersebut menggambarkan bagaimana kebijakan *Land Rights* di Northern Territory memiliki dampak yang kurang baik bagi perekonomian mereka. Diargumentasikan bahwa Negara Bagian Queensland dan Western Australia akan mengalami hal yang serupa kecuali Pemerintah nantinya bisa memberikan pengecualian atas penerapan *Mabo Bill* di kedua negara bagian tersebut. Perdebatan *Mabo Bill* ini menunjukkan dinamika politik yang bisa saja terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini, pemerintahan Federal

²²⁶ Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, orang-orang Makassar sudah menemukan dan melakukan aktivitas di utara Australia. Umumnya aktivitas tersebut berkaitan dengan perburuan ikan dan teripang serta perdagangan yang mereka lakukan dengan orang-orang Aboriginal di Arnhem Land, Northern Territory. Hal ini nantinya membuat Australia dan Indonesia mengalami persengketaan hingga berakhir di meja hijau seperti dalam kasus Ahsmore Reef. Ashmore Reef atau yang disebut dengan Pulau Pasir dalam bahasa Indonesia, berlokasi di antara perairan di utara Australia dan Pulau Rote, Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, penduduk asli Indonesia itu telah melakukan aktivitas di pulau tersebut sehingga mereka merasa bahwa pulau tersebut masih milik mereka. Namun di mata hukum Australia, penduduk asli Indonesia itu telah melanggar batas kedaulatan negara Australia.

²²⁷ Garden-Gardiner, *op.cit.*, hlm. 22.

²²⁸ Paul Chamberlin, "Three Nationals May Back Mabo", *Sydney Morning Herald*, 17 Desember 1993, hlm. 4.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ "The Mabo Turning Point", *Sydney Morning Herald*, 23 Desember 1993, hlm. 8.

²³¹ Geoffrey Blainey, "Mabo Assails Equality", *The Age*, 18 Desember 1993, hlm. 2.

yang dipimpin oleh Partai Buruh mendapatkan tantangan dari Oposisi Partai Liberal. Begitu pula sebaliknya, jika Partai Liberal berkuasa, biasanya akan mendapatkan tantangan dari Oposisi Partai Buruh.

Dalam tahap ini, *Mabo Bill* telah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh, Partai Demokrat, dan *Greens Party*. Keating juga sangat mengharapkan dukungan dari *National Farmers' Federation* agar *Mabo Bill* bisa disahkan.²³² Kritik lain terhadap *Mabo Bill* juga diutarakan oleh Djuran Bungeleene yang merupakan juru bicara dari *South East United Indigenous Nations*.²³³ Ia mengatakan bahwa *Mabo Bill* masih memiliki banyak kekurangan dan harus direvisi kembali. Untuk menukseskan *Mabo Bill*, Pemerintah harus mendengarkan suara dari organisasi-organisasi Aborigin dan juga usul amandemen terhadap RUU tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Desember 1993, Pemerintah Federal bersedia memberikan waktu lebih untuk debat parlemen hingga hari Natal.²³⁴ Tujuan dari penundaan tersebut adalah agar *Senates* dapat mendiskusikan kembali amandemen-amandemen yang diinginkan oleh semua pihak.

Walaupun banyak kritik yang tertuju pada dirinya, Keating tetap meminta *Senates* untuk terus berdiskusi hingga *Mabo Bill* bisa disahkan. Keating juga tidak memedulikan rayuan-rayuan dari para *Premier* Negara Bagian dan juga perusahaan-perusahaan tambang untuk menangguhkan *Mabo Bill*.²³⁵ Partai Liberal sebagai pihak Oposisi juga terus menekan Pemerintahan Paul Keating dengan mengecap *Mabo Bill* sebagai “*fragile consensus*”, sebuah konsensus yang rapuh.²³⁶ Sebagai jawaban dari kritik-kritik yang dilayangkan pihak Oposisi kepadanya, Keating menyatakan kepada media, “*No amount of mean-spirited filibustering by the Liberal Party . . . is going to see this country denied the opportunity of reaching a just and decent settlement with the indigenous Australians.*” (“Tidak ada jumlah kekejilan dan penguluran waktu dari Partai

²³² Margaret Easterbrook, “Mabo Bill in Chaos As Farmers Walk Out”, *The Age* 20 Desember 1993, hlm. 1.

²³³ Rosemary West, “Mabo Bill Is Racist, Says Aboriginal Coalition,” *The Age*, 21 Desember 1993, hlm. 4.

²³⁴ Margaret Easterbrook, “Mabo Bill in Chaos As Farmers Walk Out”, *The Age*, 20 Desember 1993, hlm. 1.

²³⁵ Geoffrey Barker, “Liberal Tension Simmers Over Mabo”, *The Age*, 21 Desember 1993, hlm. 4.

²³⁶ Paul Chamberlin, “PM Adamant Mabo Will Pass”, *Sydney Morning Herald*, 21 Desember 1993, hlm. 1.

Liberal . . . yang bisa membuat negara ini menolak kesempatan untuk meraih penyelesaian yang layak dengan para penduduk asli Australia.”) Terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Keating bahwa argumentasi atau penolakan apapun yang disampaikan oleh para Senator dari pihak Oposisi, tidak akan mengurungkan niatnya untuk mengesahkan *Mabo Bill*.

Pada tanggal 22 Desember 1993, perjuangan Pemerintahan Paul Keating dalam mengesahkan *Mabo Bill* membawa hasil. *Mabo Bill* mendapatkan 34 dari 40 suara yang ada di Parlemen.²³⁷ Setelah ditandatangani oleh *Governor-General* (Gubernur Jenderal) William George Hayden (1989-1996) yang merupakan wakil dari Ratu Inggris di Australia, *Mabo Bill* secara resmi disahkan sebagai suatu undang-undang dengan nama *Native Title Act* (1993). Parlemen Federal mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan aktif diberlakukan di Australia mulai tanggal 1 Januari 1994.²³⁸ Surat kabar *Sydney Morning Herald* menyatakan bahwa Perdana Menteri Paul Keating berhak mendapatkan pujian bagi usahanya untuk membawa keadilan bagi penduduk asli Australia. Menanggapi pujian yang diberikan kepadanya, Paul Keating berkata bahwa pengesahan *Mabo Bill* tersebut adalah “. . . triumph of goodwill and co-operation between Australians”, sebuah kejayaan atas iktikad baik dan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Australia. Ini juga menunjukkan keberhasilan program multikulturalisme di Australia.²³⁹

Keating juga menambahkan, “*It is the end of the great lie of terra nullius and the beginning, we all hope, of a new deal, the basis of social justice and reconciliation, . . .*”²⁴⁰ (“Ini adalah akhir dari kebohongan besar dari *terra nullius*, dan kita harapkan sebagai awal dari sebuah perjanjian baru, sebagai dasar dari keadilan sosial dan rekonsiliasi . . .”) Ia juga menyebutkan bahwa *Native Title Act* (1993) ini akan menjadi kerangka untuk mengimplementasikan keputusan *High Court* terhadap tuntutan orang-orang Meriam yang dipimpin oleh Eddie Mabo. Di bawah undang-undang tersebut, semua tanah yang sedang disewa oleh para petani

²³⁷ Geoffrey Barker dan Margaret Easterbrook, “Mabo – History Is Made”, *The Age*, 22 Desember 1993, hlm. 1.

²³⁸ Michael Millett, “PM Deserves Credit for Getting Mabo Over the Line”, *Sydney Morning Herald*, 22 Desember 1993, hlm. 6.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Barker dan Easterbrook, *op.cit.*, hlm. 1.

dan perusahaan tambang, secara legal dijamin tidak akan diganggu oleh tuntutan penduduk asli. Hal ini merupakan salah satu amandemen yang diterapkan dalam *Mabo Bill* agar RUU tersebut bisa menang dalam debat parlemen. Bagi penduduk asli, *Native Title Act* akan mengatur tata cara agar mereka dapat dibantu untuk membeli tanah yang dapat mereka tinggali. Walaupun demikian, Paul Keating mengakui kekhawatirannya jika *Native Title Act* akan menghadapi tantangan di *High Court* yang diajukan oleh negara-negara bagian. Selain itu, Direktur Eksekutif dari *Australian Mining Industry Council*, Lauchlan McIntosh mengatakan bahwa *Native Title Act* merupakan sebuah kekacauan dan sebuah undang-undang yang membingungkan.²⁴¹

Menurut *Native Title Act*, agar bisa mengklaim hak tanah tradisional, penduduk asli berkewajiban untuk membuktikan kelanjutan hubungan tradisional mereka dengan tanah yang diklaim pasca kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia. Nantinya, akan ada badan yang dibentuk untuk mewadahi klaim-klaim penduduk asli yang bertugas menyeleksi klaim tersebut sebelum berkasnya dilimpahkan ke *High Court*. Pemerintah juga akan membayarkan kompensasi berupa dana tunai kepada penduduk asli yang tidak mendapatkan keuntungan dari *Native Title Act*. Selanjutnya, Pemerintahan Keating berencana untuk mendirikan *Aboriginal Support Groups*, organisasi-organisasi yang didirikan guna membantu para penduduk asli baik secara moral ataupun materi dalam melakukan klaim atas tanah tradisionalnya. Pemerintah juga akan membentuk sebuah kelompok panitia yang berasal dari Parlemen Federal untuk meninjau pelaksanaan *Native Title Act* setiap lima tahun sekali.²⁴²

4.2.1 Penerapan *Native Title Act* (1993)

Native Title Act disahkan oleh Parlemen Federal Australia 565 hari setelah *Mabo Decision* dikeluarkan oleh High Court of Australia. Selain mempermudah proses klaim mereka atas hak tradisional yang kini diakui oleh sistem hukum Australia, undang-undang ini juga akan membantu penduduk asli yang berprofesi sebagai nelayan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan ikan

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

besar di laut tempat mereka memiliki hak tradisional yang sah.²⁴³ Meskipun *Native Title Act* memberikan keuntungan yang positif bagi penduduk asli Australia, tidak semua masalah mengenai hak tradisional tersebut telah terpecahkan. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih harus diperhatikan. Selain itu, besar kemungkinan jika negara-negara bagian terutama Western Australia akan mengajukan tuntutan hukum atas kebijakan tersebut ke *High Court*.²⁴⁴ Paul Keating sendiri telah memperingatkan negara-negara bagian tersebut untuk tidak menuntut *Native Title Act* ke *High Court*. Ia mengatakan, “*The legislation is constitutionally sound. Any challenge to it would prove fruitless and be counter to the common objective of certainty in land management . . .*”, kebijakan tersebut aman secara konstitusional. Tindakan apapun untuk melawannya akan dibuktikan tidak berguna. Keating juga menambahkan bahwa prioritas utamanya adalah untuk menyiapkan dana yang diperlukan untuk biaya operasional penerapan *Native Title Act*.²⁴⁵

Native Title Act (1993) sendiri menurut Perdana Menteri Paul Keating merupakan “. . . a response to another milestone: the High Court’s decision in the Mabo Case”, sebuah respon bagi keputusan *High Court* atas Kasus Mabo.²⁴⁶ Selain itu, tujuan utama dari *Native Title Act* menurut Pasal 3 kebijakan tersebut adalah untuk menyediakan perlindungan bagi hak tradisional, mengatur standar bagi proses klaim di masa depan, dan menyediakan mekanisme bagi proses klaim.²⁴⁷ Professor Bryan Horrigan dari Departemen Hukum, Queensland University of Technology mengatakan:

“*Native title is a traditional Aboriginal rights of access, use or occupation of land. These rights are based on traditional laws and customs and can include any combination of living, hunting, gathering, fishing, and ceremonial rights of access, use and occupation will vary depending on the laws and customs of a particular group.*”²⁴⁸

²⁴³ Paul Chamberlin, “Mabo A New Beginning, Says PM”, *Sydney Morning Herald*, 22 Desember 1993, hlm. 1.

²⁴⁴ “The Mabo Turning Point”, *Sydney Morning Herald*, 23 Desember 1993, hlm. 8.

²⁴⁵ Margaret Easterbrook, “PM Warns Street Not to Challenge Mabo”, *The Age*, 24 Desember 1993, hlm. 5.

²⁴⁶ Brian Stevenson, *The Wik Decision and After*, (Brisbane: Queensland Parliamentary Library, 1996), hlm. 9.

²⁴⁷ “Native Title Act 1993”, http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nta1993147/, diakses pada 7 Maret 205, pukul 9.10 WIB.

²⁴⁸ Garet Griffith, *the Native Title Debate: Background and Current Issues*, (Sydney: NSW Parliamentary Research Service, 1998).

(“*Native title* adalah hak tradisional orang *Aborigin* untuk mengakses menggunakan atau menduduki tanah. Hak ini didasarkan atas hukum tradisional dan adat yang bisa menggabungkan gaya hidup, berburu, pengumpul, memancing, dan hak untuk melakukan upacara adat, akses, penggunaan, dan pendudukan tersebut akan berbeda tergantung kepada hukum dan adat atas suatu kelompok (*Aborigin*).”)

Sedangkan menurut Pasal 223 *Native Title Act* (1993), definisi atau pengertian dari *Native Title* itu sendiri adalah:

1. *The expression native title or native title rights and interests means the communal, group or individual rights and interests of Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders in relation to land or waters, where:*
 - a) *The rights and interests are possessed under the traditional laws acknowledged, and the traditional custom observed, by the Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders; and*
 - b) *The Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders, by those laws and customs have a connection with the land or waters; and*
 - c) *The rights and interests are recognized by the common law of Australia*
 2. *Without limiting subsection (1), rights and interests in that subsection includes hunting, gathering, or fishing, rights and interest.*²⁴⁹
1. Ungkapan *native title* memiliki makna hak komunal, kelompok atau individu atas hak dan kepentingan orang-orang *Aborigin* dan Penduduk Kepulauan Selat Torres terkait masalah tanah atau air, di mana:
 - a) Hak dan kepentingan orang *Aborigin* dan Penduduk Kepulauan Selat Torres di bawah hukum tradisional diakui dan adat tradisional akan diobservasi; dan
 - b) Orang *Aborigin* dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, menurut hukum dan adat tersebut memiliki hubungan dengan tanah atau air; dan
 - c) Hak dan kepentingan tersebut diakui oleh sistem hukum Australia.
 2. Tanpa membatasi ayat (1), hak dan kepentingan dalam ayat tersebut meliputi berburu, meramu, memancing, hak dan kepentingan.

Janji Keating kepada komunitas *Aborigin* untuk mendirikan suatu *Native Title Tribunal System* akan ia tepati pada tahun 1994. Untuk sementara waktu, Keating telah membentuk *Canberra's Administrative Appeals Tribunals* sebagai badan penjaga yang bertugas menerima pendaftaran dari klaim-klaim yang diajukan para penduduk asli dan juga pihak lain yang ingin mengetahui status tanahnya.²⁵⁰ Pada tanggal 31 Desember 1993, atas perintah Keating, *Minister for Aboriginal and Torres Strait Islanders Affairs* Robert Tickner memanggil pemimpin Oposisi John Hewson. Tujuan Tickner bertemu dengan Hewson adalah

²⁴⁹ “Native Title Act 1993”, http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nta1993147/, diakses pada 7 Maret 205, pukul 9.10 WIB.

²⁵⁰ Stephen Ellis dan Linda Morris, “New Year Clean-Out in Mabo, Tax, Training”, *Sydney Morning Herald*, 31 Desember 1993, hlm. 2.

untuk meminta Hewson mempertimbangkan kembali penolakannya terhadap *Native Title Act* (1993).²⁵¹

Diperkirakan klaim *native title* terbanyak nantinya akan datang dari Western Australia, Northern Territory, dan Queensland. Hal ini karena banyaknya status *Crown Land* yang kosong di wilayah tersebut serta jumlah populasi terbanyak yang terkonsentrasi di wilayah mereka. Pemerintah mengatakan bahwa pejabat dan anggota dari *Native Title Tribunal* akan diberikan pelatihan intensif mengenai kebudayaan Aboriginal serta cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Hal ini dikarenakan klaim yang diajukan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena hubungan adat dan religius penduduk asli dengan tanah yang diklaim tidak sama dari satu kelompok ke kelompok lain. *Native Title Tribunal* juga akan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada penduduk asli mengenai skema pengajuan klaim dan juga memperkenalkan mereka kepada metode mediasi dan negosiasi agar tidak perlu membawa tuntutan hingga ke *High Court*.²⁵²

Native Title Act (1993) mengatur bahwa agar bisa melakukan klaim atas hak tradisional mereka, penduduk asli harus bisa membuktikan hubungan mereka dengan tanah yang diklaim tersebut. Hubungan ini harus memiliki keberlanjutan bahkan setelah kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia. Inilah yang nantinya menjadi masalah bagi sebagian kelompok Aboriginal. Banyak di antara mereka telah dipisahkan dari keluarga dan gaya hidup mereka sejak dulu seperti dalam contoh kasus *The Stolen Generations*. Mereka yang menjadi korban beserta keturunannya tidak akan bisa mengajukan klaim terhadap tanah. Walaupun demikian, Paul Keating menjamin bahwa kelompok ini akan mendapatkan tunjungan sosial yang bisa membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik.²⁵³

Di antara pujian yang didapat karena keberhasilannya dalam *Native Title Act*, Paul Keating juga mendapatkan berbagai kritik atas kebijakan tersebut. *Sydney Morning Herald* menyebutkan bahwa berbeda dengan penyelesaian kasus hak tanah tradisional yang terjadi di Selandia Baru dan Afrika Selatan, Australia

²⁵¹ Margaret Easterbrook, “Give Mabo Act A Chance – Tickner”, *The Age*, 1 Januari 1994, hlm. 4.

²⁵² Peter Rees, “In the Mabo Hot Seat”, *The Sun Herald*, 2 Januari 1994, hlm. 21.

²⁵³ Pat O’Shane, “25. What Should Mabo Mean?”, *The Age*, 24 Januari 1994, hlm. 12.

masih memikirkan kepentingan ekonomi mereka dengan mengamankan tanah-tanah yang sebelumnya telah disewa atau ditempati oleh bagsa kulit putih, dari klaim Aborigin. *“The law changes side, but the judges didn’t order stolen land to be handed back – as is happening nowadays in New Zealand and South Africa – but said what was left might belong to Aborigines.”* (“Hukum memang berpindah sisi, tapi para hakim tidak memerintahkan tanah yang dicuri untuk dikembalikan – seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini di Selandia Baru dan Afrika Selatan – tapi dikatakan bahwa apa yang tersisa baru bisa menjadi milik Aborigin.”) Dengan demikian, penduduk asli hanya bisa mengklaim tanah yang tersisa dan masih harus membutkikan hubungan tradisional mereka terhadap tanah setelah mengajukan klaim.²⁵⁴ Sekitar 42% dari tanah Australia merupakan subjek untuk *pastoral leases* yang disewakan untuk menggembala ternak.²⁵⁵ *Pastoral leases* ini akan dikecualikan dari jenis atau status tanah yang bisa diklaim oleh penduduk asli. Tentu hal ini mengkhawatirkan beberapa pihak terutama kelompok Aborigin yang merasa memiliki hak tradisional di atas tanah berstatus *pastoral leases*. Kritik dari pers terhadap Paul Keating dan kebijakan pemerintahannya ini menunjukkan bahwa pers memiliki kekuatan tersendiri dalam sistem politik pemerintahan Australia. Pers bukan merupakan corong pemerintah yang selalu setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan, tapi sebagai pihak yang bebas mengapresiasi positif, mengkritik atau memberikan masukan kepada pemerintah atas kebijakan politiknya.

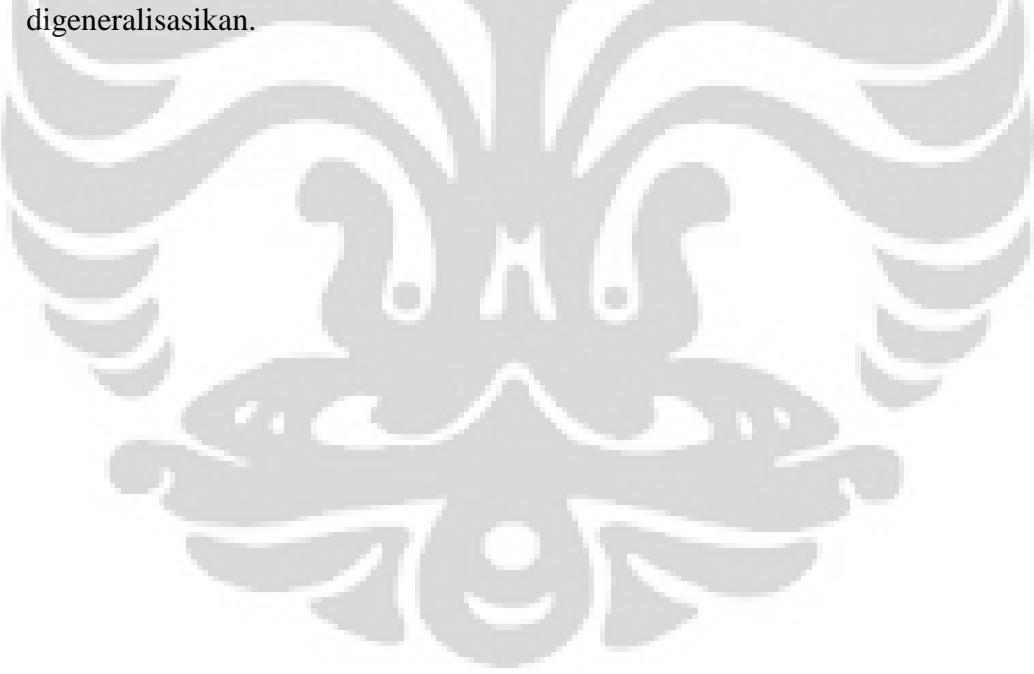
Hal yang perlu disoroti kembali adalah bagaimana nantinya *Native Title Act* dan *Native Title Tribunal* akan membantu kelompok-kelompok penduduk asli untuk melakukan klaim ke pengadilan dan menerima kompensasi. Paul Keating pun mengajak masyarakat Australia non-Aborigin untuk tidak melihat kebijakan ini sebagai ancaman, tetapi sebagai suatu terobosan dalam proses rekonsiliasi hubungan Australia dengan penduduk asli.²⁵⁶ Saat Pemerintah masih melakukan debat di *Senates* terkait *Mabo Bill*, pada 30 Juni 1993, orang-orang Wik yang tinggal di utara Queensland, mengajukan tuntutan legal ke *High Court* atas hak

²⁵⁴ David Marr, “Primal Fear”, *Sydney Morning Herald*, 30 Mei 1997, hlm. 1.

²⁵⁵ Paul Keating, “The 10-point Plan that Undid the Good Done on Native Title”, *Sydney Morning Herald*, 1 Juni 2011.

²⁵⁶ Griffith, *op. cit.*

tanah tradisional mereka.²⁵⁷ Tuntutan ini terinspirasi oleh kemenangan Mabo di *High Court* setahun sebelumnya. Berbeda dengan kasus Mabo, kasus Wik ini diajukan ke *High Court* bukan atas nama individu tetapi kelompok. Orang-orang Wik sendiri tidak hanya berasal dari satu suku, tetapi merupakan kumpulan dari berbagai suku Aborigin yang tinggal di sepanjang Sungai Holroyd sampai ke Watson di sebelah barat laut Semenanjung Cape York.²⁵⁸ Pada waktu klaim diajukan, wilayah tersebut telah disewa oleh dua perusahaan tambang dan merupakan tempat yang disewakan Pemerintah untuk menggembalakan ternak (*pastoral leases*), yang tidak termasuk dari subjek *native title claim*. Namun, pada 23 Desember 1996, dengan suara 4:3, *High Court* memutuskan bahwa orang-orang Wik secara legal masih memiliki hak tradisional terhadap tanah yang mereka klaim.²⁵⁹ Jika dianalisis hal ini membuktikan bahwa hak tradisional penduduk asli bisa berlaku di atas tanah *pastoral leases* dan menunjukkan bahwa setiap klaim berbeda dengan klaim lainnya sehingga penanganannya tidak bisa digeneralisasikan.



²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Orang Wik merupakan orang Aborigin pertama yang mengalami kontak dengan bangsa Eropa. Di tahun 1606, Willem Janszoon berlayar di antara Sungai Holroyd dan Sungai Archer (yang nantinya akan menjadi negara bagian Queensland) ketika ia bertemu dengan orang-orang WIk dalam Stevenson, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

BAB 5

KESIMPULAN

Klaim bangsa Inggris atas benua Australia sebagai koloninya, membuat benua tersebut dan penduduk asli yang menghuninya menjadi subjek dari hukum Inggris yang menyatakan bahwa seluruh tanah di benua Australia adalah properti dari Kerajaan Inggris. Penerapan hukum ini dilatarbelakangi oleh penaklukan raja-raja Anglo-Saxon di Inggris oleh seorang adipati dari Normandy, Perancis, yang bernama William di tahun 1066. Karena penaklukannya ini, seluruh tanah dan kekuasaan para raja Anglo-Saxon secara mutlak menjadi miliknya. Sistem hukum ini dan juga pandangan bahwa benua Australia adalah *terra nullius*, sebuah konsep dalam bahasa Latin yang berarti tanah tidak bertuan, membuat Kerajaan Inggris bebas menggunakan tanah di Australia tanpa menghiraukan kepemilikan penduduk asli atas tanah tersebut.

Kepentingan ekonomi Pemerintah Kolonial Inggris di Australia lebih besar dibandingkan dengan kepedulian mereka kepada penduduk asli, terutama karena bibit domba merino yang berasal dari Spanyol bisa diternakkan dengan sukses di Australia dan juga kondisi Australia yang kaya akan mineral. Pandangan bangsa Eropa serta kepentingan ekonomi mereka membuat bangsa Aboriginal harus dikonsentrasi ke dalam wilayah-wilayah reservasi yang khusus disediakan Pemerintah. Bisa disimpulkan bahwa ini bukan merupakan satu-satunya alasan tunggal. Alasan lain yang mendasari kebijakan ini adalah agar Pemerintah dapat mengakses tanah tradisional penduduk asli Australia tersebut dengan lebih leluasa.

Meluasnya pengaruh televisi dalam komunitas-komunitas Aboriginal membantu mereka mengakses berita dari dunia luar mengenai gerakan (*movement*) rakyat berkulit hitam di negara-negara lain seperti di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Sebelumnya, sejak Perang Dunia II berakhir, bangsa Aboriginal yang sudah mengalami kontak dengan masyarakat Australia non penduduk asli di *mainland* Australia ini pun menyadari perlakuan diskriminatif yang kerap mereka terima dari Pemerintah Australia. Menyadari bahwa mereka telah kehilangan tanah tradisionalnya, mulailah muncul ide untuk melakukan suatu gerakan dengan

cita-cita serupa untuk mengklaim kembali tanah milik mereka yang diwariskan nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Gerakan bangsa Aboriginal untuk menuntut hak atas tanah ini dikenal dengan nama *land rights*.

Sebelumnya, untuk mengajukan tuntutan *land rights* ke *High Court*, penduduk asli Australia harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki ikatan ekonomi dan juga religius dengan tanah yang dituntut. Orang Aboriginal di *mainland Australia* dirugikan dengan hal ini karena mereka tentu tidak memiliki ikatan ekonomi dengan tanah yang dituntut mengingat gaya hidup mereka hanya sebagai *hunter-gatherer*. Oleh karena itu, tidak ada satupun tuntutan *land rights* yang dimenangkan di Pengadilan berdasarkan argumentasi tersebut. Hal ini terus berlanjut hingga dua belas tahun setelah kasus orang-orang Aboriginal Yolngu ini diajukan ke pengadilan, seorang Penduduk Kepulauan Selat Torres dari Pulau Murray yang bernama Eddie Mabo, mengajukan klaim atas tanah tradisional yang dimiliki keluarganya secara turun-temurun di Desa Las, Pulau Murray. Mabo merupakan salah satu Penduduk Kepulauan Selat Torres yang berbeda dengan kerabat dan rekan-rekannya di pulau, tumbuh dengan memahami pentingnya berbahasa Inggris dan mempelajari situasi politik dan hukum terkait penduduk asli di Australia.

Adapun tuntutan Mabo ini, didasari dengan klaimnya bahwa Kepulauan Selat Torres bukan merupakan subjek dari *Crown Land*, tanah kerajaan, milik kerajaan Inggris karena penduduknya masih memiliki independensi untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pemerintah Queensland dalam pembelaannya tentu menolak klaim tersebut. Mereka berpendapat bahwa Kepulauan Selat Torres merupakan subjek dari *Crown Land* dan tidak memiliki hak kepemilikan tanah secara legal di tanah tersebut. Perlu diketahui bahwa jalur sejarah yang dilalui oleh bangsa Aboriginal sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh Penduduk Kepulauan Selat Torres. Apabila orang-orang Aboriginal menjadi subjek dari praktek hukum Australia yang mengharuskan mereka meninggalkan tanah tradisional tempat mereka berburu dan meramu untuk pindah ke wilayah reservasi tanpa fasilitas, seperti akses ke pendidikan, yang memadai. Penduduk Kepulauan Selat Torres tidak pernah menjadi subjek hukum tersebut dan tidak seperti orang-orang Aboriginal, mereka

bukanlah *hunter-gatherer* tetapi lebih kepada *gardener* yang hidupnya berkebun dan juga melaut.

Memang Pemerintah Kolonial Inggris telah mengirimkan misionaris ke Kepulauan Selat Torres untuk membawa mereka masuk ke dalam agama Kristen dan meninggalkan praktik pemujaan dewa tradisional yang biasa mereka lakukan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pihak Mabo membenarkan argumentasi tersebut, namun mereka menambahkan bahwa walaupun mereka telah menjadi umat Kristiani mereka tidak pernah meninggalkan Hukum Malo, yang merupakan ajaran dari dewa mereka, Malo. Walaupun telah memeluk agama Kristen, mereka tetap mempraktikkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya seperti ajaran untuk tidak masuk ke tanah orang lain tanpa permisi.

Selain itu, Pemerintah Kolonial Inggris mengkhususkan Kepulauan Selat Torres sebagai wilayah reservasi penduduk asli Australia. Jika dianalisis, hal ini tidak semata-mata dilakukan untuk melindungi para penduduk asli, namun juga untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka di perairan Selat Torres yang kaya akan hasil laut seperti mutiara. Peraturan Pemerintah Kolonial Inggris ini juga mengatur bahwa tidak ada penduduk asing yang boleh tinggal di Kepulauan Selat Torres tanpa izin Pemerintah kecuali misionaris dan guru. Jika orang-orang Aboriginal dipisahkan dari tanah mereka yang berakibat kepada pemutusan hubungan tradisional mereka terhadap tanah tersebut, Penduduk Kepulauan Selat Torres mendapatkan hak ekslusif untuk tetap melakukan aktivitasnya selama hal tersebut tidak menganggu peraturan dari Pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu hal penting dalam argumentasi Mabo di *High Court of Australia*.

Sadar akan peluang dimenangkannya tuntutan Mabo yang cukup besar di *High Court*, Pemerintah Negara Bagian Queensland kemudian mengeluarkan undang-undang legislatif *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985). UU ini bertujuan untuk penghapusan segala macam bentuk dari hak tradisional penduduk asli yang selamat dari aneksasi wilayah Selat Torres oleh Kerajaan Inggris di tahun 1878 agar argumentasi serta klaim Mabo di *High Court* bisa dipatahkan. Tim Mabo kemudian kembali mengajukan tuntutan ke *High Court of Australia* yang menyatakan keberatannya atas kebijakan Queensland tersebut. Hal fundamental yang mendasari tuntutan Mabo kali ini adalah argumentasi bahwa

kebijakan Queensland itu telah bertentangan dengan *Racial Discrimination Act* (1975) yang dikeluarkan oleh *Commonwealth of Australia*, Pemerintah Persemakmuran.

Racial Discrimination Act (1975) ini sendiri merupakan jawaban dari Pemerintah Australia atas kritik yang disampaikan oleh dunia internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Konstitusi Australia mengatur bahwa Negara Bagian dan Wilayah Teritorial di Australia memiliki otonomi dan independensi untuk mengatur wilayahnya sendiri selama kebijakan yang mereka keluarkan tidak bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Persemakmuran. Dengan adanya sorotan dunia internasional dan juga hukum yang menyatakan bahwa *Queensland Coast Islands Declaratory Act* (1985) bertentangan dengan *Racial Discrimination Act* (1975), *High Court of Australia* di tahun 1988 memutuskan memenangkan tuntutan Mabo atas keberatan yang diajukannya atas kebijakan Queensland tersebut. Kemudian di tahun 1992, melihat bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh tim Mabo sangat valid dan tidak terbatas hanya pada kesaksian lisan saja, enam dari tujuh juri di *High Court* memenangkan klaim Mabo dan penuntut lainnya atas hak tanah mereka di Pulau Murray. Putusan ini akan dikenal dengan nama *Mabo Decision* yang menjadi cikal-bakal dari *Native Title Act* (1993), sebuah kebijakan legislatif yang secara sah mengakui dan melindungi hak tradisional penduduk asli seperti akses ke tanah dan ke air, serta kebebasan bagi mereka untuk melakukan upacara-upacara tradisional.

Pemerintahan Australia yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating bertekad untuk menjadikan *Mabo Decision* sebagai suatu undang-undang legislatif. Ketika rancangan undang-undang telah dikeluarkan dan diperkenalkan ke Senat, terjadi perdebatan yang cukup besar sebagai responnya. Negara-negara bagian seperti Victoria dan Western Australia sangat menolak disahkannya rancangan undang-undang tersebut. Bagi Western Australia, kebijakan ini akan berdampak buruk bagi perekonomian mereka yang dititikberatkan pada hasil tambang yang dilakukan di atas tanah tradisional penduduk asli. Mereka khawatir tanah yang mereka tempati akan menjadi subjek dari klaim penduduk asli. Hal serupa juga diutarakan oleh para petani dan

peternak Australia yang khawatir kontrak sewa mereka akan dihentikan terkait klaim penduduk asli. Oleh karena itu, pihak Oposisi Partai Liberal sangat menentang kebijakan Paul Keating ini.

Sebesar apapun penolakan yang diberikan berbagai pihak terhadap rancangan undang-undangnya, Paul Keating berhasil mengatasi hal tersebut dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan tambang, petani, peternak, dan juga perwakilan dari komunitas Aboriginal guna merevisi rancangan undang-undang tersebut agar bisa diterima secara damai. Akhirnya, di tahun 1993, rancangan undang-undang tersebut berhasil disahkan dan memberikan perubahan alur bagi sejarah Australia yang tadinya mempercayai bahwa Australia berstatus *terra nullius* dan bahwa penduduk asli tidak memiliki hak apapun terhadap benua yang mereka huni bersama. Kemenangan Mabo ini bisa dikatakan menjadi hal yang sangat utama dalam mengubah jalannya alur sejarah Australia tersebut.

Paul Keating sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa bangsa Aboriginal telah lama menderita akibat perbuatan bangsa Eropa kepada mereka. Sudah saatnya bagi Australia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka benar-benar merupakan suatu negara multikultur. Pidato Paul Keating ini nantinya menjadi pintu bagi perdana menteri penerusnya yang juga berasal dari Partai Buruh, Kevin Rudd (2007-2010) yang meminta maaf kepada masyarakat Aboriginal yang merupakan korban *the Stolen Generations*,²⁶⁰ dalam pidatonya di tahun 2008. Tekad Keating untuk menyukkseskan proses pengesahan *Native Title Act* (1993) dipengaruhi oleh latar belakangnya yang berasal dari Partai Buruh. Partai Buruh terkenal atas kebijakan-kebijakan politiknya yang sangat pro Aboriginal. Nantinya *Native Title Act* (1993) ini juga akan mendukung basis bagi penduduk asli untuk mengajukan *land rights* ke *High Court of Australia*.

²⁶⁰ *The Stolen Generations* adalah generasi anak-anak Aboriginal yang diambil dan dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak Aboriginal ini ini dibesarkan dalam institusi kulit putih. Ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Australia dari tahun 1901 hingga tahun 1969. Walaupun begitu, jauh sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan, banyak keluarga kulit putih yang menculik anak-anak Aboriginal untuk dijadikan sebagai penunjuk arah, pembantu rumah tangga, dan buruh di peternakan dalam “The Stolen Generations”, <http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/factsheets/52.html>, diakses pada 8 Maret 2015, pukul 21.59 WIB.

Perubahan pandangan Australia terhadap gerakan *land rights* yang dianggap tidak berdasar hingga penyediaan fasilitas bagi mereka yang ingin melakukan klaim *land rights* menjadi fokus dari penelitian ini seperti yang sudah disimpulkan di atas. Harapannya skripsi ini juga bisa menjadi media perbandingan dan pembelajaran atas hukum tanah dan hak penduduk asli di Australia dengan Indonesia. Studi banding ini nantinya juga diharapkan akan menjadi proses perbaikan diri bagi sistem hukum di Indonesia terkait hukum tanah dan hak penduduk asli.



DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Sydney Morning Herald (23 Desember 1993)

The Age (22 Desember 1993)

Artikel dalam Surat Kabar

Barker, Geoffrey. "Liberal Tension Simmers Over Mabo". *The Age*. 21 Desember 1993.

Barker, Geoffrey; Easterbrook, Margaret. "Mabo – History Is Made". *The Age*. 22 Desember 1993.

Blainey, Geoffrey. "Mabo Assails Equality". *The Age*. 18 Desember 1993.

Chamberlin, Paul. "Three Nationals May Back Mabo". *Sydney Morning Herald*. 17 Desember 1993.

Chamberlin, Paul. "Senate Divided Over Mabo". *Sydney Morning Herald*. 15 Desember 1993.

Chamberlin, Paul. "PM Adamant Mabo Will Pass". *Sydney Morning Herald*. 21 Desember 1993.

Chamberlin, Paul. "Mabo A New Beginning, Says PM". *Sydney Morning Herald*. 22 Desember 1993.

Easterbrook, Margaret. "Mabo Bill in Chaos As Farmers Walk Out". *The Age*. 20 Desember 1993.

Easterbrook, Margaret. "Mabo Bill in Chaos As Farmers Walk Out". *The Age*. 20 Desember 1993.

Easterbrook, Margaret. "PM Warns Street Not to Challenge Mabo". *The Age*. 24 Desember 1993.

Easterbrook, Margaret. "Give Mabo Act A Chance – Tickner". 1 Januari 1994.

Ellis, Stephen; Morris, Linda. "New Year Clean-Out in Mabo, Tax, Training". *Sydney Morning Herald*. 31 Desember 1993.

Gulliatt, Richard. "The Man Who Changed Australia". *Sydney Morning Herald*. 22 Agustus 1997.

Keating, Paul. "The 10-point Plan that Undid the Good Done on Native Title". *Sydney Morning Herald*. 1 Juni 2011.

Marr, David. "Primal Fear". *Sydney Morning Herald*. 30 Mei 1997.

- Millett, Michael. "PM Deserves Credit for Getting Mabo Over the Line". *Sydney Morning Herald*. 22 Desember 1993.
- McGregor, Craig. "Courting Trouble". *Sydney Morning Herald*. 22 Maret 1997.
- O'Shane, Pat. "25. What Should Mabo Mean?". *The Age*. 24 Januari 1994.
- Rees, Peter. "In the Mabo Hot Seat". *The Sun Herald*. 2 Januari 1994.
- Rowse, Tim. *After Mabo: Interpreting Indigenous Traditions*. Carlton: Melbourne University Press. 1993.
- Soares, Singgih. "Komnas Akan Berikan Solusi Masalah Lahan ke Jokowi-JK". *Tempo*. 1 Oktober 2014.
- Solomon, David; Carbon, Deanie; Kennedy, Fiona. "Aborigines Rejoice As High Court Ends Terra Nullius". *The Australian*. 4 Juni 1992.
- Sykes, Roberta. "The Other Side of Mabo". *The Age*. 8 Juni 1995.
- West, Rosemary. "Mabo Bill Is Racist, Says Aboriginal Coalition". *The Age*. 21 Desember 1993.
- Wibisono, S. G. "Dewan Adat Dayak Segel Area Kantor Wilmar Nabati". *Tempo*. 13 Oktober 2014.

Buku

- Atkinson, Alan. *The Europeans in Australia Vol. 1*. Melbourne: Oxford University Press. 1998.
- Bandler, Faith. *Turning the Tide: A Personal History of the Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres Strait Islanders*. Canberra: Aboriginal Studies Press. 1989.
- Beckett, Jeremy. *Torres Strait Islanders: Custom and Colonialism*. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.
- Clark, Jennifer. *Aborigines and Activism: Race, Aborigines and the Coming of the Sixties to Australia*. Crawley: University of Western Australia Press. 2008.
- Franklin, Margaret Ann. *Black and White Australians: An Inter-Racial History 1788-1975*. South Yarra: Heinemann Educational Australia. 1976.
- Garden-Gardiner, John. *The Mabo Debate – A Chronology*. Canberra: Department of the Parliamentary Library. 1993.
- Griffith, Garet. *The Native Title Debate: Background and Current Issues*. Sydney: NSW Parliamentary Research Service. 1998.
- McConnochie, Keith; Hollinsworth, David; Pettman, Jan. *Race and Racism in Australia*. New South Wales: Social Science Press. 1989.

- McGrath, Ann. *Contested Ground: Australian Aborigines under the British Crown*. St. Leonards: Allen & Unwin. 1995.
- Moorehead, Alan. *The Fatal Impact: The Invasion of the South Pacific 1767-1840*. London dan Melbourne: Mead Becket. 1987.
- Reynolds, Henry. *Aborigines and Settlers: The Australian Experience (1788-1939)*. Melbourne: Cassel Australia Limited. 1972.
- _____. *The Other Side of the Frontier: Aboriginal Resistance to the European Invasion of Australia*. Ringwood: Penguins Books Australia Ltd. 1982.
- _____. *The Law of the Land: Challenges the Legal and moral Assumptions Underlying the European Occupation of Aboriginal Australia*. Ringwood: Penguins Books Australia Ltd. 1987.
- _____. *Dispossession: Black Australians and White Invaders*. St. Leonards: Alllen & Unwin. 1989.
- Sanders, W. [ed.]. *Mabo and Native Title: Origins and Institutional Implications*. Canberra: Centre for Aboriginal Economic Policy Research Australian National University. 1994.
- Sharp, Nonie. *No Ordinary Judgement: Mabo, the Murray Islanders' Land Case*. Canberra: Aboriginal Studies Press. 1996.
- Singe, John. *The Torres Strait: People and History*. Queensland: University of Queensland Press. 1989.
- Strelein, Lisa. *Compromised Jurisprudence: Native Title Cases Since Mabo*. Canberra: Aboriginal Studies Press. 2009.
- Stevenson, Brian. *The Wik Decision and After*. Brisbane: Queensland Parliamentary Library. 1996.
- Sutton, Peter. *Native Title in Australia: an Ethnographic Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
- West, Barbara A. *A History of Australia*. New York: Hermitage. 2010.

CD-ROM

- Oxford Advanced Learner's Dictionary: International Student's Edition*. 8th ed. CD-ROM. (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Makalah yang Dipublikasikan

- Basten, John. *A Curious History of the Mabo Litigation*. Makalah yang dipresentasikan dalam *Native Title Conference: Traditional and Change*. Darwin. 2006.

Artikel Jurnal

Lewis P. Hinchman dan Sandra K. Hinchman, “Australia’s Judicial Revolution: Aboriginal Land Rights and the Transformation of Liberalism”. *Polity*. Vol. 31.

Dokumen Lembaga

Les Malezer, “Mabo and the Framework of Dominance”, <http://nationalcongress.com.au/wp-content/uploads/2012/06/20120603Mabo20speech.pdf>. Diakses pada 20 April 2014, pukul 20.26 WIB.

Internet

Colin Howard, “Chapter One: the Racial Discrimination Act 1975 and Mabo”. <http://www.samuelgriffith.org.au/papers/html/volume3/v3chap1.htm>. Diakses pada 2 Maret 2015, pukul 13.02 WIB.

Duncan Kennedy, “Eddie Mabo, the Man Who Changed Australia”. <http://m.bbc.co.uk/news/magazine-18291022>. Diakses pada 14 Desember 2013, pukul 20.17 WIB.

Keon-Cohen, Bryan. “Eddie Mabo and Ors v The State of Queensland (1992)”. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AboriginalLawB/1992/32.html>. Diakses pada 10 Maret 2015, pukul 09.11 WIB.

Janice Gray, “The Lost Promise of Mabo: An Update on the Legal Struggle for Land Rights in Australia with Particular Reference to the Ward and Yorta Torta Decisions”. http://www3.brandonu.ca/library/cjns/23.2/cjnsv23no2_pg305-348.pdf. Diakses pada 10 Maret 2015, pukul 14.02 WIB.

Richard Bartlett, “Political and Legislative Responses to Mabo, [1993] UWA LAW RW 30; (1993) 23 (2)”. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UWALawRw/1993/30.html>. Diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.15 WIB, hlm. 352.

“Australia’s Pearling Industry”. <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/australias-pearling-industry>. Diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.31 WIB.

“Comunal”. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/communal>. Diakses pada 1 April 2015, pukul 19.15 WIB.

“Excerpts from Moynihan’s Finding on Mabo”. <http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/info/excerptsMoynihansFindings.htm>. Diakses pada 1 Desember 2014, pukul 00:07 WIB.

“Gavelkind”. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/gavelkind>, diakses pada 2 Maret 2015, pukul 17.13 WIB.

“Henry Reynolds”. <http://www.austlit.edu.au/austlit/page/A34772>. Diakses pada 2 Maret 2015, pukul 20.31 WIB.

“History of Real Estate Law: The Old English Landholding System”. <http://www.wwlia.org/LegalResources/UK/ID/258/History-of-Real-Estate-Law-The-Old-English-Landholding-System.aspx>. Diakses pada 23 Maret 2015, pukul 21.31 WIB..

“International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”. <http://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html>. Diakses pada 10 Maret 2014, pukul 14.05 WIB.

“Mabo: the Native Title Revolution”. <http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/>. Diakses pada 12 Februari 2015, pukul 19.39 WIB.

“Making a Law”, <http://www.peo.gov.au/learning/fact-sheets/making-a-law.html>. Diakses pada 12 Maret 2015, pukul 21.48 WIB.

“Marine industry - Pearling - Different phases of cultured pearl industry in northern Australia, where Torres Strait Islanders are extensively employed 1970-1972”. www.nla.gov.au. Diakses pada 2 Januari 2015, pukul 12.09 WIB.

“Noble Savage”. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/416988/noble-savage>. Diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.12 WIB.

“Non-Aboriginal responses to land and water rights and Native Title”. http://hsc.csu.edu.au/ab_studies/part2/land/aboriginality_and_land/already_responded.html. Diakses pada 10 Maret 12.53 WIB.

“Norman Conquest”. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/418324/Norman-Conquest>. Diakses pada 1 April 2015, pukul 20.01 WIB.

“Paul Keating’s Redfern Adress”. <http://www.abc.net.au/archives/80days/stories/2012/01/19/3415316.htm>. Diakses pada 11 Maret 2015, pukul 17.03 WIB.

“Redfern Speech”. https://antar.org.au/sites/default/files/paul_keating_speech_transcript.pdf. Diakses pada 11 Maret 2015, pukul 21.30 WIB.

“Remitter Court”. <http://www.thefreedictionary.com/remitter>. Diakses pada 1 April 2015, pukul 9.05 WIB.

“The Aboriginal Land Rights Act”. <http://www.clc.org.au/articles/info/the-aboriginal-land-rights-act/>. Diakses pada 12 Februari 2015, pukul 20.29 WIB.

“The Constitution”. <http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/52%20Sen/5>

23%20PPP/2012_Australian_Constitution.pdf. Diakses pada 27 November 2014, pukul 21.12 WIB.

“The Dreaming”. <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/dreaming>. Diakses pada 9 Februari 2015, pukul 19.15 WIB.

“The International Day of the World's Indigenous People”. <http://www.indigenous.gov.au/news-and-media/event/international-day-worlds-indigenous-peoples>. Diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.55 WIB.

“The Mabo Case and the Native Title Act”. <http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/Previousproducts/1301.0Feature%20Article21995?opendocument>. Diakses pada 11 Maret 2015, pukul 20.01 WIB.

“The Stolen Generations”, <http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/factsheets/52.html>. Diakses pada 8 Maret 2015, pukul 21.59 WIB.

“Torres Strait Islanders”. www.naa.gov.au. Diakses pada 12 November 2014, pukul 17.55 WIB.

“Torres Strait Timeline”. http://iaha.com.au/wp-content/uploads/2013/03/000209_tsihistorictimelines.pdf. Diakses pada 1 April 2015, pukul 19.01 WIB.

Arsip dari Pangkalan Data *Online*

“Aboriginal people and Torres Strait Islander peoples - Prime Minister Paul Keating with Mabo group at Parliament House”. www.naa.gov.au. Diakses pada 8 April 2015, pukul 14.02 WIB.

“High Court of Australia, Mabo v Queensland (No 2) (1992) HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992)”. <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1992/23.html>. Diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.04 WIB.

“High Court of Australia, Mabo v Queensland (1988) HCA 69; (1989) 166 CLR 186 (8 December 1988)”. <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1988/69.html>. Diakses pada 1 Maret 2015, pukul 21.10 WIB.

“High Court of Australia, Western Australia v Commonwealth [1995] HCA 47; (1995) EOC 92-687 (extracts); (1995) 69 ALJR 309; (1995) 183 CLR 373 (15 September 1995)”. <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1995/47.html>. Diakses pada 1 Maret 2015, pukul 20.10 WIB.

“In the High Court of Australia, Office of the Registry Brisbane, No B12 of 1982, Transcript of Proceedings”.

<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCATrans/1991/24.pdf>. Diakses pada 2 Maret 15. 02 WIB, hlm. 120

“Le-Ri: Dave Passi, Eddie Mabo, Bryan Keon-Cohen and James Rice outside the Queensland Supreme Court in 1989”. www.press.anu.au. Diakses pada 27 April 2015, pukul 6.12 WIB.

“Letters Patent”. <http://foundingdocs.gov.au/item-sdid-47.html>. Diakses pada 25 April 2015, pukul 6.18 WIB.

“L-R: Eddie Mabo, Barbara Hocking, Ron Castan, Greg McIntyre, Bryan Keon-Cohen. Taken during the Qld.Supreme Court hearings 1985-86.” www.nfsa.gov.au. Diakses pada 27 April 2015, pukul 6.15 WIB.

“Mabo Decision”. <http://www.foundingdocs.gov.au/item-did-33.html>. Diakses pada 5 April 2015, pukul 13.12 WIB.

“Mabo Legal Team”. www.heraldsun.com.au. Diakses pada 27 April 2015, pukul 10.17 WIB.

“Native Title Act 1993”. http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nta1993147/. Diakses pada 7 Maret 205, pukul 9.10 WIB.

“Torres Strait Islanders”. www.naa.gov.au. Diakses pada 2 Maret 2015, pukul 12.10 WIB.

“Torres Strait Light Infantry Battalion”. www.naa.gov.au. Diakses pada 2 Maret 2015, pukul 19.10 WIB.

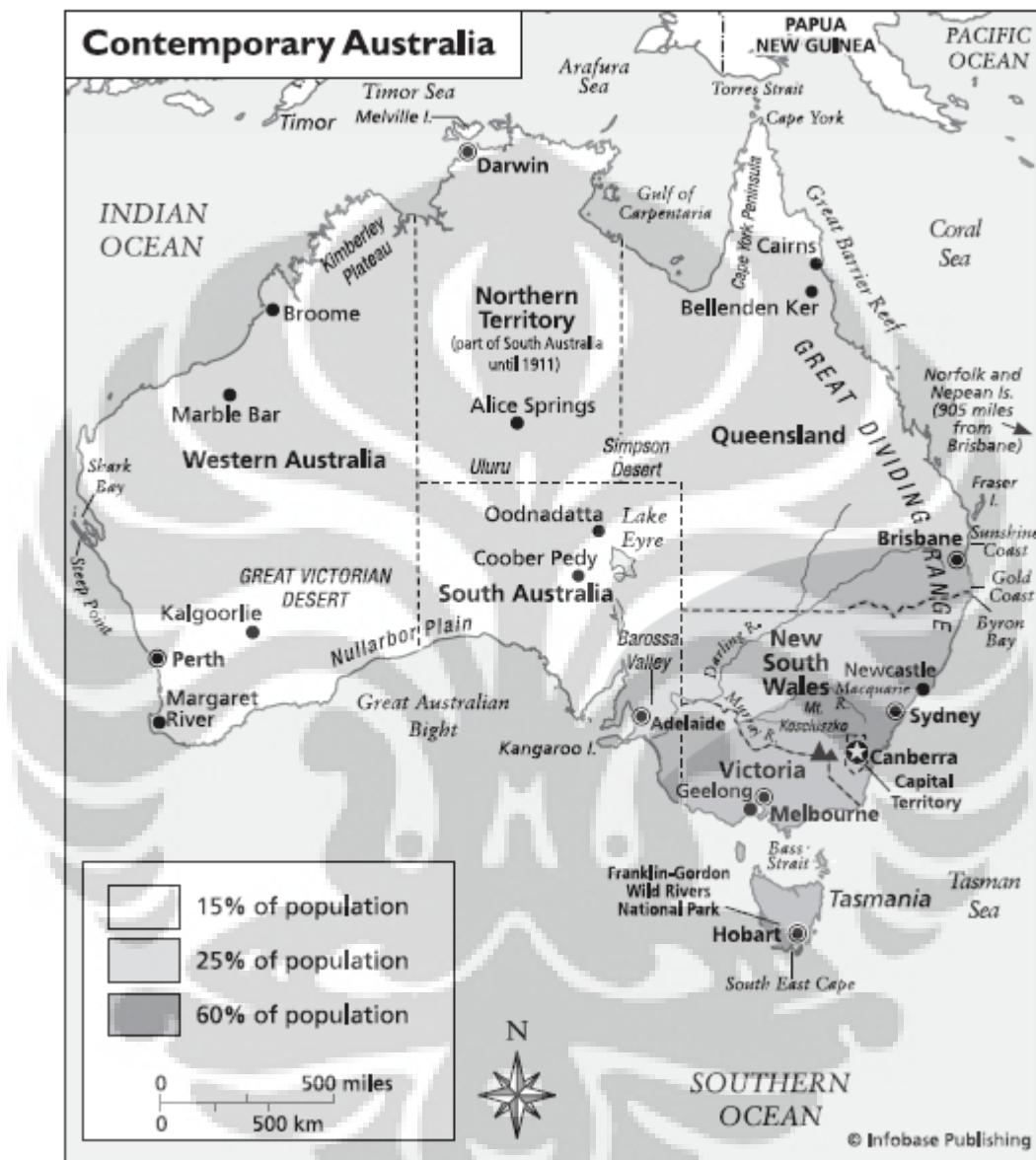
“Torres Strait Map”. www.nfsa.gov.au. Diakses pada 27 April 2015, pukul 11.01 WIB.

“Two Torres Strait Islander men on beach, one with fishing spear Eddie Mabo and Jack Wailu on the Island of Mer in the Torres Strait Island”. www.naa.gov.au. Diakses pada 8 April 2015, pukul 9.42 WIB.

“Queensland Coast Islands Act”. http://ozcase.library.qut.edu.au/qhlc/documents/QldBoundaries_QldCoastIslandsAct1878_43-Vic-c1.pdf. Diakses pada 25 April 2015, pukul 6. 19 WIB.

LAMPIRAN

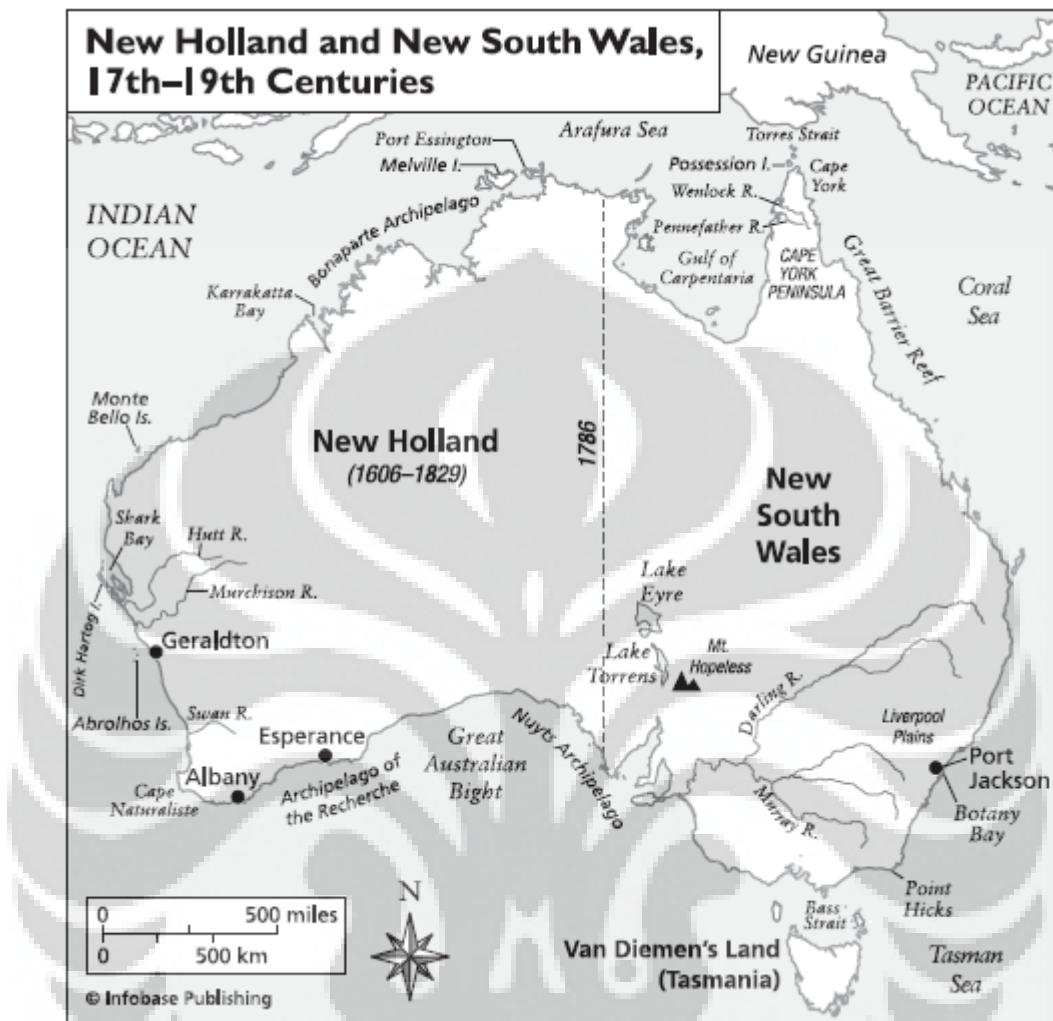
Lampiran 1



“Contemporary Australia”

Sumber: Barbara A. West, *A History of Australia*, (New York: Hermitage, 2010), hlm. 2.

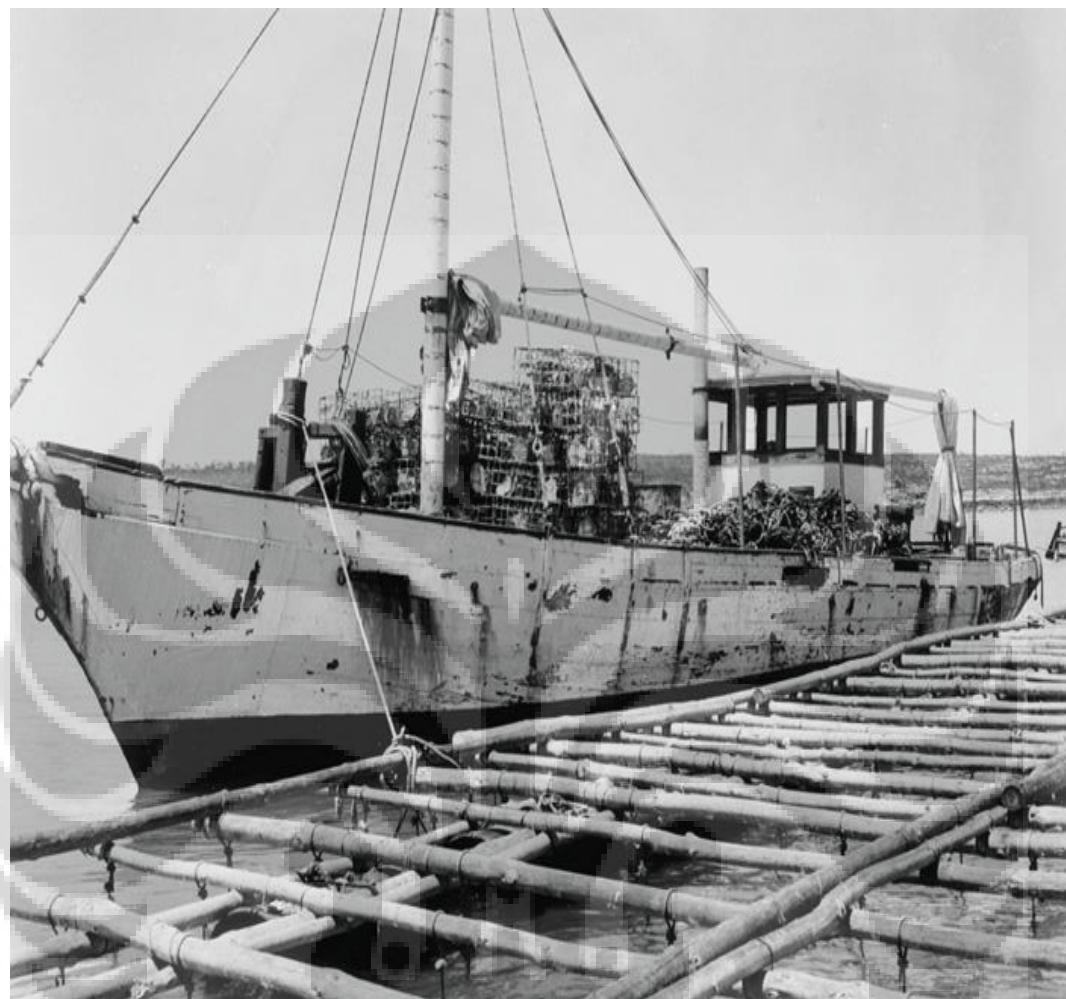
Lampiran 2



"New Holland and New South Wales, 17th-19th Centuries"

Sumber: Barbara A. West, *A History of Australia*, (New York: Hermitage, 2010), hlm. 32.

Lampiran 3



“Marine industry - Pearling - Different phases of cultured pearl industry in northern Australia, where Torres Strait Islanders are extensively employed 1970-1972”

(“Industri maritim – Pengambilan mutiara – Beberapa fase kebudayaan yang berbeda dari industry mutiara di Australia bagian utara, di mana Penduduk Kepulauan Selat Torres dipekerjakan dengan intensif 1970-1972”)

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diunduh pada 2 Januari 2015, pukul 12.09 WIB.

Lampiran 4



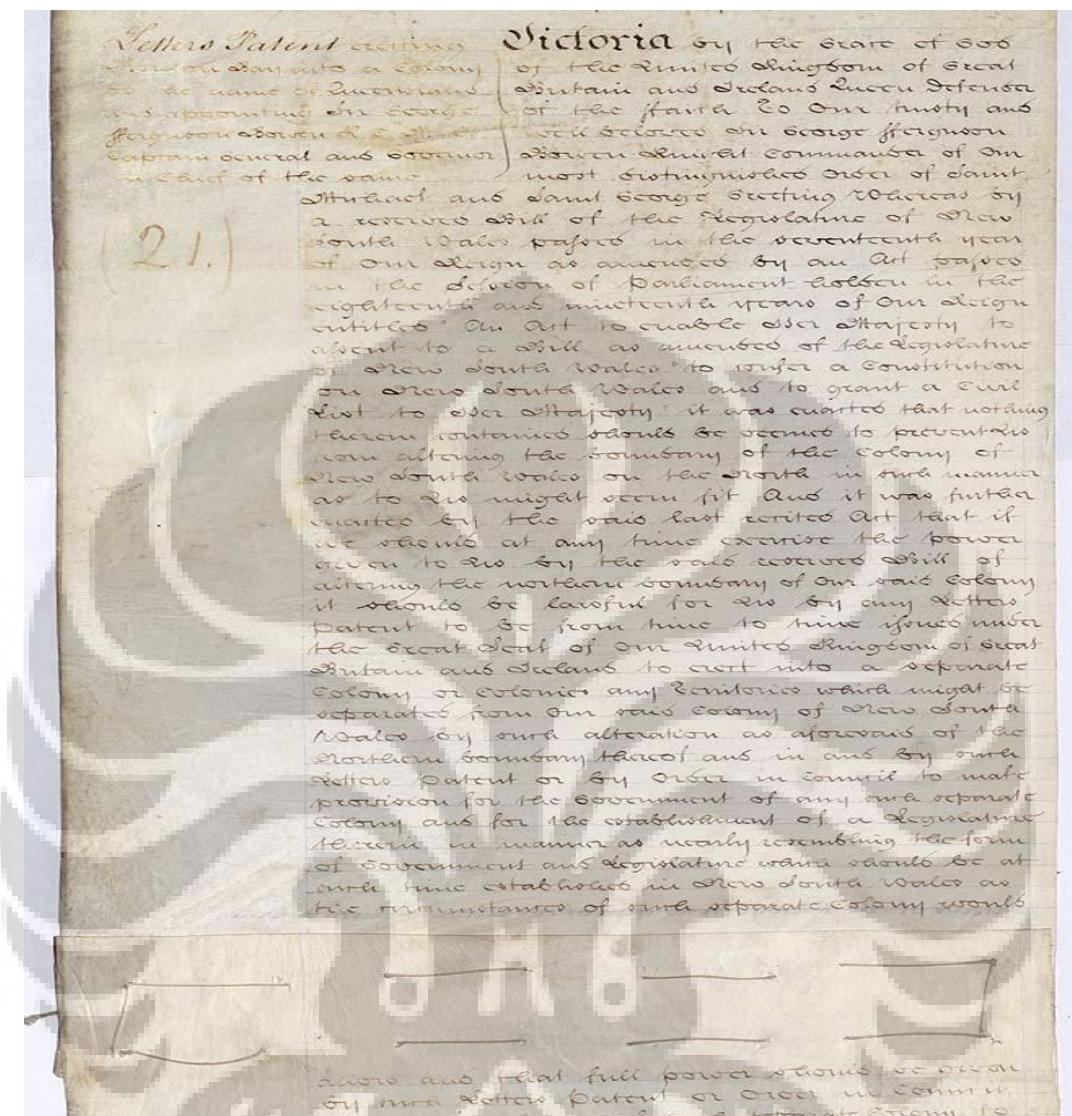
“Marine industry - Pearling - Different phases of cultured pearl industry in northern Australia, where Torres Strait Islanders are extensively employed 1970-1972”

(“Industri maritim – Pengambilan mutiara – Beberapa fase kebudayaan yang berbeda dari industry mutiara di Australia bagian utara, di mana Penduduk Kepulauan Selat Torres dipekerjakan dengan intensif 1970-1972”)

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diunduh pada 2 Januari 2015, pukul 12.10 WIB.

Lampiran 5



Letters Patent yang dikeluarkan oleh Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris pada 6 Juni 1859 untuk mendirikan Queensland sebagai sebuah koloni baru yang terpisah dari Koloni New South Wales.

Sumber: Museum of Australian Democracy, <http://foundingdocs.gov.au/item-sdid-47.html>

Diunduh pada 25 April 2015, pukul 6.18 WIB.





“Queensland Coast Islands Act” yang dikeluarkan pada tahun 1879 untuk menganeksasi wilayah

Kepulauan Selat Torres ke dalam territorial Koloni Queensland.

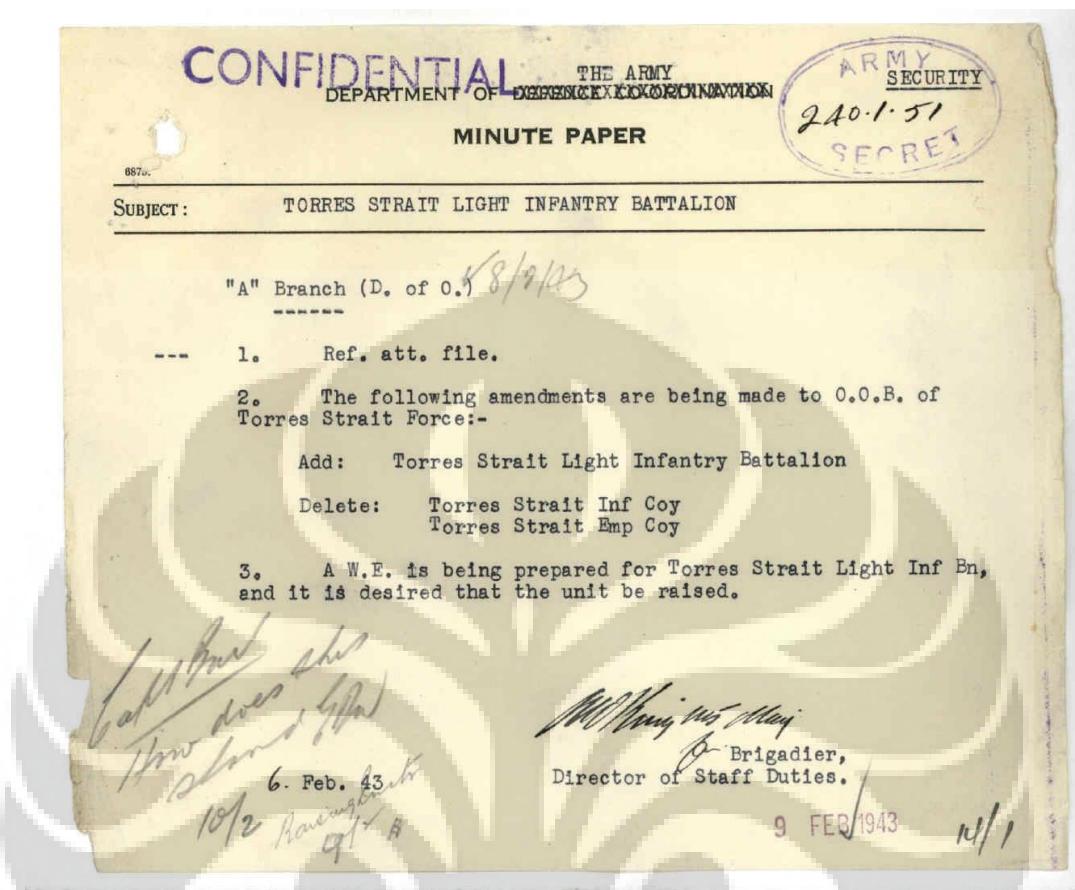
Sumber: Ozcase Queensland Historical Legal Collection (QHLC),

http://ozcase.library.qut.edu.au/qhlc/documents/QldBoundaries_QldCoastIslandsAct1878_43-Vic-c1.pdf

Diunduh pada 25 April 2015, pukul 6.18 WIB.



Lampiran 9

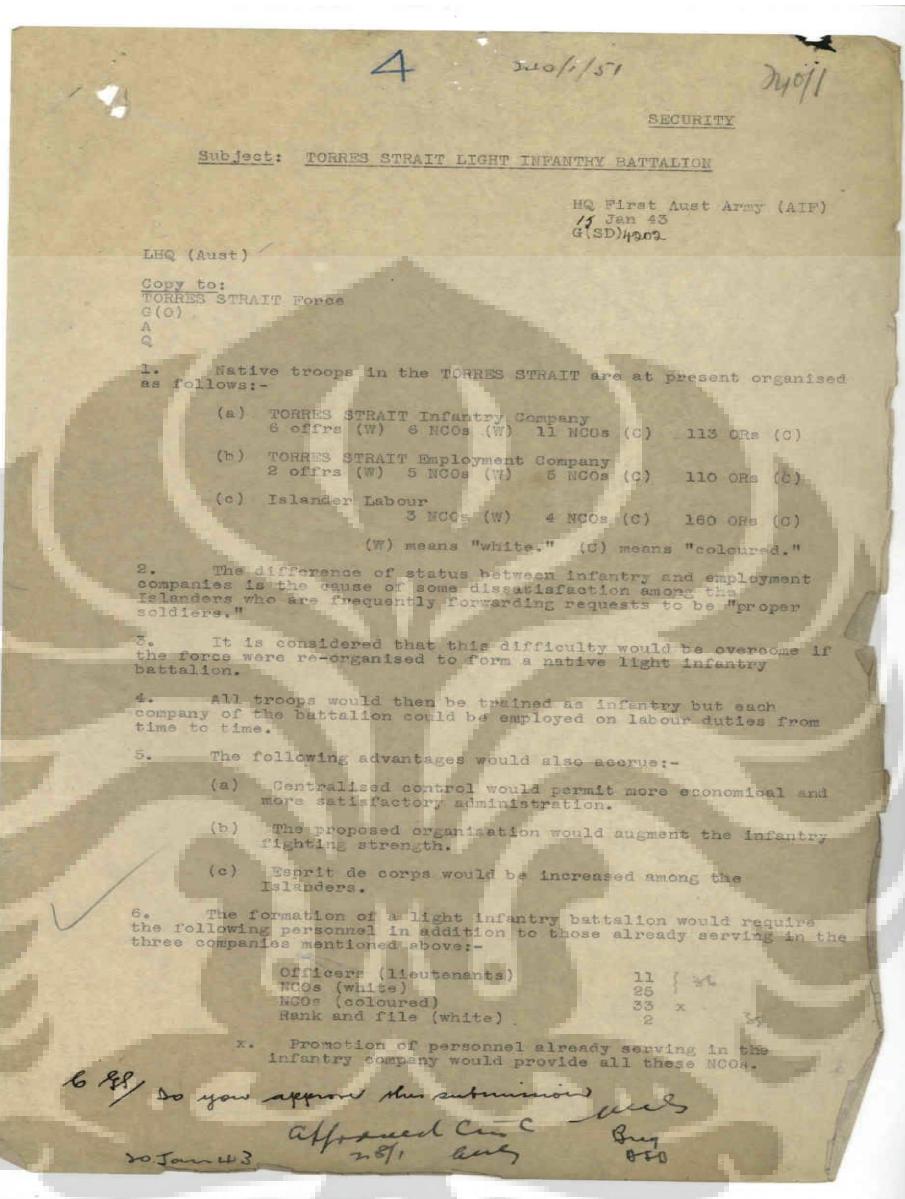


"Torres Strait Light Infantry Battalion"

Sumber: National Archives of Australia, www.naa.gov.au

Diunduh pada 2 Maret 2015, pukul 19.10 WIB.

Lampiran 10

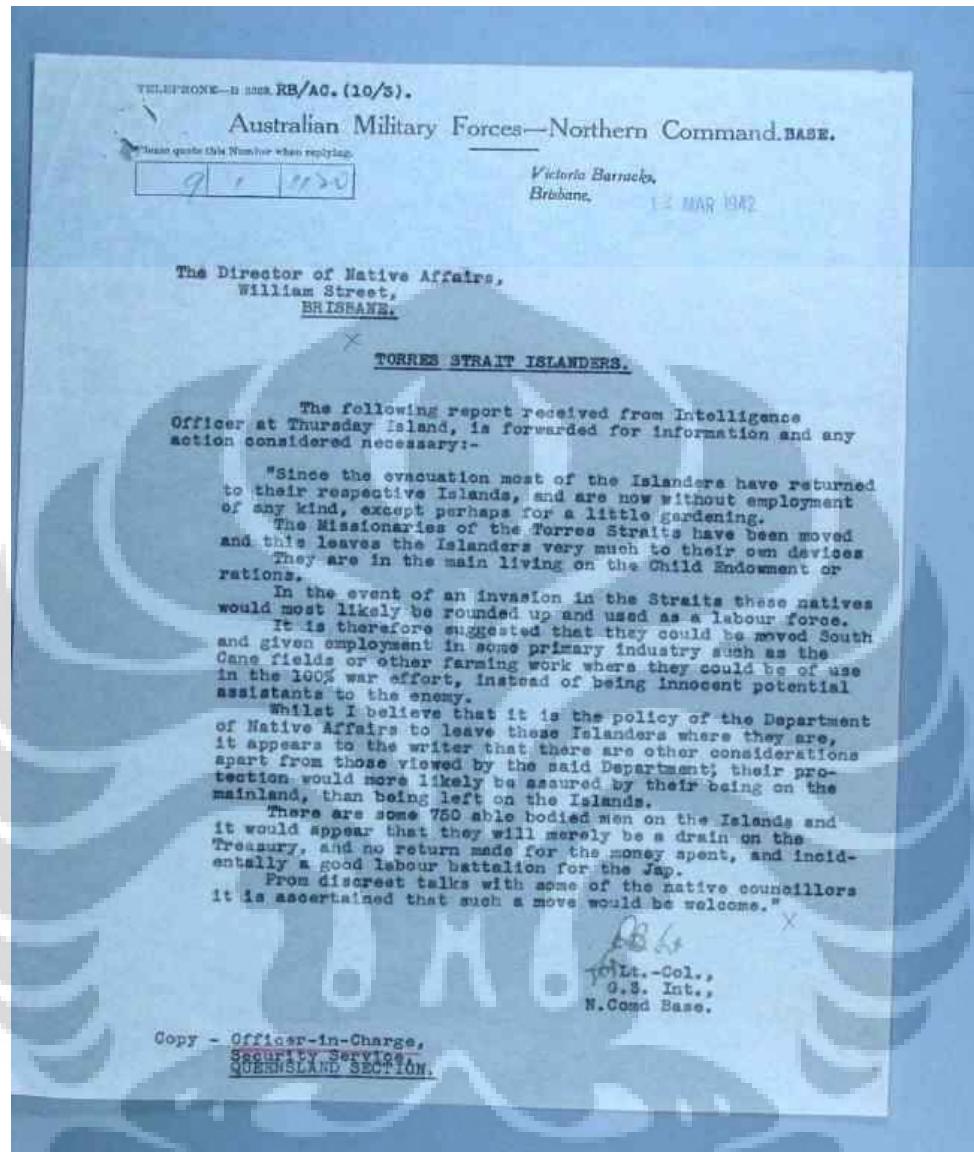


“Torres Strait Light Infantry Battalion”

Sumber: National Archives of Australia, www.naa.gov.au

Diunduh pada 2 Maret 2015, pukul 19.15 WIB.

Lampiran 11

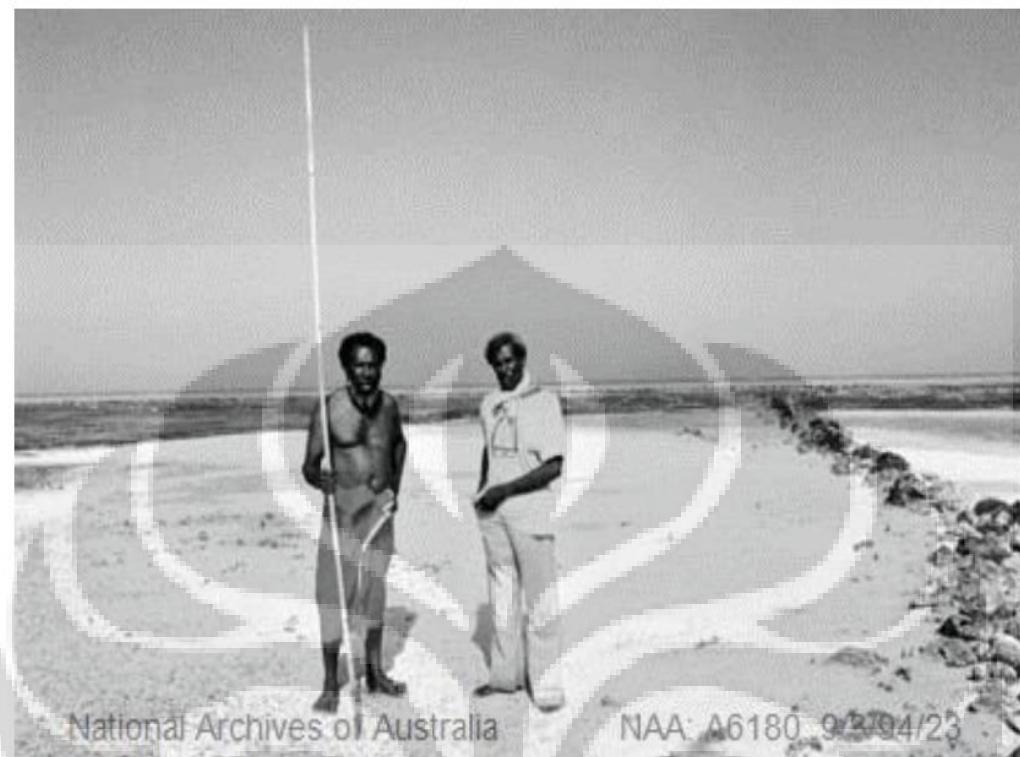


Dokumen militer yang menginformasikan pengevakuasi seluruh warga Australia yang berada di Kepulauan Selat Torres, kecuali para penduduk pulau itu sendiri.

Sumber: National Archives of Australia, www.naa.gov.au

Diunduh pada 2 Januari 2015, pukul 12.10 WIB.

Lampiran 12



“Two Torres Strait Islander men on beach, one with fishing spear Eddie Mabo and Jack Wailu on the Island of Mer in the Torres Strait Island”

(“Dua Penduduk Kepulauan Selat Torres di pantai, satu dengan memegang tongkat pancing adalah Eddie Mabo dan Jack wailu di Pulau Mer di Kepulauan Selat Torres”)

Sumber: National Archives of Australia, www.naa.gov.au

Diunduh pada 8 April 2015, pukul 9.42 WIB.

Lampiran 13



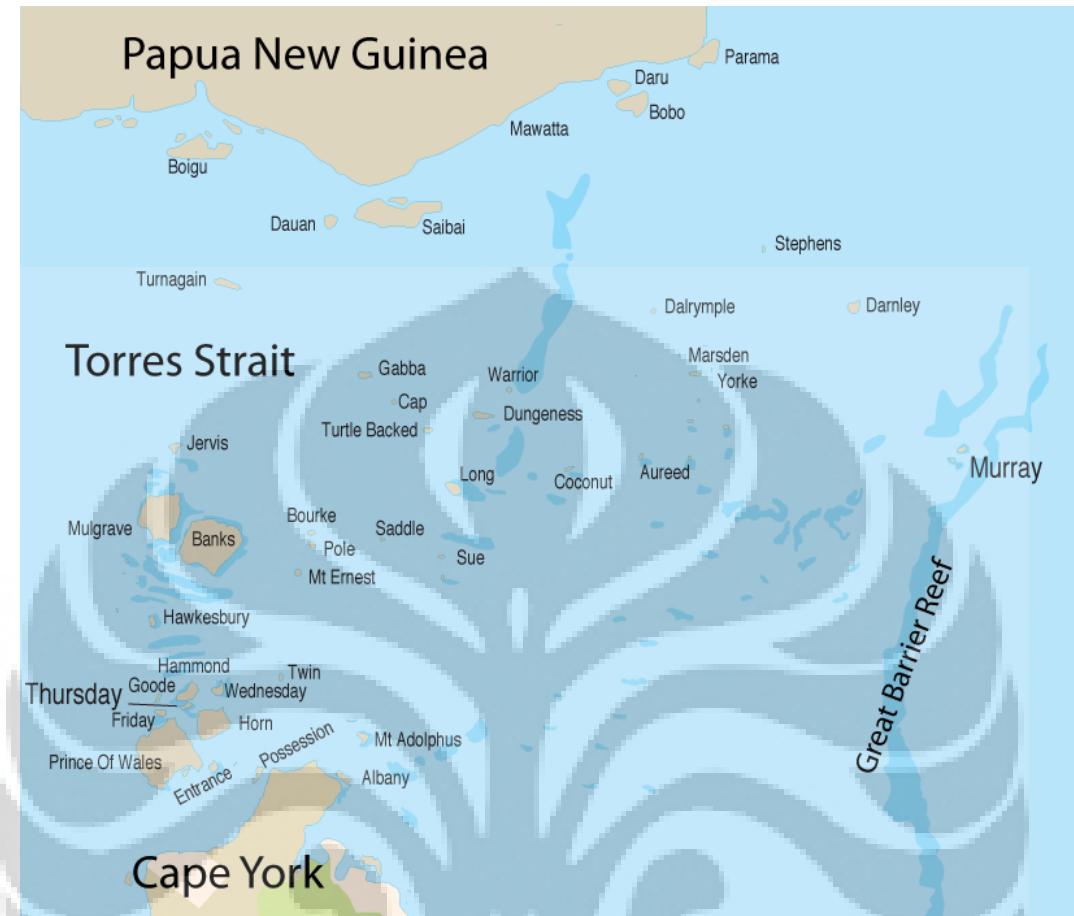
“Edward Koiki Mabo (Eddie Mabo)”

Sumber: The Herald Sun, www.heraldsun.com.au

Diunduh pada 27 April 2015, pukul 7.12 WIB.



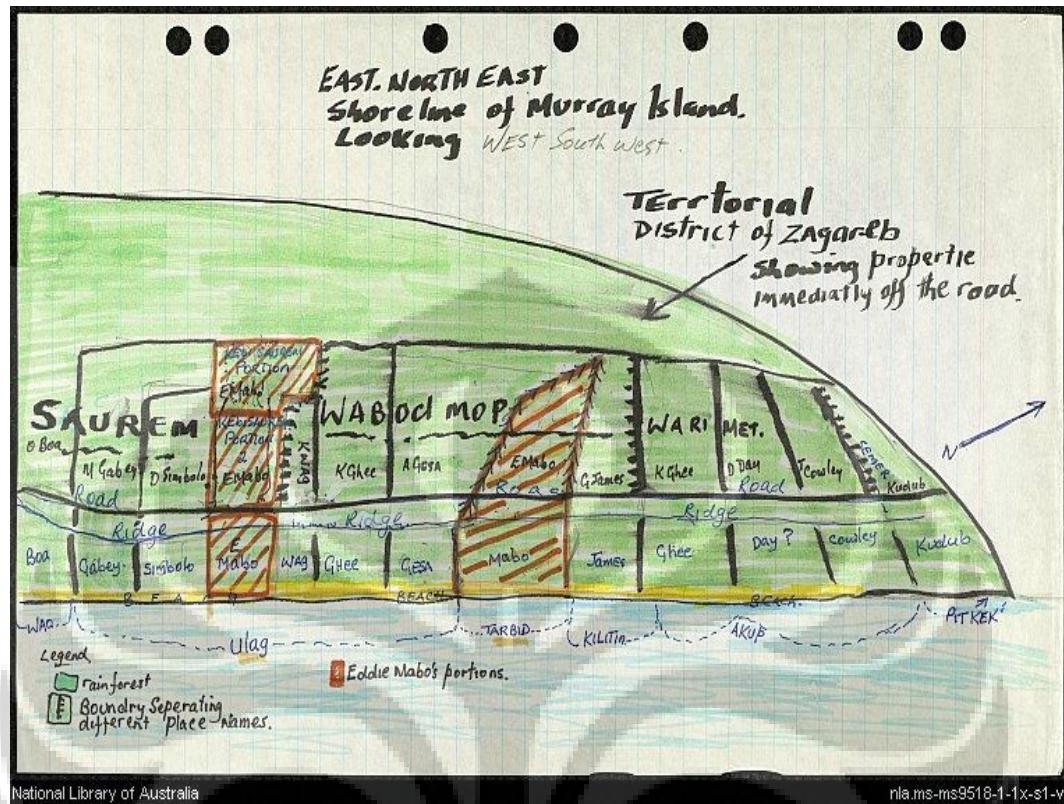
Lampiran 15



Peta Selat Torres, Queensland, Australia
 Sumber: National Film and Sound Archives Australia, www.nfsa.gov.au

Diakses pada 27 April 2015, pukul 11.01 WIB.

Lampiran 16



“Eddie Mabo’s Portions”, denah Pulau Murray, digambarkan oleh Eddie Mabo, yang menunjukkan kepemilikan tiap jengkal tanah tradisional di pulau tersebut.

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diakses pada 2 Maret 2015, pukul 13.21 WIB.

Lampiran 17



National Library of Australia

nla.pic-an23548153-v

Bonita (Netta) Mabo, istri dari Eddie Mabo.

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diunduh pada 2 Januari 2015, pukul 12.14 WIB.

Lampiran 18.1



[\[Home\]](#) [\[Databases\]](#) [\[WorldLII\]](#) [\[Search\]](#) [\[Feedback\]](#)

High Court of Australia

You are here: [AustLII](#) >> [Databases](#) >> [High Court of Australia](#) >> [1988](#) >> **[1988] HCA 69**
[\[Database Search\]](#) [\[Name Search\]](#) [\[Recent Decisions\]](#) [\[Noteup\]](#) [\[Context\]](#) [\[No Context\]](#) [\[Help\]](#)

◀ **Mabo** ▶ v Queensland [1988] HCA 69; (1989) 166 CLR 186 (8 December 1988)

HIGH COURT OF AUSTRALIA

◀ **MABO** ▶ and ANOTHER v. THE STATE OF QUEENSLAND and ANOTHER [1988] HCA 69; (1989) 166 CLR
186 F.C. 88/062

Constitutional Law (Cth)

High Court of Australia

Mason C.J.(1), Wilson(2), Brennan(3), Deane(4), Dawson(5), Toohey(3) and Gaudron(3) JJ.

CATCHWORDS

Constitutional Law (Cth) - Inconsistency between Commonwealth and State laws - Commonwealth law prohibiting racial discrimination - Prohibition of acts involving a distinction based on race - Enjoyment of right by person of particular race not enjoyed by persons of another race - Ownership of property - Islands off coast of Queensland annexed to colony in 1879 - State Act declaring islands upon annexation to have become waste lands of Crown - No compensation payable - Effect of State Act - Whether inconsistent with Commonwealth law - The Constitution (63 & 64 Vict. c. 12), s. 109 - Racial Discrimination Act 1975 (Cth), ss. 9, 10 - Queensland Coast Islands Declaratory Act 1985 (Q.) ss. 3, 4, 5.

Constitutional Law (Q.) - Powers of State Parliament - Waste lands - Management and control vested in legislature - Powers - Whether subject to limitation - Power to acquire property without compensation - Islands off coast of Queensland annexed to colony in 1879 - Action by persons claiming traditional ownership of islands - Subsequent Act declaring islands upon annexation to have become waste lands of Crown - No compensation payable - Effect of deemed declaration - Whether Act interferes with judicial process - Constitution Act 1867 (Q.), s. 40 - Queensland Coast Islands Declaratory Act 1985 (Q.), ss. 3, 4, 5.

HEARING

Canberra, 1988, March 15-17; December 8. 8:12:1988

DEMURRER.

...

Lampiran 18.2 (Lanjutan)

ORDER

Demurrer allowed.

AustLII: [Copyright Policy](#) | [Disclaimers](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#)

URL: <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1988/69.html>

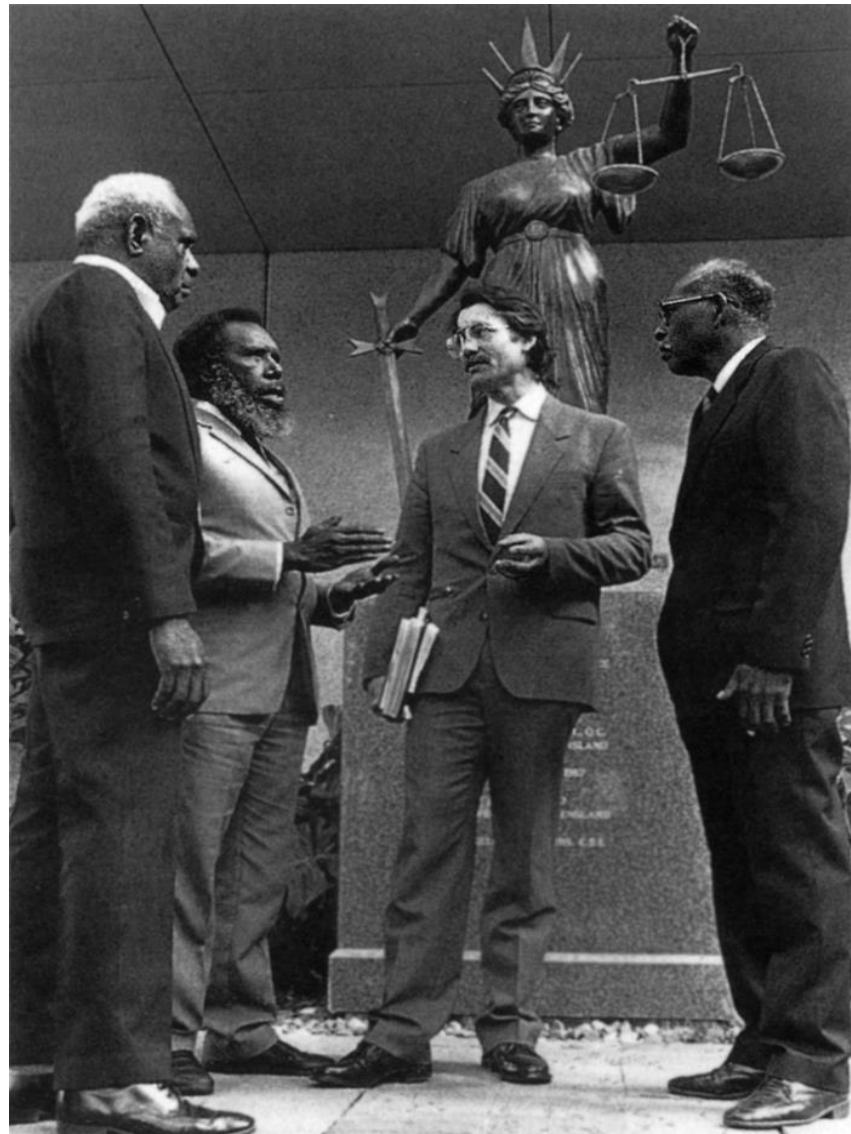
Keputusan kasus Mabo (No. 1) oleh *High Court of Australia*.

Sumber: Australasian Legal Information Institute (Austlii)

<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1988/69.html>

Diunduh pada 2 Maret 2015, pukul 18.12 WIB.

Lampiran 19



“Le-Ri: Dave Passi, Eddie Mabo, Bryan Keon-Cohen and James Rice outside the Queensland Supreme Court in 1989”

(“Ka-Ki: Dave Passi, Eddie Mabo, Bryan Keon-Cohen, dan James Rice di Luar Pengadilan Negara Bagian Queensland di tahun 1989”)

Sumber: Australian National University, www.press.anu.au

Diunduh pada 27 April 2015, pukul 6.12 WIB.

Lampiran 20



“L-R: Eddie Mabo, Barbara Hocking, Ron Castan, Greg McIntyre, Bryan Keon-Cohen. Taken during the Qld. Supreme Court hearings 1985-86.”

(“Ka-Ki: Eddie Mabo, Barbara Hocking, Ron Castan, Greg McIntyre, Bryan Keon-Cohen. Diambil ketika proses dengar pendapat di Pengadilan Negara Bagian Queensland berlangsung 1985-86.”)

Sumber: National Film and Sound Archives Australia,

<http://www.nfsa.gov.au/digitallearning/mabo/info/QldSupCrt.htm>

Diunduh pada 27 April 2015, pukul 6.15 WIB.

Lampiran 21

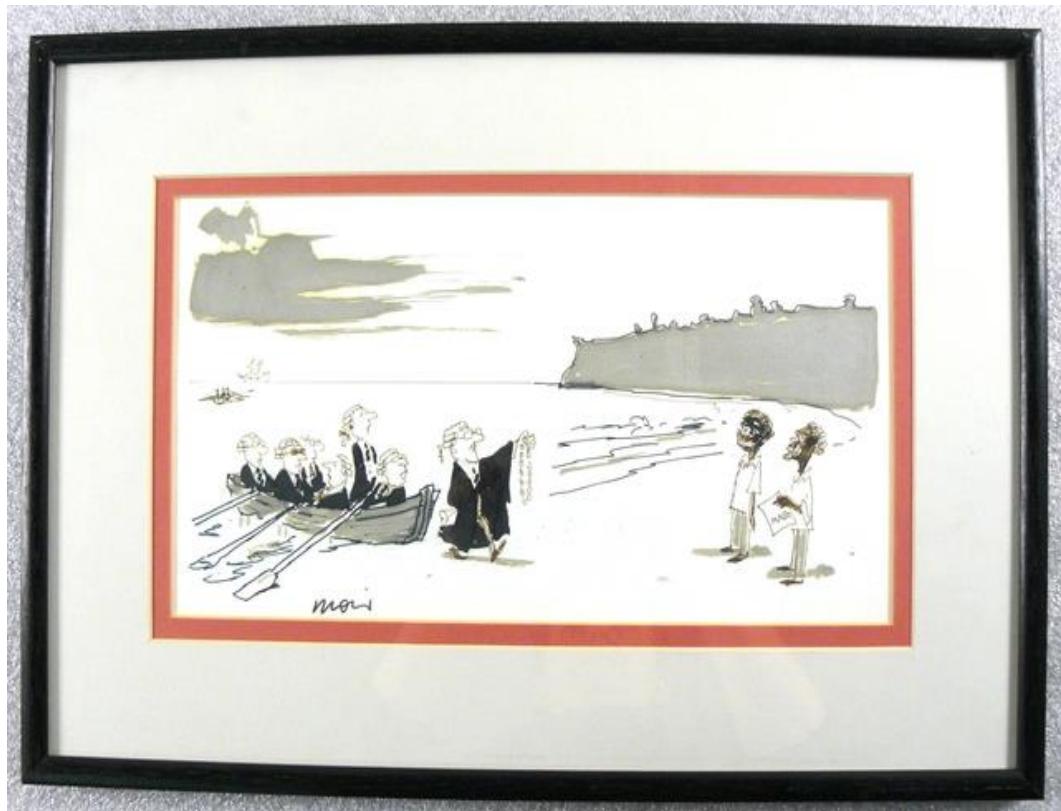


“Mabo Legal Team”

Sumber: The Herald Sun, www.heraldsun.com.au

Diakses pada 27 April 2015, pukul 10.17 WIB.

Lampiran 22

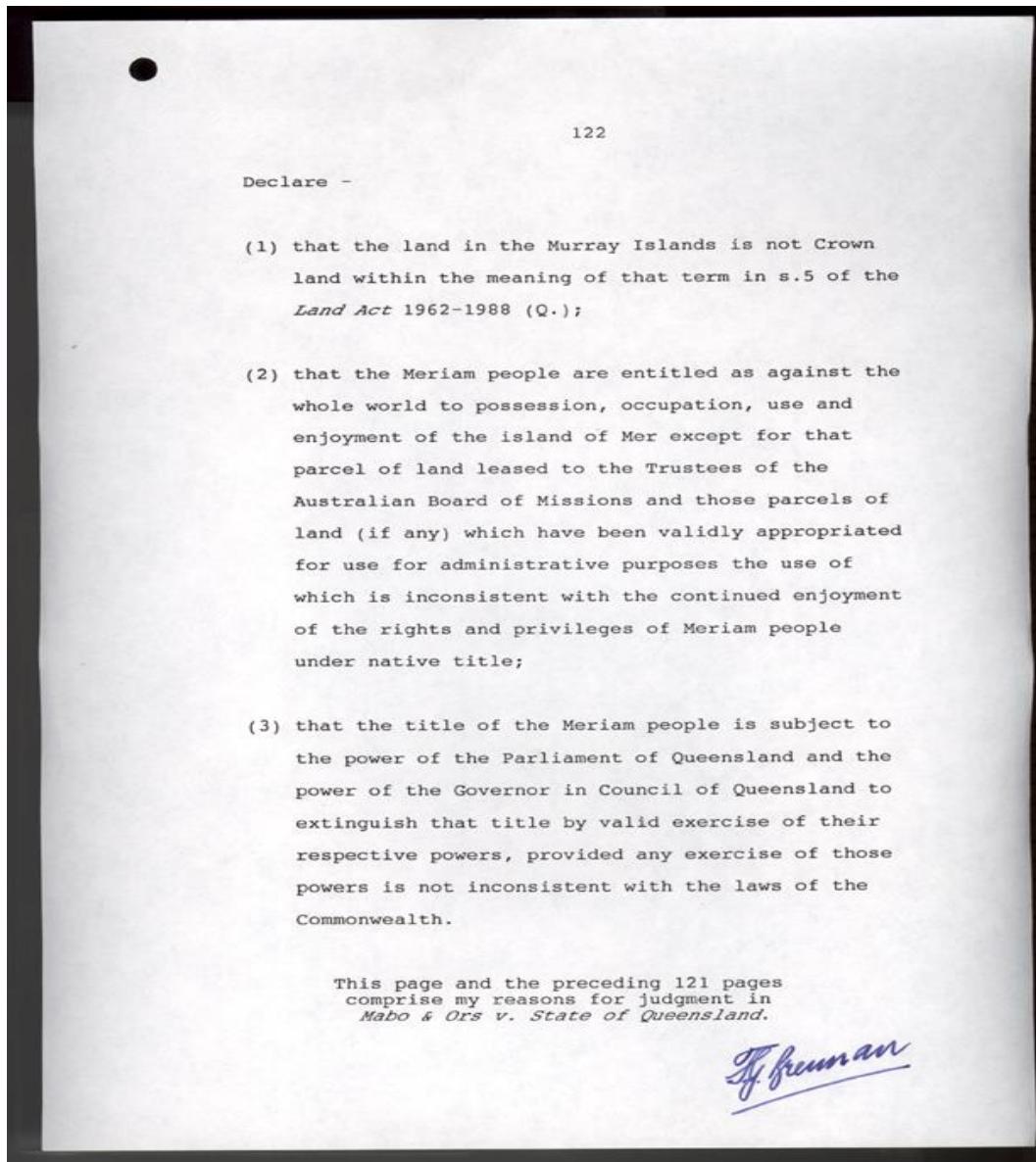


“Mabo Treaty”

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Dakses pada 3 Maret 2015, pukul 17.22 WIB.

Lampiran 23

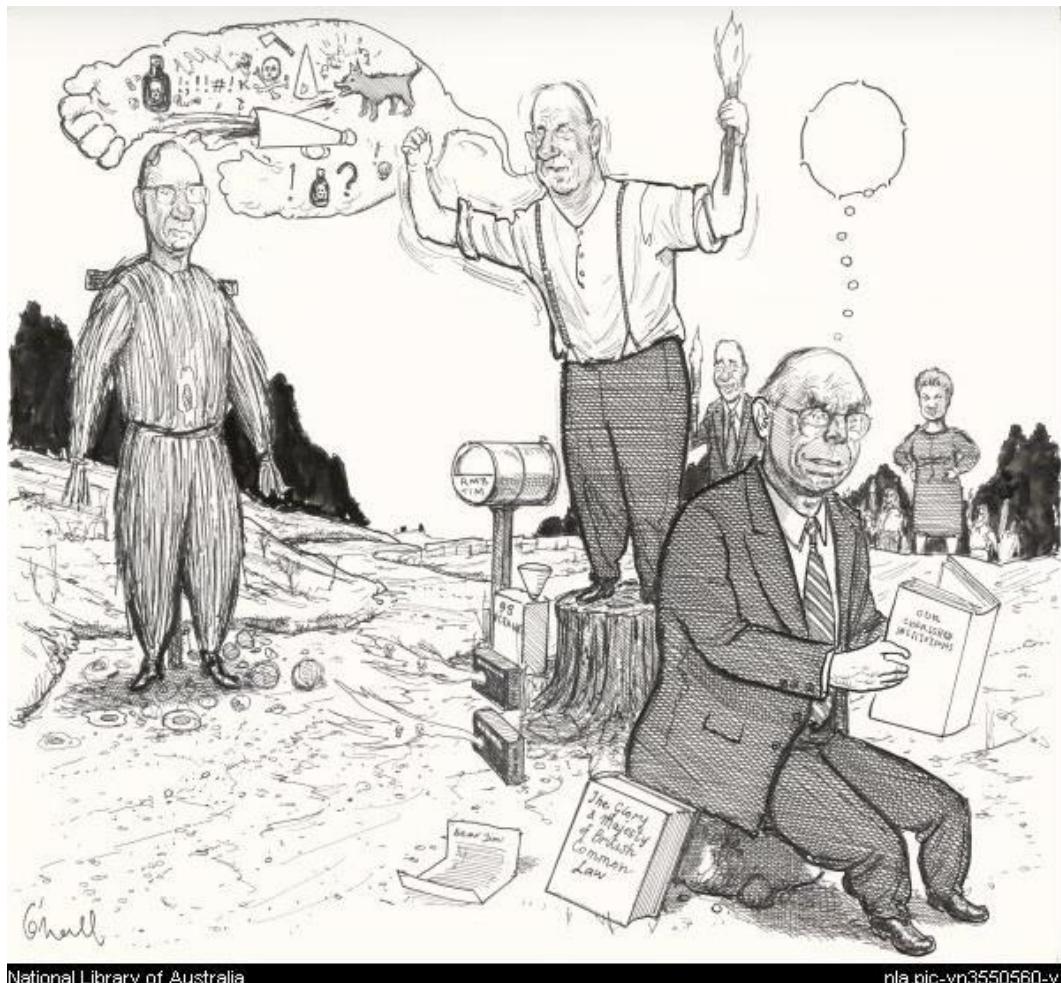


“Mabo Decision”, putusan yang dikeluarkan *High Court of Australia* terkait tuntutan Eddie Mabo dan para penuntut Merriam lainnya atas tanah tradisional mereka di Pulau Murray.

Sumber: Museum of Australian Democracy, <http://www.foundingdocs.gov.au/item-did-33.html>

Diakses pada 5 April 2015, pukul 13.12 WIB.

Lampiran 24



National Library of Australia

nla.pic-vn3550560-v

“*Justice Brennan Faces An Angry Mob*”, karikatur di surat kabar Australia yang menggambarkan ketidaksetujuan sebagian rakyat Australia (khususnya petani dan perusahaan tambang) terkait dengan *Mabo Decision* yang dikeluarkan oleh *High Court of Australia*.

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diakses pada 2 Januari 2015, pukul 19.20 WIB.

Lampiran 25

THE AUSTRALIAN

NUMBER 8642

THURSDAY JUNE 4 1992

60 CENTS* Freight extra

Blues win Origin
NSW claimed the Winfield State of Origin rugby league series last night for the first time since 1990 when it defeated Queensland 18-4 in the deciding match in Sydney.
Match report — Page 26

Aborigines rejoice as High Court ends terra nullius



Ms West, daughter Kristal and husband Danny at her father's grave yesterday... 'his last words were about the case' — Picture GARY SCHAFER

By DAVID SOLOMON, DEANIE CARBON and FIONA KENNEDY

ABORIGINES feasted and celebrated last night as the High Court rewrote the law to recognise Aboriginal land rights. The decision has finally quashed the notion of terra nullius, which had long justified the dispossession of native title, asserting the land was desert and unoccupied. By a 5-1 judgment, the High Court decided that Torres Strait islanders were entitled, "as against the whole world, to possession, occupation, use and enjoyment of the lands of the Murray Islands" on which they lived. The court said that they could not be denied the right to native title because the common law did not recognise native land title in Australia and that any interest in land had to be in terms of "property rights" recognised according to English common law.

David Solomon — Page 2

Two of the High Court judges yesterday described in emotive terms the way in which the common law had "robbed" the dispossession of Aboriginal people. Justices Deane and Gaudron described those acts as "the darkest aspect of the history of this nation". They said: "The nation as a whole must remain diminished unless and until there is an acknowledgement of, and retreat from, that dark history." But the historic ruling also recognised the power of State and Territory governments to override otherwise legitimate Aboriginal land claims without paying compensation. The court said for a claim to survive, a clan or group must continue to observe customs and maintain a traditional connection with the land. Justice Brennan, with whom Chief Justice Mason and Justice McHugh agreed, said: "When the tide of history has washed away any real acknowledgment of traditional law and any real observance of traditional customs, the foundation of native title has disappeared. A native title which has ceased with the abandoning of laws and customs based on tradition cannot be revived for any purpose." Justice Brennan said there might be other areas where native title had not been extinguished and where Aborigines, maintaining their identity and customs, could enjoy their native title.

Two of the four members of the majority in the court indicated some of the issues that would need to be considered by courts in considering the validity of other land claims. Justice Brennan said native land rights could be extinguished by grants of freehold or leasehold land by the government but not necessarily by the granting of prospecting rights. It would also be extinguished where land had been used for roads or other public works but not when set aside as a national park. The judgment yesterday followed a 10-year battle by Torres Strait islander Eddie Mabo from Murray Island and two other plaintiffs to force the law to recognise Aboriginal claim to land. Mabo died in January of cancer and his daughter, Ms Maleta West, said yesterday that was the last thought he was talking about. "Even on his deathbed he was talking about it," she said. "The last words he said were about the court case." Now 23 and with a three-year-old daughter of her own, Ms West was 13 when her father began his legal odyssey.

"That's when his thoughts were of the case. 'Even on his deathbed he was talking about it,'" she said. "The last words he said were about the court case."

Now 23 and with a three-year-old daughter of her own, Ms West was 13 when her father began his legal odyssey.

"That's when his thoughts were of the case. 'Even on his deathbed he was talking about it,'" she said. "The last words he said were about the court case."

Continued — Page 2

"Aborigines rejoice as High Court ends terra nullius"

Sumber: The Australian, 4 Juni 1992, hlm. 1.

Diakses pada 5 Februari 2015, pukul 11.02 WIB.

Lampiran 26



Celuia Mabo, anak perempuan dari Eddie dan Bonita Mabo beserta cucu mereka di depan makam Eddie Mabo di Desa Las, Pulau Murray.

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diakses pada 2 Februari 2015, pukul 13.15 WIB.

Lampiran 27



“Aboriginal people and Torres Strait Islander peoples - Prime Minister Paul Keating with Mabo group at Parliament House”

(“Orang Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres – Perdana Menteri Paul Keating dengan grup Mabo di Gedung Parlemen”)

Sumber: National Archives of Australia, www.naa.gov.au

Diakses pada 8 April 2015, pukul 14.02 WIB.

Lampiran 28



National Library of Australia

nla.pic-vn3258812-v

"You Wanna Policy? I'll Give You A !!%@%! Policy!"*, sebuah karikatur di surat kabar Australia yang menggambarkan suasana debat *Mabo Bill* di *Senates* Australia.

Sumber: National Library of Australia, www.nla.gov.au

Diakses pada 3 Maret 2015, pukul 17.22 WIB.